

ANALISIS

SUMBER DAYA MANUSIA, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA



Asmiati Abdul Malik PhD

UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta pada Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual.
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 100.000 (seratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

**Penulis:
Asmiati Abdul Malik Ph.D.**



2022

ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Jumlah halaman : 98 halaman

Ukuran halaman : 21x 29,7 cm

ISBN: 978-602-7989-53-5

Penulis:

Asmiati Abdul Malik Ph.D.

@ Hak Cipta dan tanggung jawab isi ada pada Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Siapapun dilarang keras menerjemahkan, mencetak, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Cetakan pertama:

April 2022

Diterbitkan oleh:

Universitas Bakrie Press



Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.2/RW.5, Karet,
Kecamatan Setiabudi, Kuningan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
<https://ubakriepress.bakrie.ac.id/>
email: ubakriepress@bakrie.ac.id

Contents

List of Figures	6
List of Graphs	7
List of Maps	8
List of Structure	10
List of Tables	10
Kata Pengantar	12
Executive Summary	13
Background Umum	17
A. Sumber Daya Manusia	18
1. Dimensi Kesehatan	18
a. Kondisi Umum	18
b. Perubahan Umur Harapan hidup 2019-2020	19
2. Dimensi Pengetahuan	20
a. Harapan Lama Sekolah 2020	20
b. Perubahan Harapan Lama Sekolah 2019-2020.....	21
c. Rata-rata Lama Sekolah 2020	22
d. Perubahan Rata-rata Lama Sekolah 2019-2020	23
3. Dimensi Standar Hidup Layak	24
a. Pengeluaran per Kapita	24
b. Perubahan Pengeluaran per Kapita (2019-2020).....	25
4. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi	26
a. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2020	26
a. Perubahan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2020.....	28
B. Pengangguran	31
1. Struktur Tenaga Kerja (2020)	32
a. Bukan Angkatan Kerja.....	32
b. Angkatan Kerja.....	32
2. Pengangguran Terbuka	33
3. Setengah Pengangguran.....	36
4. Dinamika.....	38
5. Angkatan Kerja	41
a. Bekerja.....	42
b. Perubahan Bekerja 2019-2020	43
c. Pengangguran	44

d. Perubahan Pengangguran 2019-2020	45
e. Jumlah Angkatan Kerja.....	46
f. Perubahan Angkatan Kerja (2019-2020).....	48
g. % Bekerja.....	49
h. Perubahan % Bekerja 2019-2020	50
6. Bukan Angkatan Kerja.....	51
a. Sekolah.....	51
b. Perubahan Sekolah 2019-2020.....	52
c. Mengurus Rumah Tangga.....	53
d. Perubahan Mengurus 2019-2020.....	53
e. Lainnya	54
f. Perubahan Lainnya 2019-2020.....	55
g. Jumlah BAK	56
h. Perubahan Jumlah BAK 2019-2020.....	57
i. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	58
j. Perubahan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (2019-2020).....	59
k. Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) 2020.....	59
l. Perubahan Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) (2019-2020) 60	
7. <i>Takeaways</i>	61
C. Kemiskinan	63
1. Faktor-Faktor Penyebab Tingkat Kemiskinan per 2020	63
2. Perkembangan Kemiskinan	64
a. Perkembangan Kemiskinan Maret 2019 – September 2020	64
b. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (September 2020).....	65
3. Garis Kemiskinan	68
a. Garis Kemiskinan Menurut Provinsi.....	68
b. Garis Kemiskinan (Perkotaan+ Pedesaan) Nasional – September 2020	68
a. Pertambahan Garis Kemiskinan Nasional	70
b. Garis Kemiskinan Perkotaan.....	71
c. Perubahan Garis Kemiskinan Perkotaan	72
d. Garis Kemiskinan Pedesaan	73
e. Garis Kemiskinan Pedesaan (Perubahan) – September 2019-2020.....	73
4. Tingkat Kedalaman Kemiskinan	74
a. Kedalaman Kemiskinan Perkotaan	75
b. Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Perkotaan.....	76

c. Kedalaman Kemiskinan Pedesaan	77
d. Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Pedesaan	78
e. Kedalaman Kemiskinan Secara Keseluruhan	79
f. Pertambahan Kedalaman Kemiskinan (2019-2020)	80
5. Tingkat Keparahan Kemiskinan	80
a. Indeks Keparahan Kemiskinan Pedesaan	82
b. Perubahan Keparahan Kemiskinan Pedesaan (2019-2020)	83
c. Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan	84
d. Perubahan Keparahan Kemiskinan Perkotaan (2019-2020)	85
e. Indeks Keparahan Perkotaan+Pedesaan (2020)	86
f. Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Gabungan (2019-2020)	87
6. Gini Rasio	88
a. Gini Rasio Perkotaan (September 2020)	89
b. Perubahan Gini Rasio Perkotaan (September 2019-2020)	90
c. Gini Rasio Pedesaan (September 2020)	91
d. Perubahan Gini Rasio Pedesaan (September 2019-2020)	92
c. Gini Rasio (Pedesaan+Perkotaan) September 2020	93
d. Perubahan Gini Rasio (Pedesaan+Perkotaan) 2019-2020	94
e. Takeaways	95
Tentang Penulis	98

List of Figures

Figure 1: Tingkat Pengangguran Terbuka (Data diolah dari BPS, 2020)	33
Figure 2: Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	33
Figure 3: Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2019-2020 (Data diolah dari BPS 2020)	35
Figure 4: Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (persen) 2019-2020 (Data diolah dari BPS 2020)	37
Figure 5: Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Daerah Jenis Kelamin (Persen) 2018-2019 (Data diolah BPS 2020)	38
Figure 6: Angkatan Kerja (Perubahan) per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	48
Figure 7: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	81
Figure 8: Gini Rasio (September 2019-2020) (Data diolah dari BPS, 2020)	88

List of Graphs

Graph 1: Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa), 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	41
Graph 2: Perubahan Jumlah Penduduk 2019-2020. (Data diolah dari BPS, 2020).....	41
Graph 3: Bekerja – Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	42
Graph 4: Perubahan dan Pengurangan Jumlah Penduduk yang Bekerja (2019-2020) (Data diolah dari BPS, 2020).....	43
Graph 5 : Pengangguran-Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	44
Graph 6: Pengangguran (Perubahan) Per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	46
Graph 7: Angkatan Kerja – Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	46
Graph 8: Bekerja (%) per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	49
Graph 9: Bekerja (Persen) Perubahan per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	50
Graph 10: Sekolah Per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	51
Graph 11: Sekolah (Perubahan) 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	52
Graph 12: Mengurus Rumah Tangga per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	53
Graph 13: Mengurus Rumah Tangga (Perubahan) – per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	53
Graph 14: Kegiatan Lainnya – Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	54
Graph 15: Perubahan Lainnya (2019-2020) (Data diolah dari BPS, 2020).....	55
Graph 16: Bukan Angkatan Kerja per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	56
Graph 17: Perubahan Jumlah Bukan Angkatan Kerja per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	57
Graph 18: Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	58
Graph 19: Perubahan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	59
Graph 20: Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	59
Graph 21: Perubahan Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) – Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	60
Graph 22: Perkembangan Kemiskinan (persen) per Maret 2019-2020 dan September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	64
Graph 23: Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribuan Jiwa) – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	66
Graph 24: Garis Kemiskinan Perkotaan+Pedesaan Nasional – September 2020.....	68
Graph 25: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Pertambahan/Perubahan per September 2019-2020.....	70
Graph 26: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi – Perkotaan (Rupiah/kapita/bulan) per September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	71
Graph 27: Garis Kemiskinan Perkotaan Perubahan (Rupiah/kapita/bulan) – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	72
Graph 28: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi Pedesaan (Rupiah/kapita/bulan)- September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	73
Graph 29: Garis Kemiskinan Pedesaan Perubahan (Rupiah/kapita/bulan) – September 2019-2020.....	73
Graph 30: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	75
Graph 31: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan/Pertambahan - Perkotaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	76

Graph 32: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	77
Graph 33: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan - Pedesaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	78
Graph 34: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan+Pedesaan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	79
Graph 35: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pertambahan – September 2019- 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	80
Graph 36: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan- September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	82
Graph 37: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan/Perubahan – September 2-20192020 (Data diolah dari BPS, 2020)	83
Graph 38: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	84
Graph 39: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan/Perubahan-September (Data diolah dari BPS, 2020)	85
Graph 40: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan+Pedesaan - September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	86
Graph 41: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan Perkotaan+Pedesaan per September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	87
Map 53: Graph 42: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan Perkotaan+Pedesaan per September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	88
Graph 43: Gini Rasio Perkotaan -September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	89
Graph 44: Gini Rasio Perubahan Perkotaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	90
Graph 45: Gini Rasio Pedesaan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	91
Graph 46: Gini Rasio Pedesaan Perubahan -September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	92
Graph 47: Gini Rasio (Pedesaan+Perkotaan) per September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	93
Graph 48: Gini Rasio Perubahan (Pedesaan+Perkotaan) – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	94

List of Maps

Map 1: Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Data diolah dari BPS, 2020)	19
Map 2: : Umur Harapan Hidup Saat Lahir – Perubahan- 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020) ..	20
Map 3: Harapan Lama Sekolah (Data diolah dari BPS, 2020)	21
Map 4: Harapan Lama Sekolah – Perubahan per 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	22
Map 5: Map Rata-rata Lama Sekolah (Data diolah dari BPS, 2020)	22
Map 6: Rata-rata Lama Sekolah – Perubahan – 2019-2020(Data diolah dari BPS 2020)	24
Map 7: Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun), 2020 Data diolah dari BPS 2020)	25
Map 8: Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)-Perubahan- (2019-2020) (Data diolah dari BPS 2020)	26
Map 9: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2020 (Data diolah dari BPS 2020)	27
Map 11: Perubahan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2020	29
Map 12: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen) 2019-2020 (Data diolah dari BPS 2020)	34
Map 13: Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi (persen) 2019-2020 Data diolah dari BPS (2020)	36

Map 14: Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa) (Data diolah dari BPS, 2020)	41
Map 15: Bekerja – Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	43
Map 16: Bekerja (Perubahan) per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	44
Map 17: Pengangguran per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	45
Map 18: Pengangguran (Perubahan) per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	46
Map 19: Angkatan Kerja per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	47
Map 20: Angkatan Kerja (Perubahan) per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	48
Map 21: Bekerja (Persen) per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	49
Map 22: Bekerja (Persen) Perubahan per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	50
Map 23: Sekolah Per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	51
Map 24: Sekolah (Perubahan) per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	52
Map 25: Mengurus per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS 2020).....	53
Map 26: Mengurus Rumah Tangga (Perubahan) – Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	54
Map 27: Kegiatan Lainnya – Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	55
Map 28: Perubahan Lainnya – Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	55
Map 29: Bukan Angkatan Kerja per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	56
Map 30: Perubahan Jumlah Bukan Angkatan Kerja per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	57
Map 31: Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	58
Map 32: Perubahan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	59
Map 33: Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) per Agustus 2020... ..	60
Map 34: Perubahan Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) – Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	61
Map 35: Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa) – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	66
Map 36: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Keseluruhan - per September 2020	69
Map 37: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Pertambahan/Perubahan per September 2019-2020.....	70
Map 38: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi – Perkotaan (Rupiah/kapita/bulan) per September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	71
Map 39: Garis Kemiskinan Perkotaan Perubahan (Rupiah/kapita/bulan) – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	72
Map 40: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Pedesaan- September 2020	73
Map 41: Garis Kemiskinan Pedesaan Perubahan (Rupiah/kapita/bulan) – September 2019-2020.. ..	74
Map 42: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	76
Map 43: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan/Pertambahan - Pedesaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	76
Map 44: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan -September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	77
Map 45: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan - Pedesaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	78
Map 46: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Keseluruhan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	79
Map 47: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pertambahan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	80

Map 48: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan- September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	83
Map 49: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan/Perubahan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	84
Map 50: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	85
Map 51: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan/Perubahan-September.....	86
Map 52: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan+Pedesaan - September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	87
Map 53: Graph 42: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan Perkotaan+Pedesaan per September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	88
Map 54: Gini Rasio Perkotaan -September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	90
Map 55: Gini Rasio Perubahan Perkotaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)..	91
Map 56: Gini Rasio Pedesaan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	92
Map 57: Gini Rasio Pedesaan Perubahan -September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)....	92
Map 58: Gini Rasio (Pedesaan+Perkotaan) per September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	94
Map 59: Gini Rasio Perubahan (Pedesaan+Perkotaan) – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	95

List of Structure

Structure 1: Struktur Tenaga Kerja Indonesia (Data diolah dan diadaptasi dari BPS, 2020)	32
--	----

List of Tables

Table 1: Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	18
Table 2: Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	20
Table 3: Rata-rata Lama Sekolah (Data diolah dari BPS 2020)	23
Table 4: Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	25
Table 6: Indeks Pembangunan Manusia (Tahun) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	27
Table 5: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	28
Table 7: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), Agustus 2019-2020. (Data diolah dari BPS, 2020).....	34
Table 8: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi 2020 (Data diolah dari BPS 2020)	34
Table 9: Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (orang) Agustus 2019- Agustus 2020 (BPS, 2020)	35
Table 10: Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi (Persen), per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	36
Table 11: Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi (persen) 2020 (BPS, 2020).....	37
Table 12: Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, (Tertinggi) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)	39
Table 13: Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, (Terendah) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	40
Table 14: Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribuan Jiwa) (Data diolah dari BPS 2020)	65

Table 15: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan), September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	68
Table 16: Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi (Persen) (Data diolah dari BPS, 2020)	75
Table 17: Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi (Persen) Keseluruhan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).....	81
Table 18: Gini Rasio Menurut Provinsi per September 2020	89

Kata Pengantar

Penulis tergerak untuk menulis analisis singkat mengenai Sumber Daya Manusia, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia karena selama ini permasalahan utama di Indonesia tidak jauh dari permasalahan sumber daya manusia, tingginya angka pengangguran serta kemiskinan yang terus menjadi momok dari tahun ke tahun. Analisis dibatasi pada data kontemporer karena memang ditujukan untuk melihat dari kondisi sekarang dan keterkaitan antar komponen dari data tersebut.

Buku singkat ini membahas tentang analisis kontemporer tentang Sumber Daya Manusia, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia. Penulis menitik beratkan pada analisa data statistik untuk melihat keterkaitan antara kualitas sumber daya manusia yang tentunya sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan keterhubungannya dengan jumlah pengangguran di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan daya serap tenaga kerja, begitu juga dengan kualitas dari hasil produksi dari buruh yang ada. Pada ujungnya kualitas produksi berkorelasi dengan pendapatan buruh yang kemudian berimplikasi terhadap kesejahteraan mereka. Sementara secara makro kualitas dan kuantitas produksi berpengaruh terhadap pendapatan negara. Dengan pendapatan negara yang cukup pemerintah bisa melaksanakan program kerja yang lebih besar menjangkau banyak masyarakat, sementara ketika pendapatan negara berkurang, pemerintah akan cenderung menunda bahkan menghapus program yang sudah dan akan dibuat. Dengan *cycle* ini tentu akan kembali berdampak pada masyarakat sebagai contoh dengan pendapatan negara yang besar, tentu pemerintah memiliki cadangan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, Kesehatan serta sektor strategis lainnya. Program-program tersebut bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat banyak baik dari segi peningkatan kualitas pendidikan, tenaga didik dan infrastruktur pendukung lainnya. Begitu jua di sektor Kesehatan, pemerintah bisa memperluas jaminan kesehatan sehingga masyarakat luas mampu mendapatkan akses yang cepat dan baik di pelayanan kesehatan publik.

Komponen lain yang menjadi sangat penting dan signifikan untuk dianalisis adalah aspek pengangguran. Angka pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia pada hakikatnya sangat terkait dengan kualitas pendidikan. Buruh kita masih didominasi oleh buruh dengan kualitas pendidikan yang rendah dengan tingkat pendidikan tertinggi lulusan SD dan SMP. Ini menyebabkan *miss and match* antara dan industri dan kualitas buruh yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat dengan pendidikan rendah menjadi sangat rentan kemiskinan. Ketiga permasalahan ini sudah menjadi lingkaran setan yang harus mendapatkan jalan keluar. Belum lagi kalau kita membahas betapa besarnya gap antara kualitas pendidikan di provinsi di Jawa dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pembangunan yang tidak merata selama bertahun-tahun menyebabkan kemiskinan dan pengangguran terpusat di perkotaan, karena tingginya tingkat urbanisasi. Tentu saja, buku yang singkat ini tidak mampu untuk mengulas keseluruhan permasalahan yang ada. Namun penulis berharap bisa menjadi bacaan awal untuk memperdalam analisis pada sumber daya manusia, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Jakarta 1 April 2022



Penulis

Executive Summary

Laporan terbagi menjadi tiga bagian kajian yaitu: pertama memahami tentang kondisi sumber daya manusia, kedua tentang kondisi tenaga kerja dan ketiga tentang kemiskinan di Indonesia.

Pertama, **Sumber Daya Manusia (SDM)**. SDM memiliki kaitan erat dengan kualitas tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menentukan kualitas pembangunan. Ada tiga dimensi utama yang menentukan kualitas SDM termasuk **Dimensi Kesehatan, Pengetahuan dan Standar Hidup Layak**.

Dimensi Kesehatan melihat umur harapan hidup saat lahir. Dari hasil pengolahan data terlihat wilayah dengan harapan hidup yang terendah terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur terutama di Papua, Maluku, NTB dan NTT. Meskipun demikian, ada perubahan yang cukup baik jika dilihat berdasarkan data 2019-2020. Sementara dari **Dimensi Pengetahuan** melihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS di Indonesia adalah 12.98 tahun. Provinsi dengan HLS tertinggi adalah Yogyakarta 15.59 tahun dan terendah Papua 11.08. Konsentrasi Harapan Lama Sekolah terendah ada di Papua, sebagian besar pulau Kalimantan dan Jawa. Sementara yang tertinggi ada di Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku secara keseluruhan, Papua Barat dan sebagian besar pulau Sumatera. Sementara untuk RLS di Indonesia adalah 8.48 tahun di mana DKI Jakarta menduduki posisi paling tinggi di angka 11.13 tahun dan terendah adalah Papua 6,69 tahun. Konsentrasi RLS tertinggi ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Maluku dan Maluku Utara dan terendah ada di wilayah Papua, Jawa, NTB dan NTT. Untuk **Dimensi Standar Hidup Layak** yang melihat pengeluaran per Kapita menunjukkan bahwa pengeluaran per Kapita disesuaikan pada tahun lalu menunjukkan besaran pengeluaran per kapita Indonesia adalah Rp11013. Provinsi dengan Pengeluaran per Kapita tertinggi adalah Jakarta Rp18227 dan terendah Papua Rp6954. Data persebaran secara geografis terlihat Pengeluaran per Kapita tertinggi terendah terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur termasuk Papua, Maluku, Maluku Utara, NTB dan sebagian Sulawesi. Sementara yang tertinggi ada di Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Secara keseluruhan Indonesia mengalami penurunan pengeluaran per Kapita antara tahun 2019-2020, dengan provinsi terparah adalah Kalimantan Timur dan terendah adalah Bengkulu.

Dari analisis angka-angka tersebut di atas terlihat Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) adalah 71.94. IPM tertinggi di duduki oleh DKI Jakarta 80.77 dan terendah 60.44. Konsentrasi IPM rendah berada di wilayah Indonesia Timur terutama di Pulau Papua, NTT, NTB, dan Maluku. Terendah terkonsentrasi di Indonesia bagian barat termasuk Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Kedua membahas tentang **Pengangguran dan dinamika tenaga kerja** di Indonesia. Data menunjukkan struktur tenaga kerja Indonesia sebagai berikut: Penduduk Usia Kerja sebanyak 203,97 juta yang kemudian terbagi menjadi 138,22 juta Angkatan Kerja dan 65,75 juta Bukan Angkatan Kerja. Dari 138,22 juta Angkatan Kerja terdapat 9,77 juta pengangguran dan 128,45 juta orang yang bekerja. Dari angka 128,45 juta orang yang bekerja, 82,2 juta diantaranya pekerja penuh, 33,34 juta pekerja paruh waktu dan 13,09 juta setengah penganggur. Sementara untuk 65,75 juta Bukan Angkatan Kerja terbagi menjadi 40,96 juta mengurus rumah tangga, 15,35 juta sekolah dan 9,44 juta melakukan kegiatan lainnya.

Sementara untuk komponen pengangguran terbuka 87% pengangguran terbuka di Indonesia adalah orang dengan pendidikan rendah (SLTA ke bawah). Sebagian besar pengangguran terbuka terkonsentrasi di DKI Jakarta, Banten, Jawa barat dan Kep Riau. Sementara untuk Tingkat Setengah Pengangguran secara geografis persentase paling besar untuk tingkat setengah pengangguran menurut provinsi terletak di wilayah Indonesia Timur dan Barat, sedangkan wilayah tengah cenderung lebih rendah. Persentase pertambahan angka setengah pengangguran dari 2019-2020 adalah provinsi Bali sebesar 7%, atau 3% di atas persentase nasional. Provinsi yang paling tinggi presentasi setengah pengangguran adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 17% atau 7% lebih tinggi dari persentase nasional. Provinsi paling rendah persentase angka setengah penganggurannya adalah Kep. Riau sebesar 6% atau 4% lebih rendah dari angka nasional. Masyarakat dengan pendidikan paling rendah lebih cenderung susah mendapatkan pekerjaan dengan jam kerja di atas 35 jam. Masyarakat dengan pendidikan tinggi lebih cenderung mengalami persentase yang rendah terhadap tingkat setengah pengangguran. Untuk Angkatan Kerja penduduk Indonesia di tahun 2020 berjumlah 269,6 juta orang, 54% penduduk berada di pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah menduduki posisi provinsi terpadat dan Wilayah dengan pertambahan penduduk paling pesat antara tahun 2019-2020 adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten. Sementara Jawa Barat menempati pertumbuhan penduduk paling pesat sebesar 542 ribu orang dalam setahun dan bahkan 157% jika dibandingkan dengan pertambahan penduduk di Jawa Timur. Untuk data penduduk yang bekerja paling besar ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ketiga wilayah ini setara dengan 47% dari keseluruhan orang yang bekerja di Indonesia. Terdapat indikasi serapan dan ketersediaan lapangan kerja di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan Jawa Barat. Persebaran penduduk yang bekerja dari peta geografis terkonsentrasi paling besar di pulau Jawa, Sumatera, sebagian kecil pulau Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Sementara, Pulau Papua, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi memiliki jumlah orang yang bekerja paling sedikit.

Jadi Jumlah yang bekerja top 5 paling sedikit ada di Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Namun yang paling rendah adalah Papua Barat. Ini berarti wilayah dengan jumlah pekerja paling sedikit terletak di luar Jawa, tepatnya di Wilayah Indonesia Timur dan sebagian kecil di wilayah Indonesia Bagian Barat. Jumlah penduduk yang bekerja paling tinggi ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa tengah, Sumatera Utara dan Banten. Ini menunjukkan bahwa wilayah Jawa memiliki kapasitas serapan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Untuk data pengangguran paling besar ada di Jawa Barat. Kelima provinsi termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta secara keseluruhan sama dengan 64% seluruh pengangguran di Indonesia. Pengangguran yang paling rendah ada di Gorontalo, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara. Kepadatan pengangguran terkonsentrasi di Pulau Jawa, Sumatera, sebagian Kalimantan dan sebagian kecil pulau Sulawesi. Jumlah pengangguran paling tinggi ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Misalnya Jawa Barat jauh lebih tinggi 7,234,678 dari angka rata-rata nasional. Sementara Jumlah Pengangguran paling rendah adalah seluruh Indonesia adalah Bali, Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Data ini jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 9.767.754 jauh lebih rendah.

Ketiga membahas tentang **Kemiskinan**. Secara keseluruhan terdapat 29,12 juta orang yang terdampak penghasilannya karena Covid-19. Dengan demikian terjadi kenaikan angka kemiskinan yang dari posisi 24,79 juta orang pada bulan September 2020 naik menjadi 27,55

juga orang pada bulan September 2020. Ini berarti ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 2,76 juta orang. Dengan demikian 10,19% dari total penduduk di Indonesia masuk dalam kategori miskin. Jumlah penduduk miskin paling banyak pada September 2020 berada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kemiskinan perkotaan paling besar berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Kemiskinan pedesaan paling besar berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Sementara untuk **Garis Kemiskinan** paling tinggi ada di Bangka Belitung yang 60% lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Sementara untuk garis kemiskinan paling rendah ada di Sulawesi Barat. Konsentrasi garis kemiskinan tertinggi terletak di Pulau Papua, Maluku dan sebagian Kalimantan dan terendah ada di Pulau Sulawesi. Pertambahan garis kemiskinan paling tinggi ada di Kalimantan Tengah dan yang terendah ada di Bengkulu. Rata-rata pertambahan garis kemiskinan secara nasional Rp41627. Secara geografis konsentrasi pertambahan garis kemiskinan paling besar ada di Pulau Kalimantan dan terendah ada di Jawa dan Sulawesi.

Untuk Garis Kemiskinan Perkotaan tertinggi ada di provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp723.478. Garis Kemiskinan Perkotaan terendah ada di provinsi Sulawesi Barat Rp356.967. Rata-rata garis kemiskinan perkotaan nasional adalah Rp504.387,5. Garis kemiskinan terkonsentrasi paling besar di Papua, Maluku dan sebagian Kalimantan. Pulau yang paling rendah angka garis kemiskinan ada di Sulawesi. Provinsi dengan peningkatan Garis Kemiskinan Perkotaan paling tinggi adalah Maluku sebesar Rp38206. Provinsi dengan peningkatan Garis Kemiskinan Perkotaan terendah adalah Bengkulu Rp8138. Sementara untuk rata-rata peningkatan Garis Kemiskinan Perkotaan secara nasional adalah Rp20338,5. Konsentrasi peningkatan garis kemiskinan perkotaan terbesar ada di Kalimantan dan Maluku dan terendah ada di Maluku Utara, sebagian Sumatera dan Jawa. Garis Kemiskinan Pedesaan tertinggi ada di provinsi Bangka Belitung Rp736850. Garis Kemiskinan Pedesaan Terendah ada di Provinsi Sulawesi Selatan Rp350791. Rata-rata besaran Garis Kemiskinan Pedesaan Rp459580. Pulau yang dengan konsentrasi Garis Kemiskinan Pedesaan Tertinggi ada di Kalimantan, Maluku, Kalimantan dan sebagian Sumatera. Sementara untuk yang terendah ada di NTT, NTB, Sulawesi, Jawa dan Jawa.

Untuk rata-rata **Kedalaman Kemiskinan** nasional adalah 2.85%. Provinsi dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan paling tinggi ada di Nusa Tenggara dan terendah ada di Gorontalo. Pulau dengan konsentrasi kedalaman kemiskinan paling parah ada NTB, Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Jawa. Pulau dengan konsentrasi kedalaman kemiskinan paling rendah ada di Bali, Maluku Utara, Kalimantan dan Papua. Rata-rata pertambahan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan adalah 0.24%. Pertambahan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan paling besar adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 0.68% dan terendah adalah Kalimantan Utara yang justru mengalami perbaikan. Persebaran pertambahan angka persentase kedalaman kemiskinan pedesaan ada di Papua, Maluku dan sebagian besar wilayah Jawa dan paling rendah terlihat di Pulau NTB, Sulawesi dan Kalimantan. Rata-rata kedalaman kemiskinan pedesaan secara nasional adalah 2,39%. Kedalaman Kemiskinan paling tinggi ada di Papua Barat dan terendah ada di Bali. Secara geografis kedalaman kemiskinan terkonsentrasi di Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku dan NTB, NTT dan Sulawesi. Sementara wilayah Indonesia Barat cenderung rendah. Rata-rata perubahan kedalaman kemiskinan menurut provinsi adalah 1,62%. Pertambahan secara nasional 6,9%. Provinsi dengan Kedalaman Kemiskinan tertinggi adalah Papua dan terendah adalah Bali. Konsentrasi Kedalaman Kemiskinan paling besar ada di Papua, Maluku dan NTB. Sementara yang terkecil ada di Bali dan Kalimantan.

Indeks **Keparahan Kemiskinan** per September 2020 paling tinggi terjadi di Pedesaan. Peningkatan Keparahan Kemiskinan paling tinggi per September 2019-2020 di wilayah pedesaan dengan peningkatan sebesar 0.15%. Indeks Keparahan Kemiskinan lebih tinggi di pedesaan jika dibandingkan dengan Keparahan Kemiskinan di Perkotaan. Keparahan Kemiskinan Pedesaan Indonesia per September 2020 adalah 0,68%. Angka rata-rata Keparahan Kemiskinan Pedesaan yakni 0.54% per September 2020. Keparahan Kemiskinan Pedesaan tertinggi di Papua Barat dan terendah di Bali. Keparahan Kemiskinan terkonsentrasi paling tinggi di wilayah timur Indonesia dan paling rendah di wilayah Kalimantan. Angka Keparahan Kemiskinan Perkotaan nasional sebesar 0,31%. Rata-rata Keparahan Kemiskinan Perkotaan nasional adalah 0,27%. Provinsi dengan tingkat Keparahan Kemiskinan Perkotaan tertinggi adalah Sumatera Selatan sebesar 0,72% dan terendah adalah 0.09%. Konsentrasi Keparahan Kemiskinan Perkotaan tertinggi berada di pulau Sumatera, Jawa, NTB dan NTT dan terendah ada di Maluku dan Kalimantan dan sebagian wilayah Sulawesi. Rata-rata Keparahan Kemiskinan gabungan antara perkotaan dan pedesaan adalah 0.44%. Provinsi dengan Keparahan Kemiskinan gabungan paling tinggi adalah Papua Barat sebesar 2.41%, dan terendah Bali 0,12%. Konsentrasi Keparahan Kemiskinan terlihat terkonsentrasi sangat besar di Indonesia Timur kecuali Maluku Utara, dan terendah di Bali dan Kalimantan.

Gini Rasio Perkotaan di Indonesia adalah 0,385. Provinsi Yogyakarta menduduki posisi Gini Rasio Perkotaan di Indonesia sebesar 0,439 dan provinsi terendah adalah Bangka-Belitung sebesar 0.271. Dari data persebaran geografis terlihat bahwa Gini Koefisien tertinggi ada di Jawa, NTB, Bali dan sebagian Sulawesi dan terendah di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTB dan Kalimantan. Gini Rasio Pedesaan di Indonesia adalah 0.319. Gini Rasio tertinggi ada di Papua sebesar 0.416 dan terendah Bangka Belitung 0.229. Ada dua provinsi yang Gini Rasionya di atas 0.4. Konsentrasi Rasio Ketimpangan Pedesaan terlihat sangat besar di Papua, Sulawesi, Jawa, NTB, Bali dan NTT dan terendah ada di Kalimantan Maluku secara keseluruhan dan sebagian wilayah Sumatera. Rasio Ketimpangan gabungan antara pedesaan dan perkotaan secara nasional adalah 0.385. Provinsi dengan rasio ketimpangan tertinggi adalah Yogyakarta sebesar 0.437 dan terendah adalah Bangka Belitung. Konsentrasi ketimpangan paling besar ada di Papua, Jawa, Bali, NTB, NTT dan sebagian besar Sulawesi. Sementara yang terendah ada di Kalimantan, Maluku dan Sumatera.

Sebagai kesimpulan, penduduk Indonesia terkonsentrasi 54% di pulau Jawa, dan di luar Jawa yang paling besar berada di Sumatera Utara. Pertambahan penduduk yang pesat terjadi di pulau Jawa tidak mampu diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja. Ini berimplikasi terhadap tingginya jumlah pengangguran terbuka paling besar ada di Jawa. Sementara untuk angka setengah pengangguran tersebar di luar Jawa. Ini berarti pekerjaan tetap lebih tersedia di pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya. Untuk angka kemiskinan sendiri secara kuantitas terpusat di Jawa, namun demikian secara kedalaman dan Keparahan kemiskinan terkonsentrasi di luar Jawa terutama di Wilayah Indonesia Timur. Keparahan dan kedalaman kemiskinan memiliki kecenderungan lebih parah di pedesaan ketimbang di perkotaan. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan kebijakan khusus untuk wilayah pedesaan seperti membangkitkan perekonomian desa. Ini selaras dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di wilayah-wilayah Indonesia Timur terutama di wilayah kepulauan Papua, NTT, NTB, Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Tengah, serta Kalimantan Barat. Demikian kebijakan mengentaskan Keparahan kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan sebaiknya dipusatkan pada pedesaan di wilayah timur Indonesia, agar tetap sasaran.

PART I

SUMBER DAYA MANUSIA

Background Umum

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menentukan kualitas pembangunan. Sementara pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan bagi individu (*enlarging people choice*). Menurut UNDP (1999)¹, perluasan pilihan tidak hanya meliputi banyaknya pilihan pada barang dan jasa seperti model televisi atau sabun dan produk lainnya, namun juga perluasan terhadap kemampuan manusia yang sangat penting untuk membangun manusia itu sendiri. Kemampuan yang terbatas menciptakan sekat penghalang bagi seorang individu untuk memperoleh pilihan yang jauh lebih beragam. Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang melingkupi banyak unsur seperti keamanan fisik, partisipasi politik, lingkungan berkelanjutan, saling menghormati, keluarga dan lingkungan, kebebasan berbicara, persamaan hukum, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi menggunakan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia. Terdapat tiga dimensi yang dipakai untuk menurunkan indikator pengukuran indeks pembangunan².

1. Dimensi Kesehatan

a. Kondisi Umum

Indikator pertama adalah umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*). Dimensi ini kemudian menurunkan indikator angka harapan hidup saat lahir yang kemudian menjadi Indeks Kesehatan. Berdasarkan data dari BPS (2021) menunjukkan bahwa provinsi dengan umur harapan hidup yang paling rendah adalah Sulawesi Barat dengan rata-rata usia harapan hidup hanya 65 tahun. Ini 6 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan usia harapan hidup nasional yaitu 71 tahun. Setelah itu kemudian disusul oleh Papua, Maluku dan Papua Barat yang

masing-masing 66 tahun, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 67 tahun, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah masing-masing 69 tahun..

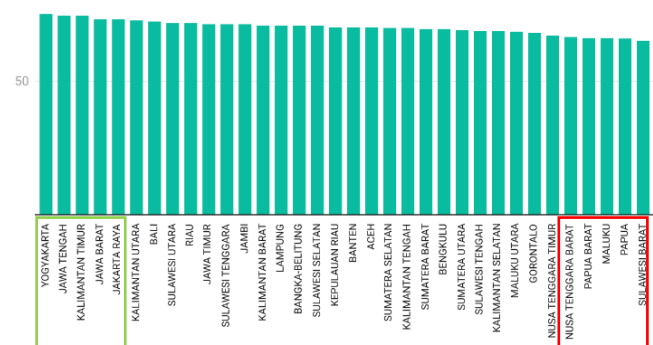
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun) 2020

TERENDAH	2020	TERTINGGI	2020
SULAWESI BARAT	65	D I YOGYAKARTA	75
PAPUA	66	JAWA TENGAH	74
MALUKU	66	KALIMANTAN TIMUR	74
PAPUA BARAT	66	JAWA BARAT	73
NUSA TENGGARA BARAT	67	DKI JAKARTA	73
NUSA TENGGARA TIMUR	67	KALIMANTAN UTARA	73
GORONTALO	68	BALI	72
MALUKU UTARA	68	RIAU	72
KALIMANTAN SELATAN	69	JAWA TIMUR	71
SULAWESI TENGAH	69	SULAWESI TENGGARA	71
INDONESIA	71		

Created with Datawrapper

Table 1: Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (2020)



Created with Datawrapper

Graph 1; Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Data diolah dari BPS, 2020)

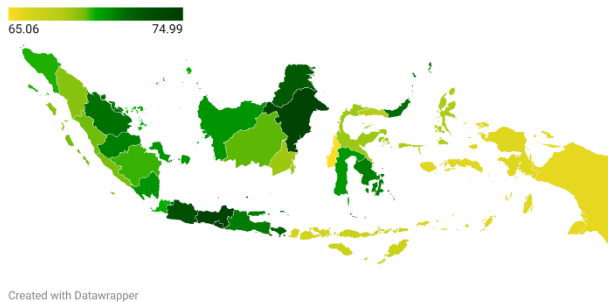
Sementara untuk provinsi dengan angka harapan hidup yang paling tinggi adalah DI Yogyakarta yang mampu mencapai usia rata-rata 75 tahun, 4 tahun lebih tinggi dari usia rata-rata nasional. Kemudian menyusul Jawa Tengah dan Kalimantan Timur yang masing-masing usia harapan hidup 74 tahun. Sementara untuk Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kalimantan Utara masing-masing di

¹ UNDP. (1999). Human Development Report 1999. Oxford University press. Oxford

² https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Booklet-IPM-Metode-Baru.pdf

angka 73 (Untuk data lebih lengkap silakan lihat pada Tabel 1 dan Graph 1 di atas)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (2020)



Map 1: Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Data diolah dari BPS, 2020)³

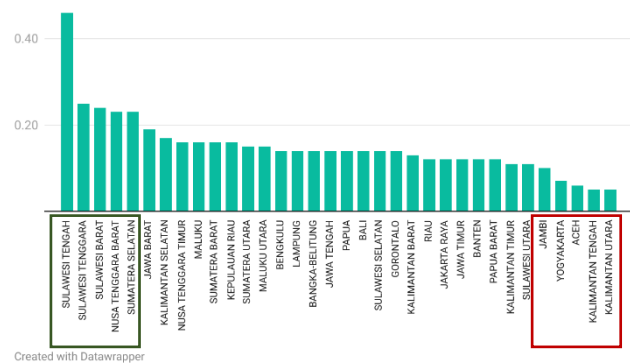
Sementara kalau kita lihat dari Map 1 di atas menunjukkan angka wilayah dengan harapan hidup tinggi berada pada provinsi-provinsi di wilayah barat Indonesia yang memang sudah tersentuh pembangunan ekonomi, terutama di wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali dan sebagian wilayah Sulawesi. Sementara untuk wilayah dengan angka harapan hidup yang rendah berada pada wilayah bagian timur Indonesia yang memang masih membutuhkan upaya-upaya pembangunan yang lebih besar jika dibandingkan dengan Indonesia bagian timur termasuk sebagian NTB, NTT, Maluku, Papua secara keseluruhan dan sebagian wilayah Sulawesi (lihat lebih lanjut pada Map 1) .

Key Points

- Usia harapan hidup nasional yaitu 71 tahun
- Umur harapan hidup tertinggi adalah 74.99 di Yogyakarta, dan terendah Sulawesi Barat yakni 65.06
- Konsentrasi harapan hidup yang rendah ada di Indonesia Timur terutama di Papua, Maluku, NTB dan NTT.
- Usia Harapan Hidup yang tinggi ada di Jawa, Kalimantan dan Sumatera.

b. Perubahan Umur Harapan hidup 2019-2020

Umur Harapan Hidup Saat Lahir -Perubahan -(Tahun) 2020



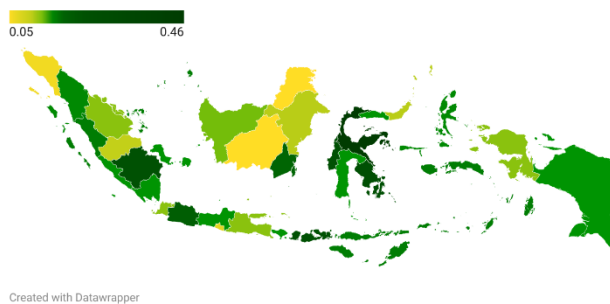
Graph 2: Umur Harapan Hidup Saat Lahir – Perubahan/Tahun- 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁴

Berdasarkan pada data BPS (2020) di atas terlihat bahwa perubahan umur harapan hidup Indonesia naik sekitar 0.13. Secara keseluruhan umur harapan hidup meningkat. Provinsi dengan kenaikan harapan hidup yang sangat signifikan adalah Sulawesi Tengah sebesar 0.46. Ini berarti lebih tinggi 0.33 dibandingkan secara nasional. Setelah itu kemudian menyusul Sulawesi Tenggara sebesar 0.25, Sulawesi Barat 0.24, Nusa Tenggara Barat 0.23 dan Sulawesi Selatan 0.23. Sementara itu, terdapat provinsi dengan perubahan terendah yaitu Kalimantan Utara yang hanya 0.05 atau 0.08 di bawah angka nasional. Setelah itu kemudian menyusul Aceh 0.06, dan Yogyakarta 0.07 dan Jambi 0.1.

Sementara kalau kita lihat dari persebaran data geografis terlihat bahwa konsentrasi perbaikan umur harapan hidup paling besar terjadi di pulau Sulawesi, NTB, NTT, Bali, Jawa, Maluku, Papua dan sebagian besar Sumatera. Sementara untuk wilayah dengan perubahan paling kecil terkonsentrasi di pulau Kalimantan.

³ <https://www.bps.go.id/indikator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html>

Umur Harapan Hidup Saat Lahir – Perubahan- 2019-2020



Map 2: : Umur Harapan Hidup Saat Lahir – Perubahan- 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Key Points

- Perubahan umur harapan hidup Indonesia naik sekitar 0.13 dari 2019-2020
- Provinsi dengan kenaikan harapan hidup yang sangat signifikan adalah Sulawesi Tengah sebesar 0.46 dan terendah Kalimantan Utara 0.05
- Konsentrasi kenaikan umur harapan hidup berada di Sulawesi, Jawa, Papua, Maluku, Bali, NTB, NTT dan sebagian besar wilayah Sumatera dan yang terendah ada di Pulau Kalimantan.

2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi kedua adalah pengetahuan (*knowledge*) yang menurunkan dua indikator termasuk Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator-indikator tersebut kemudian menurunkan indeks pendidikan.

Berdasarkan dari Data BPS (2020), menunjukkan provinsi dengan harapan lama sekolah yang paling tinggi adalah DI Yogyakarta yang 3 tahun lebih tinggi dari angka nasional. Posisi ini kemudian disusul oleh Aceh, Maluku, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu dengan masing-

masing di angka 14. Sementara untuk angka harapan lama sekolah terendah ada di provinsi Papua dengan angka 11. Ini menunjukkan Harapan Lama Sekolah di Papua 2 tahun lebih rendah jika dibandingkan secara nasional. Sementara untuk Kep. Bangka Belitung dan Sumatera Selatan masing-masing di angka 12 (Untuk data lebih lengkap silakan lihat pada Tabel 2 di bawah).

Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2020

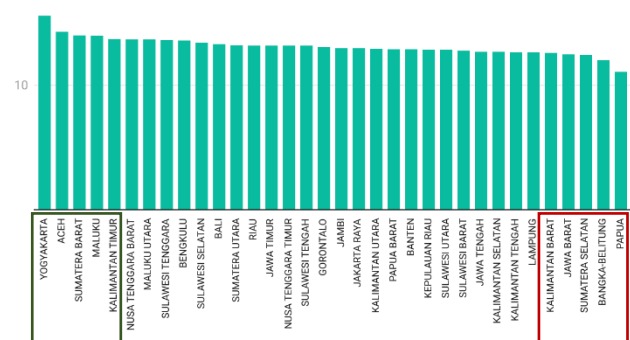
	TERTINGGI	2020	TERENDAH	20201
1	DI YOGYAKARTA	16	PAPUA	11
2	ACEH	14	KEP. BANGKA BELITUNG	12
3	MALUKU	14	SUMATERA SELATAN	12
4	KALIMANTAN TIMUR	14	JAWA BARAT	13
5	NUSA TENGGARA BARAT	14	KALIMANTAN BARAT	13
6	MALUKU UTARA	14	LAMPUNG	13
7	SULAWESI TENGGARA	14	KALIMANTAN TENGAH	13
8	BENGKULU	14	KALIMANTAN SELATAN	13
9	SULAWESI SELATAN	13	JAWA TENGAH	13
10	INDONESIA	13		

Created with Datawrapper

Table 2: Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

a. Harapan Lama Sekolah 2020

Harapan Lama Sekolah - 2020



Graph 3: Harapan Lama Sekolah -2020 (Data diolah dari BPS 2020)⁵

⁵ <https://www.bps.go.id/indikator/26/417/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah.html>

Berdasarkan pada data BPS (2020) sebagaimana terlihat pada *Graph 2* di atas terlihat bahwa Harapan Lama Sekolah di Indonesia adalah 12.98 tahun. Provinsi dengan Harapan Lama sekolah tertinggi adalah Yogyakarta selama 15.59 tahun. Ini berarti lama sekolah di Yogyakarta 2,61 tahun lebih lama dibandingkan dengan angka secara nasional. Kemudian disusul oleh Aceh 14.31, Sumatera Barat 14.02, Maluku 13.96 dan Kalimantan Timur 13.96. Sementara untuk provinsi dengan lama sekolah yang paling rendah adalah Papua sebesar 11.08 tahun, atau 1,9 tahun lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. Setelah itu kemudian disusul oleh Bangka-Belitung 12.05, Sumatera Selatan 12.45, Jawa Barat 12.5 dan Kalimantan Barat 12.6.



Map 3: Harapan Lama Sekolah (Data diolah dari BPS, 2020)⁶

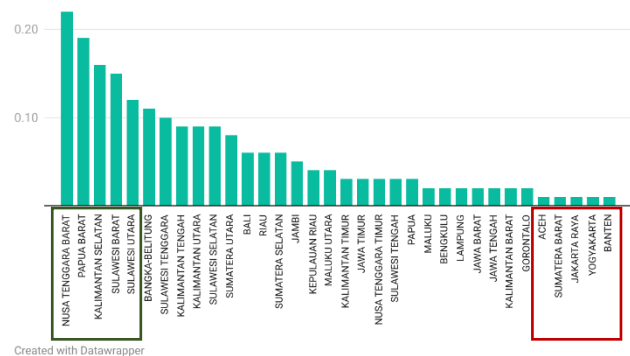
Berdasarkan pada Map 3 di atas menunjukkan bahwa, wilayah persebaran Harapan Lama Sekolah yang paling rendah berada di Papua, sebagian besar wilayah Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Sementara konsentrasi wilayah dengan harapan lama sekolah tertinggi ada di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, dan sebagian besar Sumatera dan Papua Barat (lihat lebih lanjut pada Map 3).

Key Points

- Harapan Lama Sekolah di Indonesia adalah 12.98 tahun
- Provinsi dengan Harapan Lama sekolah tertinggi adalah Yogyakarta selama 15.59 tahun dan terendah Papua 11.08 tahun
- Konsentrasi Harapan Lama Sekolah terendah ada di Papua, sebagian besar pulau Kalimantan dan Jawa. Sementara yang tertinggi ada di Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku secara keseluruhan, Papua Barat dan sebagian besar pulau Sumatera.

b. Perubahan Harapan Lama Sekolah 2019-2020

Harapan Lama Sekolah -Perubahan (2019-2020)



Graph 4: Harapan Lama Sekolah – Perubahan per 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan pada data BPS (2020) pada *Graph 3* di atas terlihat bahwa median perubahan Harapan Lama Sekolah adalah 0.035. Terdapat tujuh provinsi yang mengalami peningkatan secara signifikan di atas 0.1. c sebesar 0.22 (tahun). Ini berarti pertambahan rata-rata Harapan lama Sekolah Nusa Tenggara Barat lebih 0,185. Setelah itu kemudian disusul oleh Papua Barat 0.19, Kalimantan Selatan 0,16, Sulawesi Barat 0,15, Sulawesi Utara 0,12, Bangka-Belitung 0.11 dan Sulawesi

⁶ <https://www.bps.go.id/indikator/26/417/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah.html>

Tenggara 0.1. Sementara kalau kita lihat dari provinsi dengan pertambahan yang cukup rendah adalah Banten, Yogyakarta, Jakarta, Sumatera Barat dan Aceh yang masing-masing sebesar 0.01. Angka ini lebih rendah 0.034 jika dibandingkan dengan angka nasional.

Harapan Lama Sekolah - Perubahan - (2019-2020)



Map 4: Harapan Lama Sekolah – Perubahan per 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sementara kalau kita lihat dari peta persebaran secara geografis pada Map 4, terlihat bahwa Harapan lama sekolah secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terkonsentrasi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB, Maluku dan Bali. Sementara wilayah yang mengalami pertambahan yang cukup rendah ada di Jawa dan sebagian besar Sumatera (Untuk lebih lanjut lihat pada Map 4).

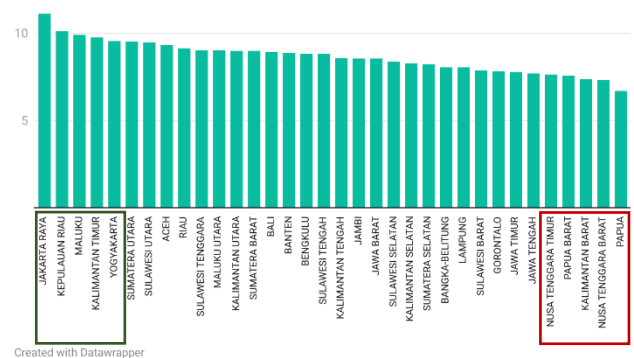
Key Points

- Median perubahan Harapan Lama Sekolah adalah 0.035 dari 2019-2020
- Terdapat tujuh provinsi yang mengalami peningkatan secara signifikan di atas 0.1
- Terdapat tujuh provinsi yang mengalami peningkatan secara signifikan di atas 0.1 dan terendah Banten
- Secara keseluruhan seluruh provinsi mengalami kenaikan. Konsentrasi terbesar hampir diseluruh provinsi kecuali Jawa dan Sumatera.

c. Rata-rata Lama Sekolah 2020

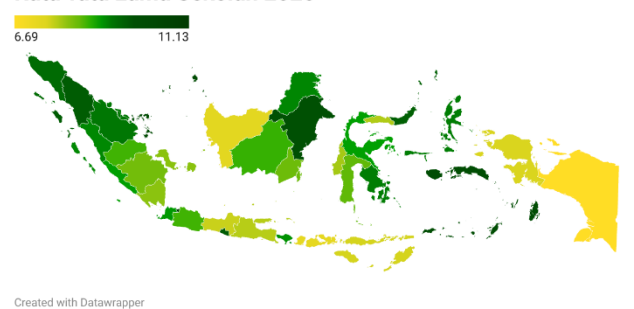
Berdasarkan pada BPS (2020) terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah 8.48 tahun. Dari data tersebut terlihat bahwa DKI Jakarta menduduki posisi paling tinggi di angka 11.13 tahun. Ini menunjukkan rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta 2,65 tahun lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Setelah itu kemudian disusul oleh Kepulauan Riau 10,12 tahun, Maluku 9,93 tahun, Kalimantan Timur 9,77 dan Yogyakarta 9,55 tahun. Tercatat terdapat 12 provinsi yang rata-rata lama sekolahnya di atas 9 tahun (Lihat lebih lanjut pada Graph 5).

Rata-rata Lama Sekolah 2020



Graph 5: Rata-rata Lama Sekolah /Tahun 2020 (Data diolah dari BPS 2020)

Rata-rata Lama Sekolah 2020



Map 5: Map Rata-rata Lama Sekolah (Data diolah dari BPS, 2020)⁷

⁷ <https://www.bps.go.id/indikator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>

Sementara kalau kita lihat dari provinsi yang paling rendah adalah Papua yakni hanya 6,69 tahun, setelah itu kemudian disusul oleh Nusa Tenggara Barat 7.31, Kalimantan Barat 7.37, Papua Barat 7,6 dan Nusa Tenggara Timur 7,63.

Sementara kalau kita lihat dari peta persebaran geografis sebagaimana terlihat pada Map 5. Terlihat bahwa konsentrasi rata-rata lama sekolah tertinggi ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Maluku dan Maluku Utara. Sementara untuk wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang rendah ada di wilayah Papua, Jawa, NTB dan NTT. (Untuk data lebih lanjut silakan lihat pada Graph 4, Map 5 dan Table 3).

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2020

	TERTINGGI	2020	TERENDAH	20201
1	DKI JAKARTA	11	PAPUA	7
2	KEPULAUAN RIAU	10	NUSA TENGGARA BARAT	7
3	MALUKU	10	KALIMANTAN BARAT	7
4	KALIMANTAN TIMUR	10	PAPUA BARAT	8
5	D I YOGYAKARTA	10	NUSA TENGGARA TIMUR	8
6	SUMATERA UTARA	10	JAWA TENGAH	8
7	SULAWESI UTARA	9	JAWA TIMUR	8
8	ACEH	9	GORONTALO	8
9	RIAU	9	SULAWESI BARAT	8
10	SULAWESI TENGGARA	9	LAMPUNG	8
11	INDONESIA	8		

Created with Datawrapper

Table 3: Rata-rata Lama Sekolah (Data diolah dari BPS 2020)⁸

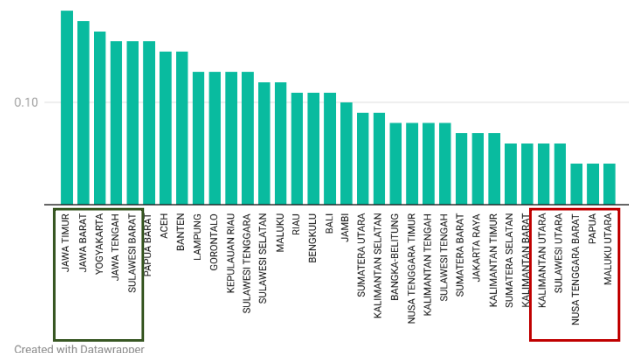
Key Points

- Rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah 8.48 tahun
- DKI Jakarta menduduki posisi paling tinggi di angka 11.13 tahun dan terendah adalah Papua 6,69 tahun
- Konsentrasi Rata-rata lama sekolah tertinggi ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Maluku dan Maluku Utara dan terendah ada

di wilayah Papua, Jawa, NTB dan NTT.

d. Perubahan Rata-rata Lama Sekolah 2019-2020

Rata-rata Lama Sekolah -Perubahan - 2019-2020

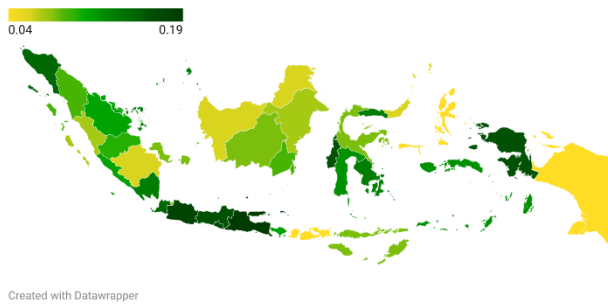


Graph 6: Rata-rata Lama Sekolah – Perubahan – 2019-2020 (Data diolah dari BPS 2020)

Berdasarkan pada Graph 5 di atas terlihat bahwa rata-rata perubahan rata-rata lama sekolah secara nasional sebesar 0.105. Provinsi dengan perubahan paling tinggi adalah Jawa Timur sebesar 0.19, setelah itu kemudian disusul oleh Jawa Barat 0.19, Yogyakarta 0.17, Jawa Tengah, Sulawesi Barat dan Papua Barat masing-masing 0.16. Terdapat 18 provinsi yang perubahannya di atas 0.1. Sementara kalau kita lihat provinsi yang perubahannya paling rendah ada di Maluku Utara, Papua dan Nusa Tenggara Barat yang masing-masing 0.04. Terdapat 16 provinsi yang pertambahannya berada di bawah 0.1 tahun.

⁸ <https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>

Rata-rata Lama Sekolah - Perubahan - 2019-2020



Map 6: Rata-rata Lama Sekolah – Perubahan – 2019-2020(Data diolah dari BPS 2020)

Sementara kalau kita lihat dari Map 6 di atas terlihat bahwa konsentrasi perubahan rata-rata lama sekolah tertinggi ada di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua barat, Bali, dan NTT. Sementara wilayah yang pertambahannya rendah berada di Papua, NTB, Maluku Utara, sebagian besar pulau Kalimantan dan sebagian kecil pulau Sumatera.

Key Points

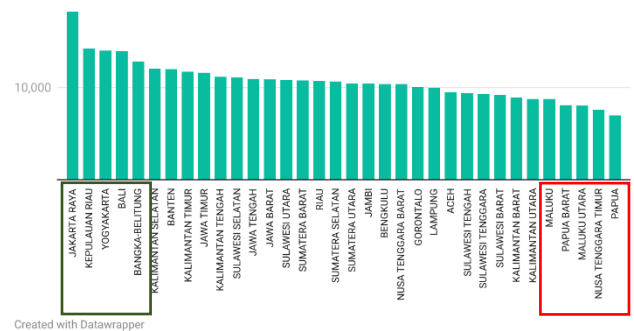
- Rata-rata perubahan rata-rata lama sekolah secara nasional sebesar 0.105
- Provinsi dengan perubahan paling tinggi adalah Jawa Timur sebesar 0.19 dan terendah Maluku Utara 0.04
- Konsentrasi perubahan rata-rata lama sekolah tertinggi ada di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua barat, Bali, dan NTT dan terendah di Papua, NTB, Maluku Utara, sebagian besar pulau Kalimantan dan sebagian kecil pulau Sumatera.

3. Dimensi Standar Hidup Layak

Ketiga adalah Standar Hidup Layak (*decent standard of living*) yang memiliki satu indikator yaitu Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan yang membentuk Indeks Pengeluaran. Ketiga indeks tersebut membentuk indeks pembangunan manusia.

a. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2020



Graph 7: Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2020 (Data diolah dari BPS 2020)

Berdasarkan data dari BPS (2020) mengenai Pengeluaran per Kapita disesuaikan pada tahun lalu menunjukkan besaran pengeluaran per kapita Indonesia adalah Rp11013. Dimana DKI Jakarta menduduki posisi paling tinggi sebagai provinsi dengan pengeluaran lebih tinggi secara nasional, dengan rata-rata pengeluaran Rp18,227. Jumlah pengeluaran tersebut lebih tinggi sebesar Rp7,214 jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. DI Yogyakarta dan Bali menyusul sebagai provinsi dengan pengeluaran terbesar per kapita di tahun 2020. Sementara untuk provinsi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan paling rendah adalah Papua sebesar Rp4,059 atau 58% lebih rendah dari angka rata-rata pengeluaran nasional. Disusul oleh Nusa Tenggara Timur sebesar Rp7,598 dengan selisih sebesar Rp3,415 atau 45% lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita

nasional.

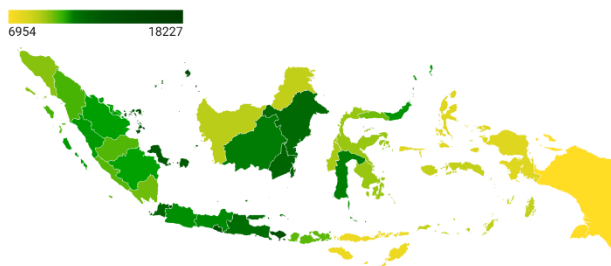
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) 2020

	TERTINGGI	2020	TERENDAH	
1	DKI JAKARTA	18,227	PAPUA	6,954
2	D I YOGYAKARTA	14,015	NUSA TENGGARA TIMUR	7,598
3	BALI	13,929	MALUKU UTARA	8,032
4	KEP. BANGKA BELITUNG	12,794	PAPUA BARAT	8,086
5	KALIMANTAN SELATAN	12,032	MALUKU	8,732
6	BANTEN	11,964	KALIMANTAN UTARA	8,756
7	KALIMANTAN TIMUR	11,728	KALIMANTAN BARAT	8,930
8	JAWA TIMUR	11,601	SULAWESI BARAT	9,168
9	KALIMANTAN TENGAH	11,154	SULAWESI TENGGARA	9,331
10	SULAWESI SELATAN	11,079	SULAWESI TENGAH	9,335
11	INDONESIA	11,013		

Created with Datawrapper

Table 4: Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2020



Created with Datawrapper

Map 7: Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2020 Data diolah dari BPS 2020)⁹

Sementara untuk data persebaran dan konsentrasi standar hidup yang paling rendah terlihat jelas pada terkonsentrasi di wilayah bagian Indonesia timur terutama di wilayah Papua, Sulawesi dan Nusa Tenggara dan beberapa wilayah di Kalimantan. Untuk wilayah dengan standar hidup yang sudah cukup bagus terpusat di wilayah Jawa dan wilayah Kalimantan Tengah dan Selatan. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan ekonomi masih terpusat hanya di beberapa

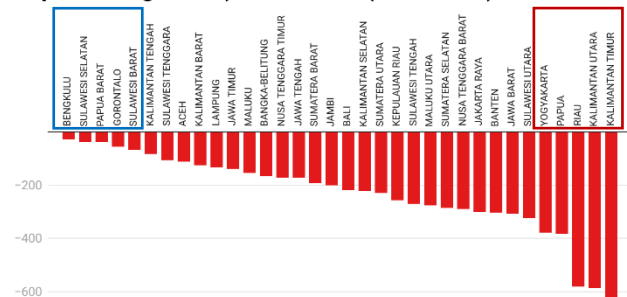
wilayah di Indonesia. Ini juga mengindikasikan adanya ketimpangan antar wilayah dan provinsi yang bisa menjadi acuan ke depan untuk para pengambil kebijakan untuk mengambil langkah yang tepat untuk peningkatan standar hidup yang layak di wilayah- wilayah tersebut.

Key Points

- Pengeluaran per Kapita disesuaikan pada tahun lalu menunjukkan besaran pengeluaran per kapita Indonesia adalah Rp11013
- Provinsi dengan Pengeluaran per Kapita tertinggi adalah Jakarta Rp18227 dan terendah Papua Rp6954
- Data persebaran secara geografis terlihat Pengeluaran per Kapita tertinggi terendah terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur termasuk Papua, Maluku, Maluku Utara, NTB dan sebagian Sulawesi. Sementara yang tertinggi ada di Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

b. Perubahan Pengeluaran per Kapita (2019-2020)

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)-Perubahan- (2019-2020)



Created with Datawrapper

Graph 8: Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)-Perubahan- (2019-2020) (Data diolah dari BPS 2020)

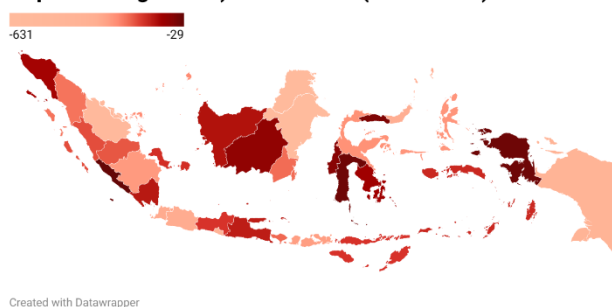
Berdasarkan data BPS (2020)¹⁰ di atas terlihat bahwa terdapat penurunan pengeluaran secara keseluruhan antara

⁹ <https://www.bps.go.id/indicator/26/416/1/-metode-baru-pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>

¹⁰ <https://www.bps.go.id/indicator/26/416/1/-metode-baru-pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>

tahun 2019-2020. Terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan pengeluaran per kapita sangat signifikan yaitu Kalimantan Timur sebesar Rp631 ribu. Angka ini cukup jauh dari rata-rata pengeluaran nasional sebesar Rp219 ribu. Setelah itu kemudian menyusul Kalimantan Utara Rp587 ribu, Riau Rp580 ribu, Papua Rp382 ribu dan Yogyakarta Rp-379 ribu. Sementara provinsi yang mengalami penurunan paling rendah adalah Bengkulu Rp29 ribu, atau Rp190 lebih rendah dari rata-rata perubahan pengeluaran per Kapita secara nasional. Setelah itu kemudian menyusul Papua Barat dan Sulawesi Selatan Rp39 ribu, Gorontalo Rp55ribu dan Kalimantan Tengah Rp82ribu (Untuk lebih lengkap lihat pada Graph 8).

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)-Perubahan- (2019-2020)



Map 8: Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)-Perubahan- (2019-2020) (Data diolah dari BPS 2020)

Sementara kalau kita lihat dari persebaran data geografis terlihat bahwa perubahan pengeluaran per Kapita dari tahun 2019-2020 terlihat mengalami perubahan paling besar dan terkonsentrasi secara acak di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Perubahan tersebut terlihat terkonsentrasi sebagian besar di pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTB, Maluku, Papua Barat dan sebagian kecil pulau Sumatera. Sementara kalau kita lihat berdasarkan perubahan data geografis terlihat bahwa pulau yang mengalami perubahan yang relatif cukup kecil ada di Papua, Maluku Utara, sebagian besar pulau

Sumatera, dan sebagian kecil pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan serta NTT (Untuk lebih lanjut silakan lihat pada Map 8) .

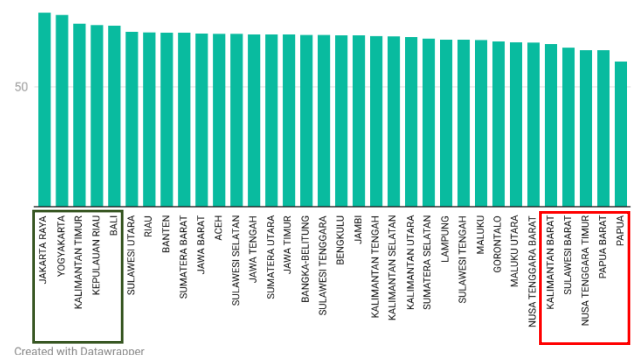
Key Points

- Terdapat penurunan pengeluaran secara keseluruhan antara tahun 2019-2020
- Provinsi yang mengalami penurunan paling signifikan adalah Kalimantan Timur Rp631 ribu, dan terendah Rp29 ribu
- Rata-rata pengeluaran nasional adalah Rp219ribu
- Secara geografis perubahan pengeluaran per Kapita terkonsentrasi secara acak di seluruh kepulauan di Indonesia

4. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi

a. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2020

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2020



Graph 9: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2020 (Data diolah dari BPS 2020)

Indeks Pembangunan Manusia (Tahun) 2020

TERENDAH		TERTINGGI		
1	PAPUA	60	DKI JAKARTA	81
2	PAPUA BARAT	65	DI YOGYAKARTA	80
3	NUSA TENGGARA TIMUR	65	KALIMANTAN TIMUR	76
4	SULAWESI BARAT	66	KEP. RIAU	76
5	KALIMANTAN BARAT	68	BALI	76
6	NUSA TENGGARA BARAT	68	SULAWESI UTARA	73
7	MALUKU UTARA	68	RIAU	73
8	GORONTALO	69	BANTEN	72
9	MALUKU	69	SUMATERA BARAT	72
10	SULAWESI TENGAH	70	JAWA BARAT	72
11	INDONESIA	72		

Created with Datawrapper

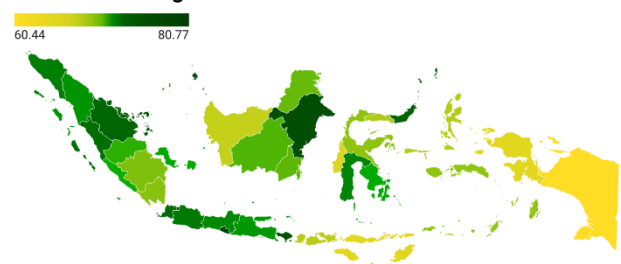
Table 5: Indeks Pembangunan Manusia (Tahun) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Menurut data BPS (2020) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) adalah 71.94. Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi adalah Jakarta dengan IPM 80.77. Ini berarti IPM Jakarta 8.83 poin lebih tinggi dari IPM Indonesia. Jakarta memang memiliki fasilitas pendidikan terbaik di Indonesia dan sekaligus memiliki sumber daya manusia yang menjadi tenaga didik terbaik. Jadi posisi IPM Jakarta adalah sesuatu hal yang lumrah. Setelah itu kemudian menyusul Yogyakarta dengan IPM 79.97. Yogyakarta terkenal memiliki salah satu universitas terbaik di Indonesia yaitu Universitas Gajah Mada. Setelah itu kemudian menyusul Kalimantan Timur 76.24, Kepulauan Riau 75.59, dan Bali 75.5. Sementara kalau kita lihat dari provinsi dengan IPM terendah adalah Papua sebesar 60.44. Ini berarti IPM Papua 11.5 poin lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM nasional. Setelah itu kemudian menyusul Papua Barat dengan IPM 65.09, Nusa Tenggara Timur 65.19, Sulawesi Barat 66.11, dan Kalimantan Barat 67.66 (Untuk lebih lanjut lihat pada Graph 9).

Sementara kalau kita lihat dari data persebaran geografis terlihat bahwa konsentrasi persebaran IPM rendah berada paling tinggi di Indonesia Timur. Terutama di wilayah Papua, NTT, NTB, Maluku secara keseluruhan, sebagian wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Sementara kalau kita lihat untuk wilayah dengan konsentrasi IPM tertinggi ada di Bali, Jawa, Sumatera dan sebagian besar Kalimantan dan sebagian kecil Sulawesi (Untuk lebih lanjut silakan lihat pada Map 9 di atas).

Berdasarkan dari ketiga dimensi yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, menunjukkan daerah-daerah yang memiliki kualitas pada dimensi kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak juga akan terefleksi pada indeks pembangunan manusia. Data menunjukkan wilayah seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur yang menduduki posisi indeks pembangunan manusia yang tinggi. Indeks pembangunan manusia DKI Jakarta pada tahun 2019 dan 2020 menduduki posisi tertinggi di Indonesia dengan indeks 81. Disusul kemudian oleh DI Yogyakarta 80 dan Kalimantan Timur 76 (Lihat lebih lanjut pada Table 5).

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2020



Created with Datawrapper

Map 9: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2020 (Data diolah dari BPS 2020)¹¹

¹¹ <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>

Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2019-2020

-0.52 80.77

2019		2020		Perubahan	
DKI JAKARTA	81	DKI JAKARTA	81	KALIMANTAN UTARA	-1
DI YOGYAKARTA	80	DI YOGYAKARTA	80	PAPUA	-0
KALIMANTAN TIMUR	77	KALIMANTAN TIMUR	76	KALIMANTAN TIMUR	-0
KEP. RIAU	75	KEP. RIAU	76	RIAU	-0
BALI	75	BALI	76	MALUKU UTARA	-0
RIAU	73	SULAWESI UTARA	73	SULAWESI UTARA	-0
SULAWESI UTARA	73	RIAU	73	NUSA TENGGARA TIMUR	-0
BANTEN	72	BANTEN	72	DI YOGYAKARTA	-0
SUMATERA BARAT	72	SUMATERA BARAT	72	SUMATERA BARAT	-0
JAWA BARAT	72	JAWA BARAT	72	SUMATERA SELATAN	-0
INDONESIA	72	INDONESIA	72	INDONESIA	0

Created with Datawrapper

Table 6: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)¹²

Sementara untuk wilayah yang dengan indeks pembangunan terendah berada pada wilayah timur Indonesia terutama di wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara Gorontalo, Maluku dan Sulawesi Tengah yang masih jauh dari indeks pembangunan nasional. Ini membutuhkan pendekatan dan usaha yang lebih tepat dari pemerintah (Lihat lebih lanjut pada Tabel 6, Data diolah dari BPS 2020)

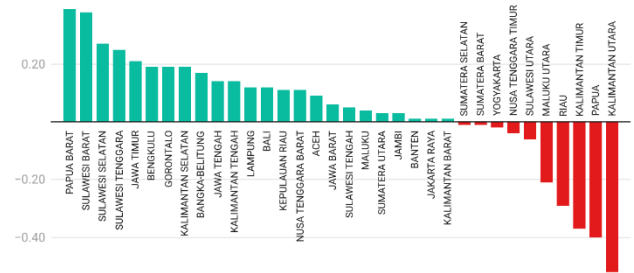
Key Points

- Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) adalah 71.94
- IPM tertinggi di duduki oleh DKI Jakarta 80.77 dan terendah 60.44
- Konsentrasi IPM rendah berada di wilayah Indonesia Timur terutama di Pulau Papua, NTT, NTB, dan Maluku. Terendah terkonsentrasi di

Indonesia bagian barat termasuk Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

a. Perubahan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2020

Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi-Perubahan -(2019-2020)



Created with Datawrapper

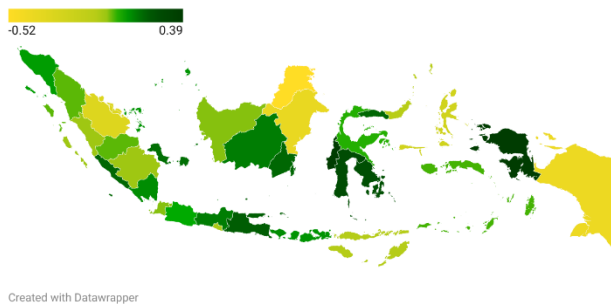
Graph 10: Perubahan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2020

Berdasarkan pada data BPS (2020) pada Graph 10 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa provinsi yang mengalami perubahan IPM, baik itu membaik dan memburuk dari tahun 2019-2020. Median perubahan IPM 2019 -2020 adalah 0.02.

Terdapat 24 provinsi mengalami perbaikan IPM dan 10 provinsi yang memburuk. Provinsi yang mengalami perbaikan lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi lainnya adalah Papua Barat 0.39. Kemudian di susul oleh Sulawesi Barat 0.38, Sulawesi Selatan 0.27, Sulawesi Tenggara 0.25 dan Jawa Timur 0.21. Sementara provinsi yang mengalami penurunan paling signifikan dari 2019-2020 adalah Kalimantan Utara sebesar 0.52, Papua 0.4, Kalimantan Timur 0.37, Riau 0.29 dan Maluku Utara 0.21 dan Sulawesi Utara 0.06 (Untuk lebih lanjut lihat pada Graph 10).

¹² <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>

Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi- Perubahan -(2019-2020)



Map 10: Perubahan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2020

Sementara kalau kita lihat dari data persebaran geografis maka terlihat pada wilayah yang mengalami perubahan IPM paling kecil (rendah) terkonsentrasi secara acak di wilayah Papua, Maluku, NTT, sebagian Kalimantan dan sebagian kecil pulau Sumatera. Sementara wilayah dengan perubahan IPM yang cenderung membaik ada di Papua Barat, Bali, NTB, Sulawesi, Jawa, dan sebagian besar ada di Sumatera dan Kalimantan.

Key Points

- Median perubahan IPM 2019 -2020 adalah 0.02
- Terdapat 24 provinsi mengalami perbaikan IPM dan 10 provinsi yang memburuk
- Perubahan IPM tertinggi (membaik) adalah Papua Barat 0.39 dan terendah (memburuk) Kalimantan Utara 0.52
- IPM paling kecil (rendah) terkonsentrasi secara acak di wilayah Papua, Maluku, NTT, sebagian Kalimantan dan sebagian kecil pulau Sumatera. Wilayah yang cenderung membaik ada di Papua Barat, Bali, NTB, Sulawesi, Jawa, dan sebagian besar ada di Sumatera dan Kalimantan.

PART II

PENGANGGURAN DAN TENAGA KERJA

B. Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang saling bergandengan. Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi 5-6%, namun belum mampu terlepas dari kedua masalah ini. Sementara itu, jumlah angkatan kerja semakin tahun semakin bertambah.

Terdapat dua konsep yang dipakai untuk memahami kondisi pengangguran di Indonesia yaitu Pengangguran Terbuka dan Pekerja Tidak Penuh. Pengangguran Terbuka menurut BPS (2021)¹³ dikategorikan dalam empat kategori utama yaitu:

- a) “Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.”

Sedangkan untuk Pekerja Tidak Penuh adalah individu/pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu (BPS. 2021)¹⁴. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua yaitu Setengah Penganggur dan Pekerja Paruh Waktu. BPS (2021)¹⁵ mendefinisikan Setengah Penganggur adalah “mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa)”. Sementara untuk Pekerja Paruh Waktu didefinisikan sebagai “mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari

pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela)”.

Pada Agustus 2020 jumlah angkatan kerja naik 2,36 juta dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya¹⁶. Jadi secara keseluruhan terdapat 138,22 juta angkatan kerja pada tahun 2020. Selain itu tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik 0,24 persen poin pada tahun yang sama. Sementara untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2020 juga naik 7.07 persen dibandingkan dengan Agustus 2019.

Terdapat penurunan penduduk yang bekerja sebesar 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Dengan demikian terdapat 128,45 juta orang yang bekerja pada tahun 2020. Dari penurunan tersebut, sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan paling besar yaitu 1,30 persen poin. Sementara sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen poin.

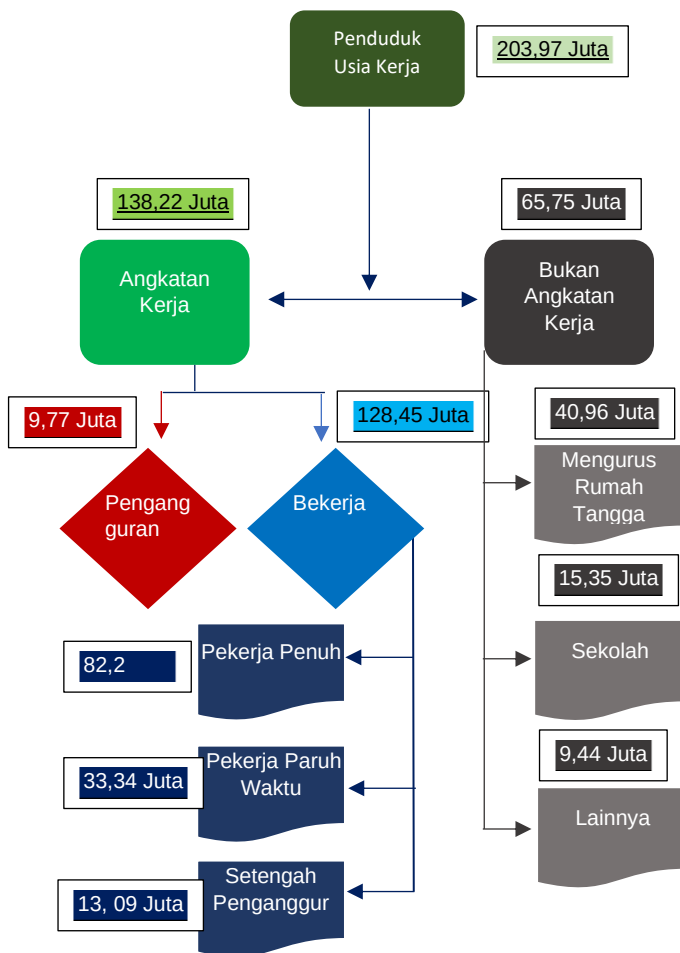
¹³ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

¹⁴ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

¹⁵ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat->

¹⁶ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

1. Struktur Tenaga Kerja (2020)



Structure 1: Struktur Tenaga Kerja Indonesia (Data diolah dan diadaptasi dari BPS, 2020)¹⁷

Gambaran secara singkat struktur tenaga kerja di Indonesia sebagaimana terlihat pada Struktur 1 bagian atas berdasarkan data tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 203,97 juta. Ini berarti proporsi usia tenaga kerja di Indonesia cukup besar.

a. Bukan Angkatan Kerja

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 269,6 juta orang, maka 75,65% berada pada usia kerja. Namun demikian kalau kita telisik lebih jauh data dari BPS (2020) terlihat bahwa hanya

138, 22 juta yang tergolong Angkatan Kerja, sedangkan 65,75 juta bukan Angkatan Kerja. Ini berarti 32,2% dari penduduk usia kerja tidak masuk pada Angkatan Kerja. Proporsi cukup besar mengingat proporsi penduduk usia kerja yang masuk angkatan kerja Cuma di sekitar 67,8%.

Kalau dilihat lebih rinci lagi maka pembagian dari Bukan Angkatan Kerja dibagi menjadi tiga bagian yaitu mengurus rumah tangga dengan proporsi 40,96 juta orang. Ini berarti 62% dari penduduk yang Bukan Angkatan Kerja bekerja untuk mengurus rumah tangga. Sementara penduduk usia kerja lainnya 15,35 juta masih sekolah, dan 9,44 melakukan aktivitas lain.

b. Angkatan Kerja

Sedangkan kalau kita lihat dari angkatan kerja berdasarkan data BPS (2020) terdapat 138,22 juta orang masuk dalam kategori Angkatan Kerja. Dari 138 juta tersebut 128,45 juta bekerja atau setara dengan 93% dari keseluruhan Angkatan Kerja. Sementara sisanya atau 7% atau 9,77 juta lainnya menganggur. Kalau dilihat lebih jauh Angkatan Kerja yang bekerja dibagi menjadi tiga, yaitu Pekerja Penuh sebanyak 82,2 juta. Ini berarti 64% dari penduduk yang bekerja mendapatkan pekerjaan *fulltime* (penuh). 33,34 juta lainnya atau 26% bekerja *part time job* (Pekerja paruh waktu), dan 13,09 juta sisanya bekerja setengah penganggur.

Key Points

- 75,65% penduduk usia kerja masuk Angkatan Kerja atau setara dengan 138, 22 juta.
- 24,35% sisanya masuk Bukan Angkatan Kerja.
- 62% dari Bukan Angkatan Kerja bekerja mengurus rumah tangga.

¹⁷<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDhiOWE3NWNiODI2ZGRhZmJkZGI5NjU3&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjAvMTIvMjMvZDhiOWE3NWNiODI2ZGRhZ>

mJkZGI5NjU3L2Jvb2tsZXQtc3VydMVPWLFuZ2thdGFuLWtlcmphLW5hc2lvbmFsLWFndXN0dXMtMjAyMC5odG1s&twoadfnarfeauf=MjAyMS0wNCOwOAXmZoxNT0zMg%3D%3D

- Dari 138,22 juta orang Angkatan Kerja, 128,45 juta bekerja dan 9,77 juta menganggur.

2. Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

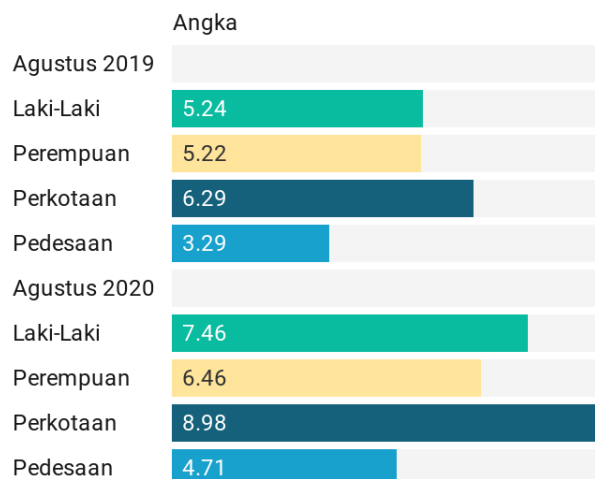


Figure 1: Tingkat Pengangguran Terbuka (Data diolah dari BPS, 2020)¹⁸

Terdapat 77,68 juta orang atau 60,47 persen orang yang bekerja pada kegiatan informal, naik 4,59 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2019. Sementara untuk persentase pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau pekerja setengah penganggur naik 3,77 persen poin dan 3,42 persen poin untuk pekerja paruh waktu. Data per Agustus 2020 juga menunjukkan terdapat 29,12 juta orang yang setara dengan 14,28 persen dari penduduk usia kerja yang terdampak oleh Covid-19. 2,56 juta orang terpaksa menganggur karena Covid-19. 0,76 juta orang yang Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau penduduk yang usia produksi di atas 15 tahun baik yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan atau melakukan kegiatan lainnya yang terdampak oleh Covid-19. Sementara yang tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang). 24,03 juta orang penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Secara total terdapat

29,12 juta orang atau 14,28 persen penduduk yang masuk usia kerja terdampak oleh Covid-19. Dari angka tersebut, 2,56 juta yang menganggur karena Covid-19.

a. Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja

Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Agustus 2020

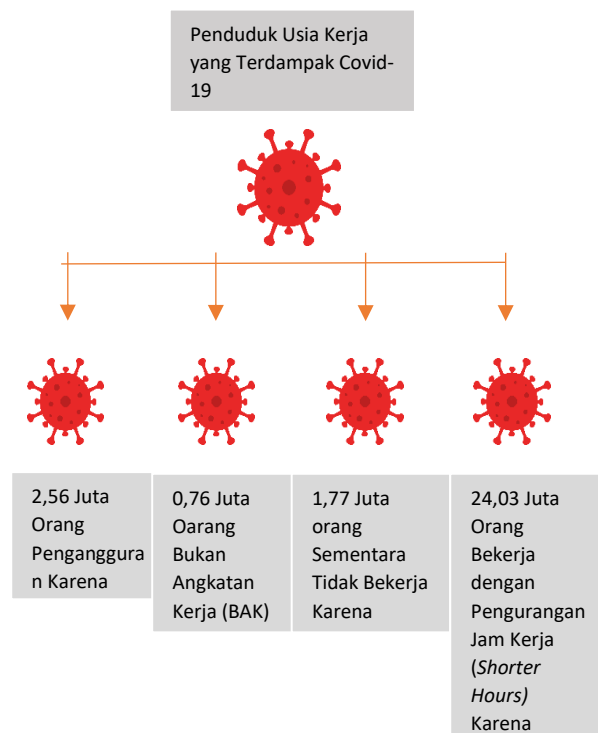


Figure 2: Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)¹⁹

Key Points:

- **Tingkat Pengangguran Terbuka Naik.** Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07%. Terjadi kenaikan sebesar 1,84% poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,23%.
- **Persentase Pekerja Setengah Penganggur Naik.** Pada Agustus 2020, Persentase Pengangguran sebesar 10,19 persen. Terjadi kenaikan sebesar 3,77 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar 6,42 persen

¹⁸ <https://www.bps.go.id/indicator/6/1179/1/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>

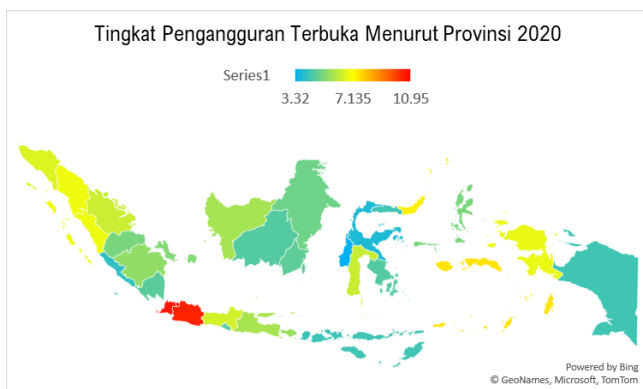
¹⁹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020

	2019		2020		Peningkatan	
1	Banten	8	DKI Jakarta	11	DKI Jakarta	4
2	Jawa Barat	8	Banten	11	Bali	4
3	Kep. Riau	8	Jawa Barat	10	Kep. Riau	3
4	Maluku	7	Kep Riau	10	Banten	3
5	DKI Jakarta	7	Maluku	8	Jawa Barat	2
6	Papua Barat	6	Sulawesi Utara	7	Jawa Tengah	2
7	Aceh	6	Sumatera Utara	7	Jawa Timur	2
8	Sulawesi Utara	6	Sumatera Barat	7	Sulawesi Selatan	2
9	Kalimantan Timur	6	Kalimantan Timur	7	Kep. Bangka Belitung	2
10	Kep. Riau	6	Papua Barat	7	Sumatera Utara	2
11	Indonesia	5	Indonesia	7	Indonesia	2

Created with Datawrapper

Table 7: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), Agustus 2019-2020. (Data diolah dari BPS, 2020)²⁰



Map 11: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen) 2019-2020 (Data diolah dari BPS 2020)²¹

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka terjadi peningkatan yang sangat signifikan terutama di provinsi DKI Jakarta dan Bali. Wilayah ini didominasi oleh sektor industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, konstruksi, jasa

keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi serta jasa perusahaan dengan total PRDB atas harga berlaku mencapai Rp1906816976 juta atau setara dengan 69% dari total PDRB Jakarta di tahun 2020²². Sementara untuk PDRB provinsi Bali di dominasi oleh sektor penyedia akomodasi makan minuman; pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan total kontribusi sebesar Rp119108133.6 juta atas dasar harga berlaku di tahun 2020. Ini setara dengan 53% dari total kontribusi PDRB Bali²³. Dengan demikian pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berhubungan erat dengan pemulihan dari segi sektor tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi 2020

0 10.95

TERTINGGI			TERENDAH		
1	DKI JAKARTA	11	SULAWESI BARAT		3
2	BANTEN	11	SULAWESI TENGAH		4
3	JAWA BARAT	10	BENGKULU		4
4	KEP. RIAU	10	NUSA TENGGARA BARAT		4
5	MALUKU	8	NUSA TENGGARA TIMUR		4
6	SULAWESI UTARA	7	GORONTALO		4
7	SUMATERA UTARA	7	PAPUA		4
8	SUMATERA BARAT	7	DI YOGYAKARTA		5
9	KALIMANTAN TIMUR	7	KALIMANTAN TENGAH		5
10	PAPUA BARAT	7	SULAWESI TENGGARA		5
11	INDONESIA	7			

Created with Datawrapper

Table 8: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi 2020 (Data diolah dari BPS 2020)²⁴

Untuk tingkat pengangguran terbuka paling tinggi pada tahun 2020 dengan posisi teratas adalah DKI Jakarta dan Banten yang masing-masing 11%. Disusul oleh Jawa Barat dan Kep. Riau masing-masing 10% (Lihat lebih lanjut pada Tabel 8, BPS 2020).

²⁰ <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>

²¹ <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>

²² <https://jakarta.bps.go.id/indicator/52/55/1/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-.html>

²³ <https://bali.bps.go.id/indicator/52/140/1/pdrb-triwulanan-provinsi-bali-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>

²⁴ <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>

Sementara untuk wilayah dengan pengangguran terbuka dengan peringkat paling rendah sebesar 3% diduduki oleh Sulawesi Barat, kemudian disusul oleh Sulawesi Tengah, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Papua yang masing-masing sebesar 4%. Kalau dilihat dari persebaran jumlah tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan terlihat bahwa wilayah Jawa mendapatkan konsentrasi jumlah pengangguran yang lumayan besar. Jumlah penduduk yang lebih besar turut mempengaruhi jumlah pengangguran yang memang relatif besar di Jawa. Setelah itu disusul oleh wilayah Sumatera dan sebagian kecil di wilayah Indonesia timur (Untuk lebih lanjut lihat pada Tabel 7). Ini mengindikasikan harus ada langkah yang tepat untuk mengatasi tingkat penambahan pengangguran terbuka di wilayah-wilayah tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2019-2020

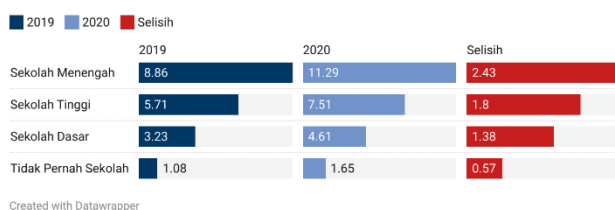


Figure 3: Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2019-2020 (Data diolah dari BPS 2020)²⁵

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Orang), 2019-2020

		2019	2020	Selisih
1	SLTA Umum/SMU	2008035	2,662,444	654,409
2	SLTA Kejuruan/SMK	1739625	2,326,599	586,974
3	SLTP	1137195	1,621,518	484,323
4	SD	865778	1,410,537	544,759
5	Universitas	746354	981,203	234,849
6	Tidak/belum tamat SD	347712	428,813	81,101
7	Akademi/Diploma	218954	305,261	86,307
8	Tidak/belum pernah sekolah	40771	31,379	-9,392
9	Total	7104424	9,767,754	2,663,330

Created with Datawrapper

Table 9: Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (orang) Agustus 2019-Agustus 2020 (BPS, 2020)²⁶

Ditilik dari data Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan tingkat pendidikan terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka di tingkat pendidikan Sekolah menengah sebesar 2.43% 2019-2020, kemudian disusul oleh Sekolah Tinggi. Ini menempatkan tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh Sekolah Menengah dan Sekolah Tinggi, kemudian Sekolah dasar dan disusul oleh Tidak Pernah Sekolah. Potensi kenaikan angka pengangguran terbuka di Angkatan kerja Sekolah Menengah dan Sekolah Tinggi dipengaruhi oleh menurunkan kinerja sektor-sektor jasa karena kebanyakan dari pekerja ini bekerja di sektor tersebut. Oleh karena itu pemulihan sektor tersebut membutuhkan perhatian lebih seksama oleh pemerintah. Ini juga berkorelasi dengan wilayah-wilayah dengan jumlah pengangguran terbuka yang relatif besar seperti di Jawa, Bali, sebagian wilayah Sumatera dan juga sebagian kecil di wilayah Indonesia timur. Sementara untuk Tidak Pernah Sekolah naik tipis sebesar 0.57% antara tahun 2019-2020. Ini mengindikasikan sektor yang tidak membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang tinggi tidak terlalu terdampak dari pandemi Covid19.

²⁵ <https://www.bps.go.id/indikator/6/1179/1/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>

²⁶ <https://www.bps.go.id/indikator/6/674/1/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan.html>

Sementara untuk Pengangguran Terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di dominasi oleh lulusan SLTA Umum/SMU sebesar 2,6 juta orang. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019-2020 sebesar 654 ribu orang untuk lulusan SLTA UMUM. Angka ini kemudian disusul oleh SLTA Kejuruan/SMK sebesar 2,3 juta orang, naik sekitar 586 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2019 ke Agustus 2020. Setelah itu kemudian posisi ketiga didominasi oleh pengangguran lulusan SLTP sebanyak 1,62 juta orang atau naik sekitar 484 ribu orang.

Peningkatan ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang lulusan SD yang meningkat sebanyak 544 ribu orang. Ini secara jelas menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan rendah atau dengan keterampilan rendah. Terbukti 87% pengangguran di Indonesia adalah orang dengan pendidikan rendah (SLTA ke bawah).

Key Points:

- 87% pengangguran terbuka di Indonesia adalah orang dengan pendidikan rendah (SLTA ke bawah)
- Sebagian besar pengangguran terbuka terkonsentrasi di DKI Jakarta, Banten, Jawa barat dan Kep Riau.

3. Setengah Pengangguran

Data untuk Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi (persen) 2019-2020 menunjukkan bahwa individu yang mengalami pengurangan jam kerja di bawah 35 jam paling besar terjadi di wilayah Bali sebesar 7%, disusul oleh Banten, Jawa

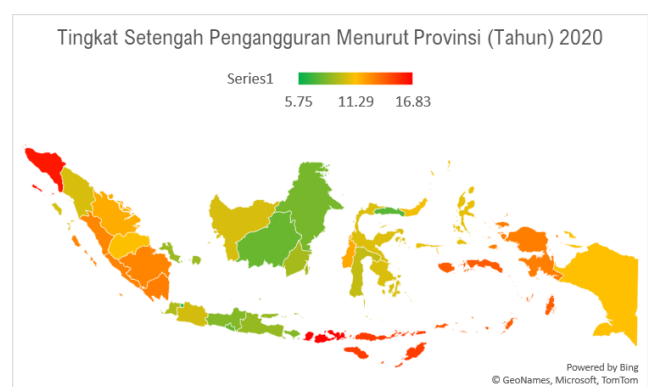
Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Lampung masing-masing 5% (Lihat lebih lanjut pada Tabel 9 di bawah).

Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020

		2019		2020		PERTAMBAHAN	
1	NUSA TENGGARA BARAT	14		NUSA TENGGARA BARAT	17	BALI	7
2	ACEH	12		ACEH	16	BANTEN	5
3	NUSA TENGGARA TIMUR	12		NUSA TENGGARA TIMUR	15	JAWA BARAT	5
4	MALUKU	11		MALUKU	14	SULAWESI UTARA	5
5	BENGKULU	10		LAMPUNG	13	DKI JAKARTA	5
6	SULAWESI BARAT	10		PAPUA BARAT	13	LAMPUNG	5
7	SUMATERA SELATAN	9		BENGKULU	13	PAPUA BARAT	4
8	SUMATERA BARAT	9		SUMATERA SELATAN	13	PAPUA	4
9	SULAWESI TENGAH	9		SUMATERA BARAT	13	DI YOGYAKARTA	4
10	PAPUA BARAT	9		SULAWESI BARAT	12	ACEH	4
11	LAMPUNG	9		RIAU	12	SUMATERA SELATAN	4
12	JAMBI	9		PAPUA	11	JAWA TIMUR	4
13	SULAWESI TENGGARA	8		JAMBI	11	SUMATERA BARAT	4
14	RIAU	8		SULAWESI UTARA	11	RIAU	4
15	MALUKU UTARA	8		MALUKU UTARA	11	MALUKU	3
16	INDONESIA	6		INDONESIA	10	INDONESIA	4

Created with Datawrapper

Table 10: Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi (Persen), per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)²⁷



Map 12: Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi (persen) 2019-2020 Data diolah dari BPS (2020)²⁸

²⁷ <https://www.bps.go.id/indicator/6/1181/1/tingkat-setengah-pengangguran-menurut-provinsi.html>

²⁸ <https://www.bps.go.id/indicator/6/1181/1/tingkat-setengah-pengangguran-menurut-provinsi.html>

Sedangkan kalau melihat berdasarkan pada data Tingkat Setengah Pengangguran menurut provinsi tahun 2020 menunjukkan Nusa Tenggara secara nasional menduduki posisi paling atas atau tertinggi dari angka setengah pengangguran dengan persentase sebesar 17%. Angka ini terhitung sangat tinggi atau 7% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat rata-rata pengangguran secara nasional. Posisi ini disusul oleh provinsi Aceh sebesar 17% dan Nusa Tenggara Timur 15% dan Maluku 14%. Sementara untuk Lampung, Papua Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan dan Sumatera Barat masing-masing 13%. Kalau dilihat dari persentase ini cukup menarik karena persebaran angka tingkat setengah pengangguran berdasarkan provinsi paling besar di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat.

Sedangkan untuk persebaran berdasarkan geografis tingkat setengah pengangguran paling rendah di wilayah Jawa dan Kalimantan. Posisi paling rendah tingkat setengah pengangguran adalah provinsi Riau dan DKI Jakarta yang masing-masing 6%. Wilayah ini 3% lebih rendah dari persentase pengangguran secara nasional. Setelah itu kemudian disusul oleh Kalimantan Timur 7%, Gorontalo, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara masing-masing 8% (untuk lebih lengkap lihat pada Tabel 10).

Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi (Persen), 2020

TERTINGGI			TERENDAH	
1	NUSA TENGGARA BARAT	17	KEP. RIAU	6
2	ACEH	16	DKI JAKARTA	6
3	NUSA TENGGARA TIMUR	15	KALIMANTAN TIMUR	7
4	MALUKU	14	GORONTALO	8
5	LAMPUNG	13	DI YOGYAKARTA	8
6	PAPUA BARAT	13	KALIMANTAN TENGAH	8
7	BENGKULU	13	KALIMANTAN UTARA	8
8	SUMATERA SELATAN	13	JAWA TENGAH	9
9	SUMATERA BARAT	13	BALI	9
10	SULAWESI BARAT	12	JAWA TIMUR	9
11	INDONESIA	10		

Created with Datawrapper

Table 11: Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi (persen) 2020 (BPS, 2020)²⁹

Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (Persen), 2019-2020

	2019	2020	Perubahan
Sekolah Menengah	5.45	9.56	4.11
Sekolah Tinggi	3.89	7.21	3.32
Sekolah Dasar	6.97	9.96	2.99
Tidak Pernah Sekolah	5.74	8.5	2.76

Created with Datawrapper

Figure 4: Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (persen) 2019-2020 (Data diolah dari BPS 2020)³⁰

Berdasarkan data BPS (2020) mengenai Tingkat Setengah Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan menunjukkan bahwa terjadi perubahan sangat signifikan terhadap kenaikan persentase angka setengah pengangguran untuk sekolah menengah jika dibandingkan angka tahun 2019 5.45% naik menjadi 9.56% di tahun 2020. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 4.11% dalam kurung waktu satu tahun. Setelah itu baru kemudian disusul oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Tinggi sebesar 3.32%. Namun demikian, jika data tersebut dari persentase

²⁹ <https://www.bps.go.id/indicator/6/1181/1/tingkat-setengah-pengangguran-menurut-provinsi.html>

³⁰ <https://www.bps.go.id/indicator/6/1184/1/tingkat-setengah-pengangguran-menurut-tingkat-pendidikan.html>

paling besar dari angka setengah pengangguran terjadi pada segmen penduduk dengan level pendidikan sekolah dasar sebesar 9.96% di tahun 2020, kemudian disusul oleh sekolah menengah 9.56% dan tidak pernah sekolah 8.5%. Sementara angka persentase paling rendah secara kumulatif terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah tinggi. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat pendidikan tinggi lebih memiliki kecenderungan untuk mendapatkan pekerjaan tetap atau pekerjaan lebih dari 35 jam per minggu. Sementara untuk masyarakat dengan pendidikan yang relatif rendah, kecenderungan untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan pilihan pekerjaan jauh lebih susah.

Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Daerah Jenis Kelamin (Persen), 2018-2020

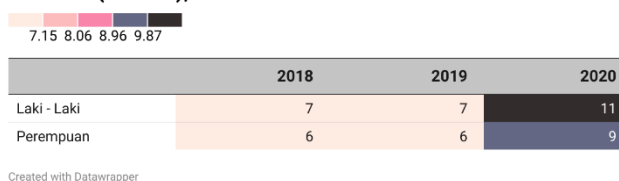


Figure 5: Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Daerah Jenis Kelamin (Persen) 2018-2019 (Data diolah BPS 2020)³¹

Data lain yang perlu dicermati adalah tingkah setengah pengangguran menurut jenis kelamin. Data ini penting untuk melihat kesetaraan gender terhadap akses jam kerja yang lebih lama. Data dari BPS (2020) menunjukkan bahwa persentase laki-laki untuk tingkat setengah pengangguran lebih tinggi 1% jika dibandingkan dengan perempuan berdasarkan data 2018 dan 2019. Sementara di tahun 2020, persentase tingkat pengangguran untuk laki-laki meningkat tajam yaitu 11% atau naik sekitar 4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk perempuan

naik 3% dari tahun 2019 ke 2020 sehingga persentase setengah pengangguran buat perempuan bertambah menjadi 9%. Perbedaan angka ini menunjukkan ada ketidaksetaraan jam kerja bagi perempuan dan laki-laki yang membutuhkan adanya penelitian dan kajian lebih mendalam untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya ketimpangan ini. Selain itu,

Key Points

- Secara geografis persentase paling besar untuk tingkat setengah pengangguran menurut provinsi terletak di wilayah Indonesia Timur dan Barat, sedangkan wilayah tengah cenderung lebih rendah.
- Persentase penambahan angka setengah pengangguran dari 2019-2020 adalah provinsi Bali sebesar 7%, atau 3% di atas persentase nasional.
- Provinsi yang paling tinggi presentasi setengah pengangguran adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 17% atau 7% lebih tinggi dari persentase nasional.
- Provinsi paling rendah persentase angka setengah penganggurannya adalah Kep. Riau sebesar 6% atau 4% lebih rendah dari angka nasional.
- Masyarakat dengan pendidikan paling rendah lebih cenderung susah mendapatkan pekerjaan dengan jam kerja di atas 35 jam.
- Masyarakat dengan pendidikan tinggi lebih cenderung mengalami persentase yang rendah terhadap tingkat setengah pengangguran

4. Dinamika

Berdasarkan data pada Tabel 11 di bawah menunjukkan bahwa Papua adalah provinsi dengan dari keseluruhan angkatan kerja yang paling sedikit bekerja adalah

³¹<https://www.bps.go.id/indicator/6/1183/1/tingkat-setengah-pengangguran-menurut-daerah-jenis-kelamin.html>

Kalimantan Utara dengan total yang bekerja sebanyak 330,441 dari 701.814 jumlah penduduk. Ini berarti terdapat 371.373 atau 47% penduduk yang tidak bekerja. Setelah itu kemudian disusul oleh Papua Barat dengan total 45.930 orang dari 981.822 jiwa di tahun 2020³². Ini berarti ada 935.882 orang yang tidak bekerja dan 33501 pengangguran, dengan jumlah yang Angkatan kerja sebanyak 492851 jiwa atau hampir setengah dari penduduk di Papua Barat.

Sementara dari keseluruhan Angkatan Kerja yang bekerja hanya sebanyak 93,2%. Ini kemungkinan memiliki korelasi yang kuat dengan tingginya angka persentase penduduk miskin sebesar 22,1% dengan indeks pembangunan manusia paling rendah yaitu sebesar 62,99 pada tahun 2019³³. Setelah Papua Barat menyusul kemudian. Setelah itu kemudian menyusul Maluku Utara dengan jumlah yang bekerja sebanyak 552.502 orang, pengangguran 29.997 dan jumlah Angkatan kerja adalah 582.449 dengan persentase yang bekerja dari seluruh Angkatan kerja sebanyak 94.85%.

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, (Terendah) 2020.

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, (Terendah) - Agustus 2020

BEKERJA	PENGANGGURAN	JUMLAH AK	% BEKERJA
KALIMANTAN UTARA	330,441	KALIMANTAN UTARA	17,290
PAPUA BARAT	459,350	SULAWESI BARAT	23,132
MALUKU UTARA	552,502	GORONTALO	25,410
GORONTALO	568,563	MALUKU UTARA	29,997
SULAWESI BARAT	672,986	PAPUA BARAT	33,501
BANGKA-BELITUNG	699,881	BANGKA-BELITUNG	38,756
MALUKU	775,701	BENGKULU	43,801
KEPULAUAN RIAU	1,016,600	SULAWESI TENGAH	59,381
BENGKULU	1,031,881	SULAWESI TENGGARA	61,860
SULAWESI UTARA	1,134,802	KALIMANTAN TENGAH	63,309
		KALIMANTAN UTARA	347,731
		PAPUA BARAT	492,851
		MALUKU UTARA	582,499
		GORONTALO	593,973
		SULAWESI BARAT	696,118
		BANGKA-BELITUNG	738,637
		MALUKU	839,190
		BENGKULU	1,075,682
		KEPULAUAN RIAU	1,133,776
		SULAWESI UTARA	1,225,050

Created with Datawrapper

Table 12: Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, (Tertinggi) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)³⁴

Sementara untuk jumlah yang bekerja paling tinggi ada di provinsi Jawa Barat dengan jumlah yang bekerja sebesar 21.674.854 orang. Dari jumlah Angkatan Kerja yang menganggur sebanyak 2.533.076. Ini berarti ada 89.54% dari 24.207.930 Angkatan Kerja yang bekerja. Setelah Jawa Barat Menyusul Jawa Timur dengan jumlah yang bekerja sebesar 20.962.967 orang, 1.301.145 pengangguran dari keseluruhan 22.264.112 juta jumlah Angkatan Kerja. Ini berarti 94.16% dari Angkatan Kerja memiliki pekerjaan. Setelah itu kemudian menyusul Jawa Tengah sebesar 17.536.935 juta orang yang bekerja dari jumlah Angkatan kerja sebanyak 18.751.277 orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut 1.214.342 menganggur, ini berarti 93.52% persen dari total Angkatan Kerja mampu mendapatkan Pekerjaan. Dari penjelasan tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Angkatan

³² <https://papuabarar.bps.go.id/quickMap.html>

³³ <https://papuabarar.bps.go.id/quickMap.html>

³⁴ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

Kerja terbesar tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, (Tertinggi) 2020.

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, (Tertinggi) - Agustus 2020

BEKERJA	PENGANGGURAN		JUMLAH AK	% BEKERJA			
JAWA BARAT	21,674,854	JAWA BARAT	2,533,076	JAWA BARAT	24,207,930	SULAWESI BARAT	97
JAWA TIMUR	20,962,967	JAWA TIMUR	1,301,145	JAWA TIMUR	22,264,112	SULAWESI TENGAH	96
JAWA TENGAH	17,536,935	JAWA TENGAH	1,214,342	JAWA TENGAH	18,751,277	BENGKULU	96
SUMATERA UTARA	6,842,252	BANTEN	661,061	SUMATERA UTARA	7,350,057	NUSA TENGGARA BARAT	96
BANTEN	5,552,172	JAKARTA RAYA	572,780	BANTEN	6,213,233	GORONTALO	96
JAKARTA RAYA	4,659,251	SUMATERA UTARA	507,805	JAKARTA RAYA	5,232,031	NUSA TENGGARA TIMUR	96
LAMPUNG	4,280,109	SULAWESI SELATAN	269,817	LAMPUNG	4,489,677	PAPUA	96
SUMATERA SELATAN	4,091,383	SUMATERA SELATAN	238,363	SUMATERA SELATAN	4,329,746	YOGYAKARTA	95
SULAWESI SELATAN	4,006,620	LAMPUNG	209,568	SULAWESI SELATAN	4,276,437	SULAWESI TENGGARA	95
RIAU	3,022,988	RIAU	203,837	RIAU	3,226,825	KALIMANTAN TENGAH	95

Created with Datawrapper

Table 13: Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, (Terendah) 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)³⁵

Besarnya angkatan kerja di kantong-kantong wilayah dengan penduduk yang banyak seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah juga memiliki potensi jumlah pengangguran yang besar.

Data menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Jawa Barat adalah yang terbesar di Indonesia sebesar 2.533.076 orang dengan jumlah Angkatan Kerja yang juga paling besar. Setelah itu menyusul Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki pergerakan angka yang sama. Namun kalau kita melihat dari sisi persentase orang jumlah angkatan kerja yang bekerja di tahun 2020, Sulawesi Barat menempati posisi tertinggi yaitu 97%. Ini berarti hanya 3% dari keseluruhan Angkatan Kerja yang belum

mendapatkan pekerjaan. Ini juga menunjukkan bahwa angka ini lebih tinggi atau serapan kerja yang lebih bagus sebesar 4.07% dari persentase nasional sebesar 92.93%. Setelah itu kemudian menyusul, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Gorontalo dengan persentase masing-masing 96% (Lihat lebih lanjut pada Tabel 12). Ini berarti ada 4% dari keseluruhan Angkatan Kerja yang belum terserap dengan baik.

Sementara kalau kita lihat wilayah-wilayah yang persentase Angkatan Kerja yang bekerja paling rendah di tahun 2020 adalah DKI Jakarta dan Banten yang masing-masing sebesar 89%. Ini menunjukkan angka serapan tenaga kerja 3.93% lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Setelah DKI Jakarta dan Banten kemudian menyusul Jawa Barat dan Kepulauan Riau yang masing-masing di posisi 90% atau sebesar 2.93% lebih rendah dari angka rata-rata nasional. Ini mengindikasikan bahwa wilayah daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Kepulauan Riau membutuhkan pendekatan agar angka serapan tenaga kerja di wilayah tersebut bisa lebih baik.

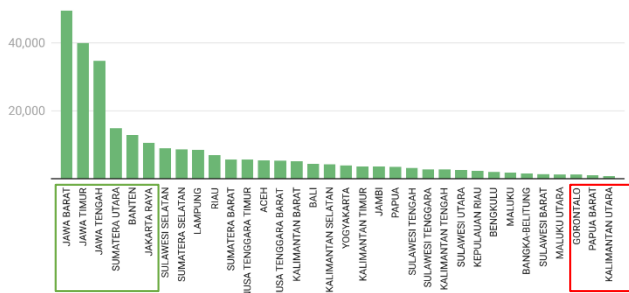
Adapun perincian penjelasan akan lebih lanjut di jelaskan pada bagian berikutnya.

³⁵ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

5. Angkatan Kerja

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2020



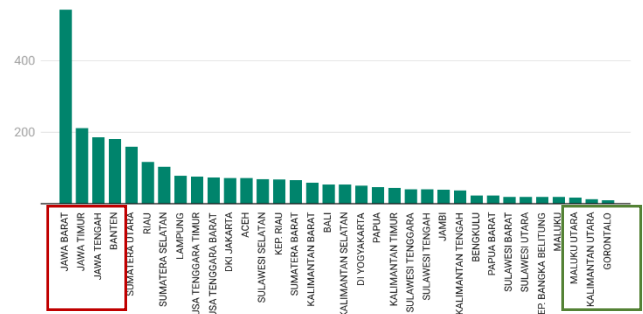
Created with Datawrapper

Graph 1: Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)³⁶

Penduduk Indonesia di tahun 2020 berjumlah 269,6 juta orang³⁷. Angka ini sebentar lagi mendekati 270 juta orang. Dari data persebaran penduduk, Jawa Barat menduduki provinsi dengan penduduk terpadat yaitu 49565.2 ribu orang, kemudian menyusul Jawa Timur 39955.9 ribu, Jawa Tengah 34738.2 ribu dan Sumatera Utara 14798.2 ribu, Banten 12895.3 ribu orang dan DKI Jakarta 10576.4 ribu orang. Dari ketujuh wilayah tersebut hanya Sumatera Utara yang berlokasi di luar pulau Jawa dengan total penduduk sebanyak 147 juta orang. Ini berarti konsentrasi penduduk di Indonesia 54% berada di pulau Jawa.

Sementara untuk provinsi dengan penduduk terkecil adalah Gorontalo, Papua Barat dan Kalimantan Utara. Ketiga dari provinsi ini berada diluar dan jauh dari pulau Jawa.

Perubahan Jumlah Penduduk 2019-2020



Created with Datawrapper

Graph 2: Perubahan Jumlah Penduduk 2019-2020. (Data diolah dari BPS, 2020)³⁸

Sementara kalau kita lihat dari pola perubahan jumlah penduduk di tahun 2019-2020 berdasarkan dari data (BPS, 2020), terlihat bahwa wilayah dengan pertambahan penduduk paling pesat antara tahun 2019-2020 adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten. Diantara keempat provinsi tersebut, Jawa Barat menempati pertumbuhan penduduk paling pesat sebesar 542 ribu orang dalam setahun dan bahkan 157% lebih besar dibandingkan dengan pertambahan penduduk di Jawa Timur yang hanya sebanyak 211 ribu orang (Lihat lebih lanjut pada Chart 5 di halaman sebelumnya).

Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2020



Created with Datawrapper

Map 13: Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa) (Data diolah dari BPS, 2020)³⁹

³⁶ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>

³⁷ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>

³⁸ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>

³⁹ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>

Sementara kalau kita lihat berdasarkan persebaran penduduk melalui peta geografis terlihat bahwa kepadatan penduduk memang terpusat di wilayah Jawa dan Sumatera dan sebagian kecil wilayah Sulawesi. Sementara untuk wilayah dengan penduduk kecil berada di Pulau Papua, Kalimantan, Maluku dan sebagian besar wilayah Sulawesi.

Key Points

- Penduduk Indonesia di tahun 2020 berjumlah 269,6 juta orang
- 54% penduduk berada di pulau Jawa.
- Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah menduduki posisi provinsi terpadat
- Wilayah dengan pertambahan penduduk paling pesat antara tahun 2019-2020 adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten.
- Jawa Barat menempati pertumbuhan penduduk paling pesat sebesar 542 ribu orang dalam setahun dan bahkan 157% jika dibandingkan dengan pertambahan penduduk di Jawa Timur.

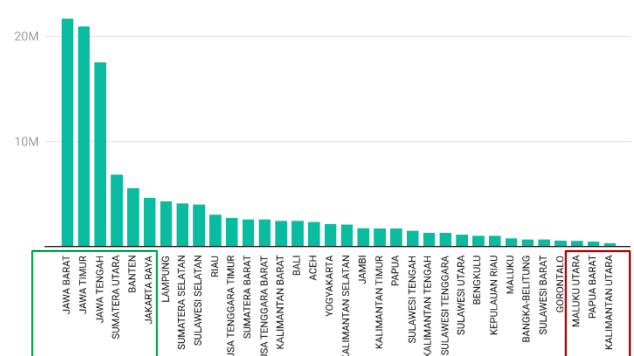
a. Bekerja

Kalau kita lihat dari angka persebaran dan jumlah penduduk pada bagian sebelumnya, memiliki kesamaan pola persebaran dengan untuk provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang bekerja. Misalnya saja untuk wilayah dengan penduduk bekerja paling besar masih didominasi oleh di urutan pertama oleh Jawa Barat, Kemudian disusul oleh Jawa Timur, baru kemudian Jawa Tengah dan disusul oleh Banten, baru kemudian DKI Jakarta. Namun demikian kalau kita lihat lebih jauh perbandingan data antara jumlah penduduk dan perubahan jumlah penduduk antara Jawa Barat dan

Jawa timur lumayan signifikan. Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa jumlah penduduk di Jawa Barat sebesar 49565.2 ribu orang, sementara di Jawa Timur hanya 39955.9 ribu orang. Ini berarti ada selisih 9609.3 ribu orang antara kedua provinsi ini. Atau dengan kata lain penduduk Jawa Barat 24% lebih padat dari Jawa Timur.

Kalau kita lihat dari perbandingan dengan jumlah yang bekerja perbedaannya antara kedua wilayah ini sebesar 3,4%, dimana di Jawa Barat terdapat 21.6 juta orang yang bekerja sementara untuk Jawa Timur 20.96 juta orang. Ini mengindikasikan bahwa serapan tenaga kerja di Jawa Timur lebih baik dengan Jawa Barat. Atau jumlah masyarakat yang tertampung dalam lapangan pekerjaan lebih besar di Jawa Timur dibandingkan dengan Jawa barat.

Bekerja-Agustus 2020

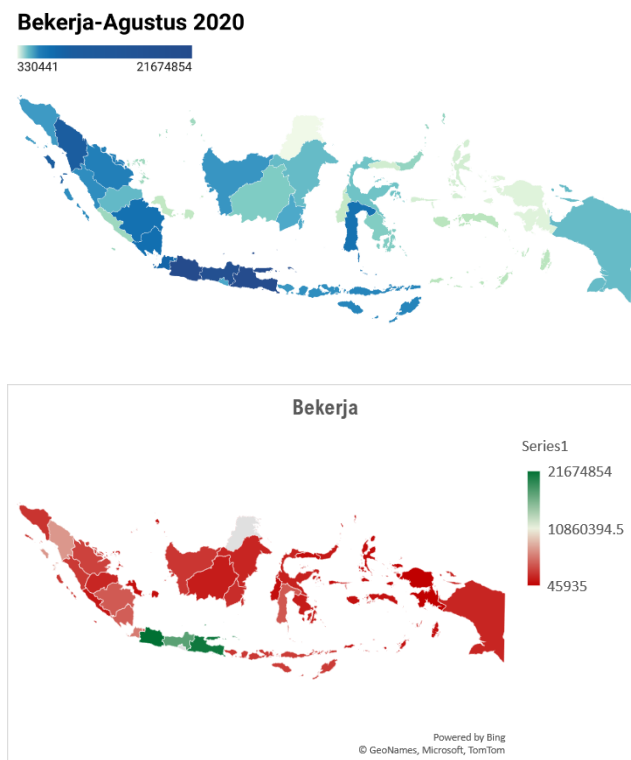


Graph 3: Bekerja – Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁴⁰

Berdasarkan angka tersebut juga di atas terlihat bahwa penduduk yang bekerja paling besar ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari ketiga wilayah ini setara dengan 47% dari keseluruhan orang yang bekerja di Indonesia. Sementara untuk orang yang bekerja paling sedikit ada di wilayah Kalimantan Utara, Papua Barat dan Maluku Utara. Gabungan dari ketiga provinsi

⁴⁰ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

ini hanya setara dengan 1,3% dari keseluruhan penduduk yang bekerja di Indonesia.



Map 14: Bekerja – Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁴¹

Sementara kalau kita lihat persebaran penduduk yang bekerja dari peta geografis terkonsentrasi paling besar di pulau Jawa, Sumatera, sebagian kecil pulau Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk yang paling sedikit bekerja berada di sebagian besar pulau Papua, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi. Ini berarti di wilayah tersebut ketersediaan lapangan kerja belum bisa memadai. Provinsi seperti misalnya Maluku Utara, Papua Barat dan Kalimantan Utara dari segi jumlah penduduk memang cukup kecil yang bekerja, namun demikian juga jumlah penduduk memang relatif kecil.

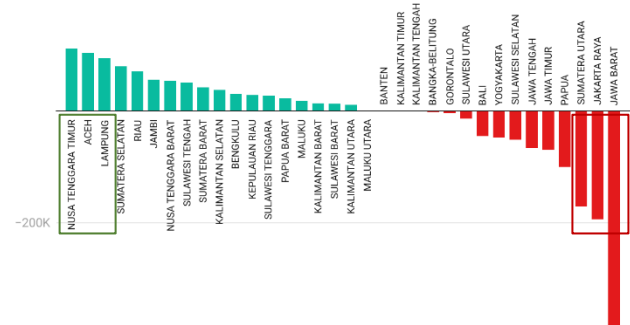
⁴¹ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

Key Points

- Penduduk yang bekerja paling besar ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
- Ketiga wilayah ini setara dengan 47% dari keseluruhan orang yang bekerja di Indonesia
- Terdapat indikasi serapan dan ketersediaan lapangan kerja di Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan Jawa Barat.
- Persebaran penduduk yang bekerja dari peta geografis terkonsentrasi paling besar di pulau Jawa, Sumatera, sebagian kecil pulau Kalimantan, Sulawesi dan Bali.
- Pulau Papua, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi memiliki jumlah orang yang bekerja paling sedikit.

b. Perubahan Bekerja 2019-2020

Bekerja (Perubahan)- Agustus 2019-2020



Graph 4: Perubahan dan Pengurangan Jumlah Penduduk yang Bekerja (2019-2020) (Data diolah dari BPS, 2020)⁴²

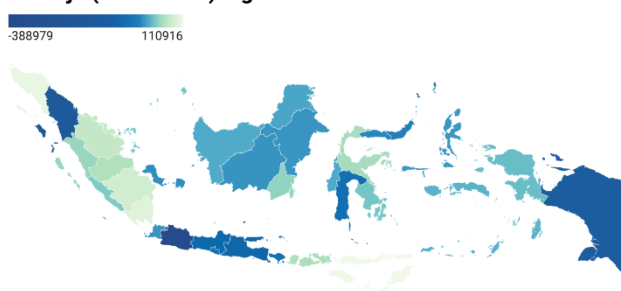
Sementara kalau kita lihat dari data perubahan jumlah orang yang bekerja dari tahun 2019-2020 terlihat ada beberapa penambahan dan juga pengurangan jumlah orang yang bekerja secara signifikan. Wilayah yang mengalami penambahan jumlah orang yang bekerja secara signifikan

⁴² <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

ada di Nusa Tenggara Timur sebanyak 110916, kemudian disusul oleh Aceh yang tidak jauh berbeda dengan NTT sebanyak 103169 orang. Setelah itu kemudian disusul oleh Lampung dan Sumatera Selatan.

Sementara kalau kita lihat berdasarkan perubahan jumlah orang yang bekerja paling banyak mengalami pengurangan besar-besaran adalah Jawa Barat sebesar 388979, kemudian disusul oleh DKI Jakarta 193698. Jika dibandingkan dengan angka berkurangnya jumlah orang yang bekerja antara Jawa Barat dan Jakarta, maka data menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan yaitu 100.8%. Dengan kata lain, jumlah pengurangan orang yang bekerja di Jawa Barat dua kali lipat dibandingkan dengan DKI Jakarta. Setelah itu kemudian menyusul Sumatera Utara sebesar 170266 orang antara tahun 2019-2020 (Lihat lebih lanjut pada .

Bekerja (Perubahan)-Agustus 2019-2020



Map 15: Bekerja (Perubahan) per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁴³

Sementara kalau kita persebaran secara geografis terlihat bawah wilayah yang mengalami penurunan signifikan jumlah orang yang bekerja berada di Pulau Jawa, Papua dan Sebagian kecil pulau Sulawesi serta beberapa bagian di pulau Kalimantan. Sementara untuk wilayah yang masih

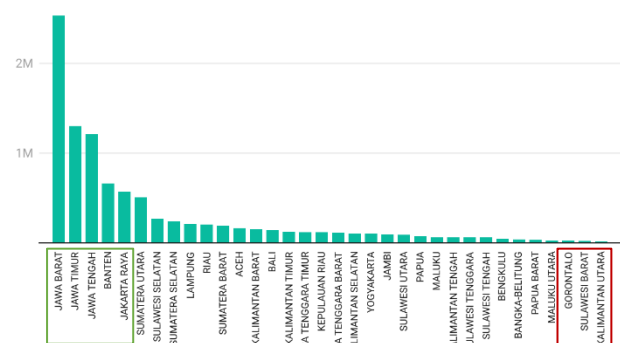
mengalami penambahan jumlah orang yang bekerja adalah sebagian besar pulau Sumatera, terkecuali Sumatera Barat dan sebagian besar pulau NTB dan NTT.

Key Points

- Wilayah yang mengalami pertambahan jumlah orang yang bekerja paling banyak di NTT, Aceh, Lampung dan Sumatera Selatan
- Wilayah yang mengalami pengurangan jumlah orang yang bekerja paling besar ada di Jawa Barat dan DKI Jakarta
- Secara geografis wilayah Jawa, Papua dan sebagian pulau Sulawesi mengalami pengurangan jumlah orang yang bekerja dan penambahan ada di pulau Sumatera dan sebagian kecil pulau Sulawesi.

c. Pengangguran

Pengangguran-Agustus 2020



Graph 5 : Pengangguran-Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁴⁴

Berdasarkan dari data di atas terlihat bahwa pengangguran paling besar terjadi di Jawa Barat sebanyak 2.533.076 orang, kemudian di susul oleh Jawa Timur sebanyak 1.301.145 orang, sedangkan Jawa Tengah 1.214.342, Banten 661.061 dan DKI Jakarta 572.780 orang. Gabungan dari kelima provinsi ini

⁴³ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

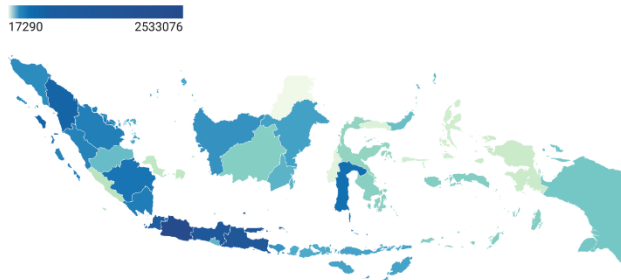
⁴⁴ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

sebanyak 6.282.404 orang, atau 64% pengangguran di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran paling besar terkonsentrasi di kelima wilayah ini secara kuantitas. Ini juga sejalan dengan jumlah penduduk yang besar di wilayah-wilayah ini.

Sementara untuk wilayah dengan pengangguran tingkat pengangguran yang relatif sangat rendah berada di provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara. Ini juga berhubungan dengan jumlah penduduk yang relatif kecil di wilayah-wilayah tersebut.



Pengangguran-Agustus 2020



Map 16: Pengangguran per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁴⁵

Sementara kalau kita lihat berdasarkan data secara geografis maka terlihat kantong-kantong wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi berada di pulau Jawa, sebagian besar pulau Sumatera dan

sebagian wilayah Kalimantan, sebagian kecil di Sulawesi yakni di Sulawesi Selatan. Sementara untuk wilayah dengan pengangguran yang rendah ada di pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.

Key Points

- Pengangguran paling besar ada di Jawa Barat.
- Kelima provinsi termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta secara keseluruhan sama dengan 64% seluruh pengangguran di Indonesia.
- Pengangguran yang paling rendah ada di Gorontalo, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.
- Kepadatan pengangguran terkonsentrasi di Pulau Jawa, Sumatera, sebagian Kalimantan dan sebagian kecil pulau Sulawesi.

d. Perubahan Pengangguran 2019-2020

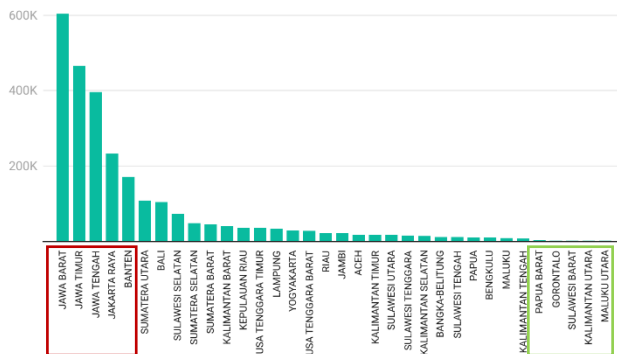
Kalau kita lihat berdasarkan data pada *Chart 9*, maka terlihat bahwa perubahan angka pengangguran paling besar terjadi di Jawa Barat 603.561, kemudian disusul oleh Jawa Timur sebesar 466.015 orang, setelah itu kemudian Jawa Tengah sebesar 396.066, sementara untuk DKI Jakarta sebanyak 233.378, dan Banten sebanyak 171.236. Gabungan dari kelima dari provinsi ini menghasilkan 1.870.256 pengangguran baru, atau setara dengan 70% pengangguran di Indonesia.

Sementara untuk provinsi dengan pertambahan pengangguran yang paling rendah ada di Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan

⁴⁵ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

Maluku Utara (Lihat lebih lanjut pada *Chart 9* di bawah ini).

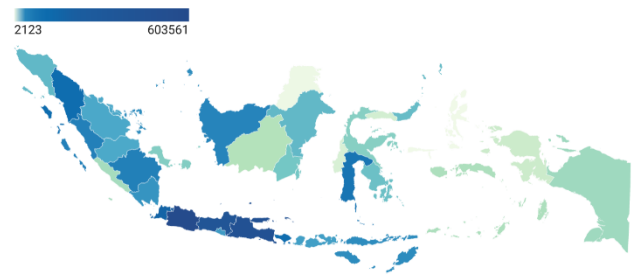
Pengangguran (Perubahan)-Agustus 2019-2020



Graph 6: Pengangguran (Perubahan) Per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁴⁶

Sementara kalau kita lihat perubahan pengangguran berdasarkan data geografis dari pertambahan pengangguran (YoY) maka terlihat jumlah pertambahan terkonsentrasi di pulau Jawa, Sumatera, sebagian pulau Kalimantan dan sebagian kecil pulau Sulawesi dan Bali. Sementara untuk pertambahan jumlah pengangguran berdasarkan data 2019-2020 maka pulau Papua, Maluku dan sebagian besar pulau Sulawesi dengan pertambahan paling kecil (Lihat lebih lanjut pada peta persebaran geografis di bawah ini).

Pengangguran (Perubahan)-Agustus 2019-2020



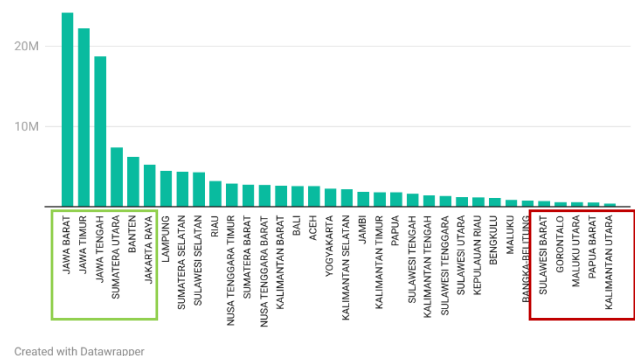
Map 17: Pengangguran (Perubahan) per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁴⁷

Key Points

- Pertambahan pengangguran paling besar di Jawa Barat sebesar 600 ribuan
- 70% pertambahan pengangguran terjadi di Pulau Jawa.
- Pertambahan pengangguran paling kecil terjadi di Maluku Utara sebesar 2000an
- Secara geografis, pertambahan pengangguran terjadi paling besar di Pulau Jawa, sebagian besar pulau Sumatera, Bali, dan sebagian kecil pulau Sumatera dan Sulawesi.

e. Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan Kerja-Agustus 2020



Created with Datawrapper

Graph 7: Angkatan Kerja – Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁴⁸

⁴⁶ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

⁴⁷ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

⁴⁸ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

Berdasarkan Chart 10 di atas terlihat bahwa provinsi Jawa Barat menempati jumlah angkatan kerja yang paling besar yakni 24.2 juta orang berdasarkan data per Agustus 2020. Kemudian disusul oleh Jawa Timur sebanyak 22.2 juta orang, Jawa Tengah 18,7 juta orang, Sumatera Utara 7,3 juta, Banten 6,2 juta dan Jakarta 5,2 juta orang. Sebagian besar provinsi-provinsi ini berada di Jawa dan jika dijumlahkan sebesar 76,6 juta orang atau setara dengan 55.4% jumlah angkatan kerja di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa angkatan paling besar memang terkonsentrasi di wilayah Jawa, sehingga sangat potensial masalah pengangguran secara kuantitas juga ada di Jawa.



Map 18: Angkatan Kerja per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁴⁹

Sementara kalau kita menganalisis jumlah angkatan kerja paling kecil, ada di kantong-kantong wilayah yang memang jumlah penduduknya juga kecil seperti misalnya

Maluku Utara, Papua Barat dan Kalimantan Utara.

Sementara kalau kita melihat jumlah angkatan kerja secara geografis terkonsentrasi di Pulau Jawa, sebagian besar wilayah Sumatera, Sebagian besar wilayah Bali, NTB dan NTT serta sebagian wilayah Kalimantan dan sebagian kecil pulau Sulawesi. Sedangkan pulau dengan jumlah angkatan kerja yang relatif rendah ada di sebagian besar pulau Sulawesi, Maluku dan Papua terutama di Papua Barat.

Key Points

- Angkatan Kerja paling besar ada di Jawa Barat sebesar 24,2 juta
- Gabungan angkatan kerja di Jawa sama dengan 55.4% angkatan kerja di Indonesia
- Angkatan kerja paling rendah ada di Maluku Utara, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.
- Secara geografis pulau dengan kepadatan angkatan kerja terkonsentrasi di Jawa, Sumatera, NTB, NTB, sebagian Kalimantan dan sebagian kecil pulau Sulawesi

⁴⁹ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

f. Perubahan Angkatan Kerja (2019-2020)

Angkatan Kerja (Perubahan)-Agustus 2019-2020

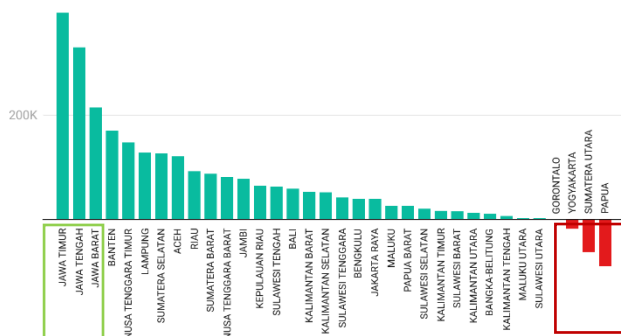
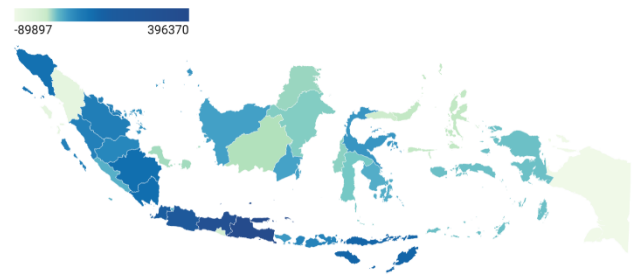


Figure 6: Angkatan Kerja (Perubahan) per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁵⁰

Berdasarkan pada data Figure 6 enam di atas menunjukkan bahwa perubahan atau pertambahan angkatan kerja paling besar dari tahun 2019-2020 ada di Jawa Timur sebanyak 396.370 orang. Di posisi kedua ada Jawa Tengah sebanyak 330.084, kemudian disusul oleh Jawa Barat sebanyak 214.582. Kemudian Banten dan NTT masing-masing 170.954 dan 147.926. Jika angka perubahan pertambahan kerja di gabungan dari wilayah di Jawa, maka mencakup 48 % dari total keseluruhan penambahan angkatan kerja antara tahun 2019-2020.

Sementara kalau kita analisis lebih jauh, ada beberapa provinsi di Indonesia yang malah pertumbuhan tenaga kerjanya negatif (menurun). Wilayah-wilayah tersebut adalah Gorontalo berkurang -1250 orang, Yogyakarta -18032, Sumatera Utara -61723 dan yang paling besar adalah Papua sebanyak -89897 orang di antara rentang waktu 2019-2020). Gabungan pengurangan angkatan kerja dai keempat provinsi sama dengan -170.902.

Angkatan Kerja (Perubahan)-Agustus 2019-2020



Map 19: Angkatan Kerja (Perubahan) per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁵¹

Sementara kalau kita liat dari perubahan Angkatan Kerja antara tahun 2019-2020 secara geografis sebagaimana terlihat pada Map 14, terlihat bahwa pulau dengan pertambahan angkatan kerja paling besar ada di pulau Jawa, sebagian besar di pulau Sumatera, Bali, NTT dan NTB, sebagian kecil di pulau Kalimantan. Sedangkan kalau kita berdasarkan persebaran geografis wilayah pengurangan angkatan kerja sebagian besar berada di Papua, Maluku, Sulawesi dan sebagian Kalimantan.

Key Points

- Pertambahan angkatan kerja paling besar terdapat di Jawa Timur sebesar 396.370
- 48% pertambahan angkatan kerja berada di Pulau Jawa.
- Pengurangan angkatan kerja paling besar terjadi di Papua sebesar -89897
- Ada 4 provinsi yang mengalami pengurangan tenaga kerja (2019-2020) yaitu Gorontalo, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Papua.
- Secara geografis konsentrasi peningkatan angkatan kerja ada di pulau Jawa, sebagian besar pulau Sumatera
- Pengurangan jumlah angkatan kerja paling kecil terkonsentrasi di wilayah

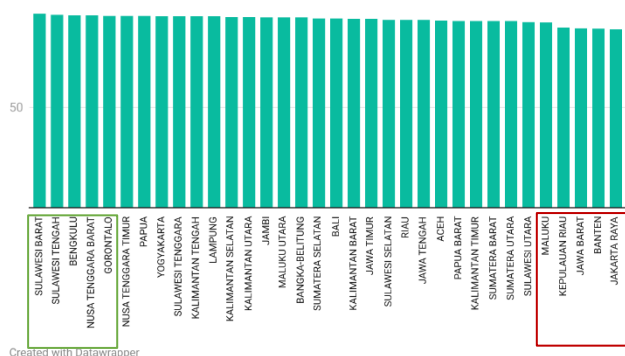
⁵⁰ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

⁵¹ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

Indonesia timur yaitu Sulawesi, Maluku dan Papua

g. % Bekerja

Bekerja (%) - Agustus 2020



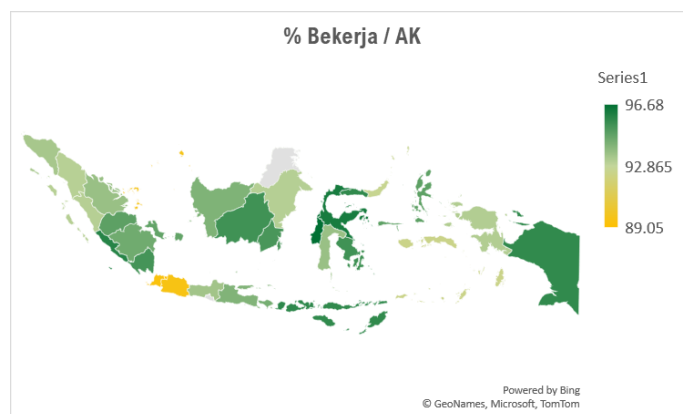
Graph 8: Bekerka (%) per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁵²

Berdasarkan pada Graph 8 terlihat bawah wilayah dengan persentase orang yang bekerja paling besar ada di Sulawesi barat, kemudian di Sulawesi Tengah yang masing-masing sebesar 96%. Kemudian disusul oleh Bengkulu, NTB, Gorontalo, NTT, Papua, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan dan Utara yang masing-masing dalam kelompok yang sama yaitu 95%.

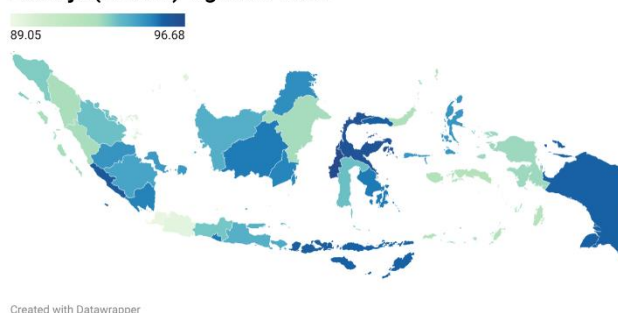
Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan wilayah dengan persentase paling rendah penduduk yang bekerja ada di Jakarta yang hanya sebesar 89.05%. Kemudian tiga provinsi lain termasuk Banten, Jawa Barat dan Kepulauan Riau yang masing-masing berada di angka 89%-an. Ini mengindikasikan bahwa ke empat wilayah ini membutuhkan perhatian yang lebih dan pendekatan yang lebih baik untuk meningkat jumlah persentase orang yang bekerja, karena masing-masing provinsi ini jauh dari persentase rata-rata orang yang bekerja di

Indonesia yaitu 94.4% (Untuk lebih lanjut lihat pada Graph 8 pada bagian atas).

Sedangkan kalau kita analisis berdasarkan persebaran secara geografis seperti yang terlihat pada Map 15).



Bekerja (Persen)-Agustus 2020



Map 20: Bekerja (Persen) per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁵³

Terlihat persebaran secara geografis persentase orang yang bekerja paling banyak ada di pulau Papua, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT. Sedangkan persebaran wilayah persentase orang yang bekerja paling rendah ada di pulau Sumatera dan Papua Barat dan Jawa (Untuk lebih lanjut lihat pada Map 15 di bawah)

⁵² <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

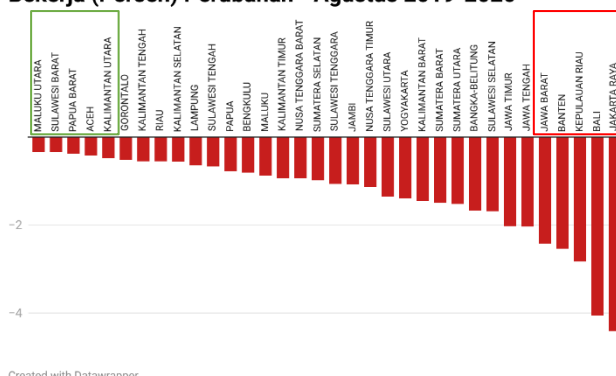
⁵³ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

Key Points

- Persentase paling tinggi penduduk yang bekerja ada di Sulawesi barat, Sulawesi dan Sulawesi Tengah
- Median atau persentase rata-rata penduduk yang bekerja secara nasional adalah 94.4%.
- Jakarta adalah provinsi dengan persentase orang yang bekerja paling rendah yakni 89.05, menyusul Banten, Jawa Barat dan Kepulauan Riau.
- Secara geografis konsentrasi dari persentase orang yang bekerja ada di pulau Bali, NTB, NTT, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi serta Papua Barat.
- Secara geografis konsentrasi persentase orang yang bekerja paling rendah di pulau Jawa, Maluku dan sebagian besar pulau Sumatera.

h. Perubahan % Bekerja 2019-2020

Bekerja (Persen) Perubahan - Agustus 2019-2020



Created with Datawrapper

Graph 9: Bekerja (Persen) Perubahan per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁵⁴

Data pada Graph 9, menunjukkan bahwa secara nasional Indonesia mengalami pengurangan orang yang bekerja sepanjang tahun 2019-2020. Seluruh provinsi mengalami perubahan. Perbedaannya hanya terletak

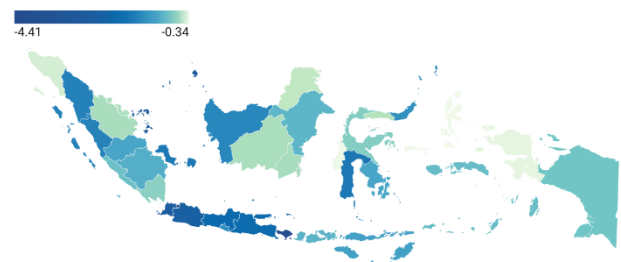
⁵⁴ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

dari besaran setiap provinsi dimana ada provinsi dengan pengurangan secara signifikan dan ada juga yang tidak secara signifikan.

Dari data menunjukkan median atau rata-rata pengurangan orang yang bekerja di Indonesia sebesar -1.02%. Dari median tersebut ada beberapa provinsi yang melenceng cukup jauh dari kewajaran termasuk Jakarta sebesar -4.41% dan Bali -4.06%. Kedua provinsi yang mengalami perubahan persentase orang yang bekerja paling signifikan secara nasional. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional terdapat perbedaan 3,39% untuk Jakarta dan 3.03% untuk Bali.

Sementara wilayah yang mengalami pengurangan persentase orang yang bekerja paling rendah secara nasional adalah Maluku Utara dan Sulawesi Barat yang masing-masing berada di posisi -0.34%. Kemudian disusul oleh Papua Barat sebesar 0.37% dan Aceh 0,42%. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional maka provinsi-provinsi ini masih jauh dari persentase pengurangan orang yang bekerja secara nasional.

Bekerja (Persen) Perubahan-Agustus 2019-2020



Created with Datawrapper

Map 21: Bekerja (Persen) Perubahan per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁵⁵

Sementara kalau kita melihat secara geografis konsentrasi perubahan orang yang bekerja antara tahun 2019-2020. Terlihat

⁵⁵ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

bahwa pengurangan paling besar terjadi di pulau Jawa dan Bali, kemudian disusul sebagian kecil wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sementara pulau yang mengalami perubahan persentase orang yang bekerja paling rendah berada di pulau Papua, sebagian besar pulau Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera serta Maluku, NTB dan NTT.

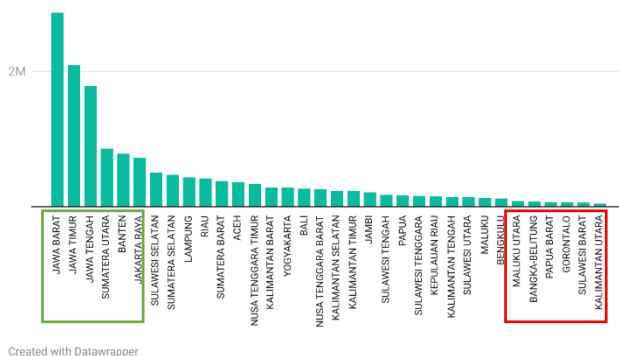
Key Points

- Indonesia mengalami pengurangan persentase orang yang bekerja secara nasional dengan rata-rata -1.02% (2019-2020)
- Provinsi penurunan persentase paling orang yang bekerja (2019-2020) adalah DKI Jakarta dan Bali dengan angka di atas -3%
- Provinsi dengan penurunan persentase rang yang bekerja lebih rendah secara nasional adalah Maluku Utara dan Sulawesi Barat masing-masing 0.34%

6. Bukan Angkatan Kerja

a. Sekolah

Sekolah- Agustus 2020



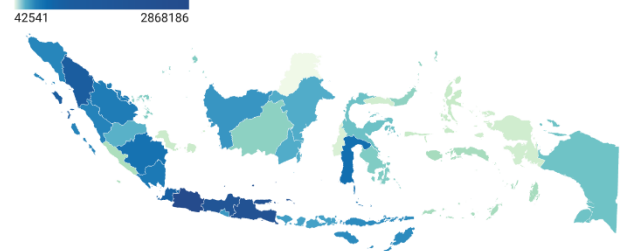
Graph 10: Sekolah Per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁵⁶

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang

sekolah paling besar ada di Jawa Barat sebanyak 2.868.186, kemudian disusul oleh Jawa Timur 2.095.398 orang dan Jawa Tengah sebanyak 1.787.373, Sumatera Utara 856.408, Banten 785.153 dan Jakarta 725.470. Proporsi paling besar dari penduduk yang bersekolah masih ada di pulau Jawa sebanyak 8.261.580 atau setara dengan 53.8% dari seluruh penduduk yang sekolah di Indonesia (Lihat lebih lanjut pada Graph 10).

Sementara kalau kita lihat berdasarkan pada jumlah yang sekolah paling sedikit ada di Kalimantan Utara sebanyak 42.541. Kemudian menyusul Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua Barat yang masing-masing di bawah angka 70.000-an.

Sekolah - Agustus 2020



Created with Datawrapper

Map 22: Sekolah Per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Secara geografis terlihat pada Map 17 bahwa konsentrasi kepadatan penduduk yang sekolah berada di pulau Jawa, Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi. Sementara untuk wilayah dengan tingkat yang relatif rendah untuk penduduk yang sekolah ada di Papua, Maluku, sebagian besar Sulawesi dan sebagian Kalimantan. Terlihat bahwa pulau-pulau di luar Jawa dan Sumatera memiliki kerentanan terhadap rendahnya jumlah penduduk yang sekolah. Sementara untuk wilayah Jawa dan

⁵⁶ <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>

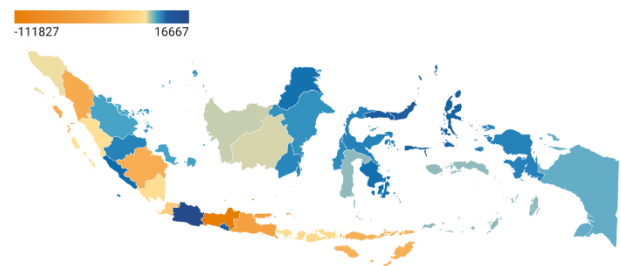
Sumatera cenderung lebih padat yang kemungkinan disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar dan fasilitas yang jauh lebih baik.

Key Points

- Jawa Barat menduduki posisi paling atas untuk angka penduduk yang sekolah, sebanyak 2.8 juta
- 58% penduduk yang sekolah ada di pulau Jawa.
- Secara persebaran geografis, pulau-pulau yang memiliki jumlah rendah penduduk yang sekolah adalah Papua, Maluku, dan sebagian pulau Sulawesi dan Kalimantan.
- Sementara pulau yang memiliki kepadatan yang tinggi untuk penduduk yang sekolah ada di Jawa dan Sumatera.

mengalami penurunan sangat signifikan termasuk Jawa Tengah dengan pengurangan sebanyak 111.827 orang. Kemudian disusul oleh Jawa Timur sebanyak -65390 orang, dan Jakarta 52034, serta Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan NTT yang berada di angka 40 ribuan.

Sekolah (Perubahan) - Agustus 2019-2020



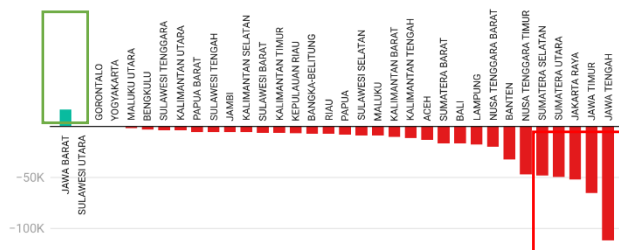
Created with Datawrapper

Map 23: Sekolah (Perubahan) per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Patut dicermati bahwa berkurangnya jumlah anak yang sekolah terutama di wilayah dengan kantong pengangguran yang cukup besar seperti misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta akan berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan. Ini juga akan berimplikasi terhadap produktivitas dan kesiapan tenaga kerja ke depan. Sementara kalau kita lihat persebaran secara geografis terlihat bahwa Pulau Jawa, Sumatera dan sebagian Kalimantan yang mengalami penurunan signifikan jumlah penduduk yang sekolah.

b. Perubahan Sekolah 2019-2020

Sekolah (Perubahan)-Agustus 2019-2020



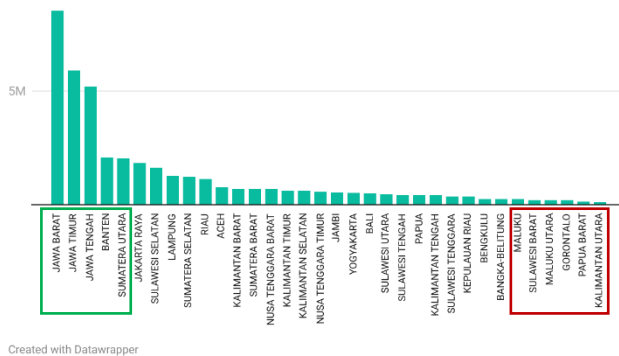
Created with Datawrapper

Graph 11: Sekolah (Perubahan) 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020).

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa wilayah yang tingkat pertambahan jumlah orang yang sekolah antara tahun 2019-2020 hanya terjadi di dua provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat dan Sulawesi Utara. Sementara 32 provinsi yang lainnya mengalami penurunan jumlah orang yang sekolah. Dari data tersebut di atas juga terlihat bahwa ada beberapa Provinsi yang

c. Mengurus Rumah Tangga

Mengurus - Agustus 2020



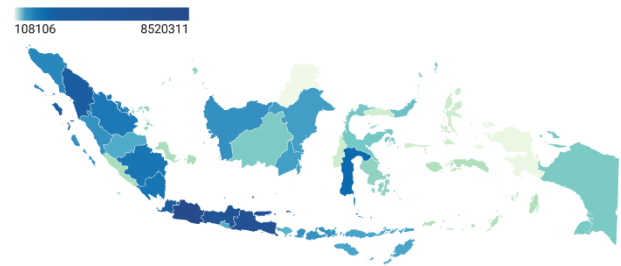
Created with Datawrapper

Graph 12: Mengurus Rumah Tangga per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

BPS (2020)⁵⁷ mendefinisikan mengurus rumah tangga sebagai “kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.”. Oleh karena itu mengurus rumah tangga dikategorikan bukan angkatan kerja meskipun berada pada usia kerja karena mereka tidak memiliki upah. Besarnya jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga terkonsentrasi di kantong-kantong wilayah yang juga padat penduduk seperti misalnya Jawa Barat dengan besaran 8.5 juta orang. Kemudian disusul oleh Jawa Timur sebesar 5.9 juta, Jawa Tengah 5.1 Juta dan Banten 2.07 juta dan Sumatera Utara 2.03 juta. Kalau dilihat dari proporsi jumlah yang mengurus rumah tangga secara garis besar, Jawa mendominasi sebesar 57,3% di tahun 2020. Sementara kalau kita lihat berdasarkan data yang paling rendah angka orang yang mengurus rumah tangga ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan besaran 108 ribu, kemudian disusul oleh 123 ribu dan Gorontalo 194 ribu. Wilayah-wilayah ini juga

relatif memiliki jumlah penduduk yang kecil jumlahnya.

Mengurus - Agustus 2020



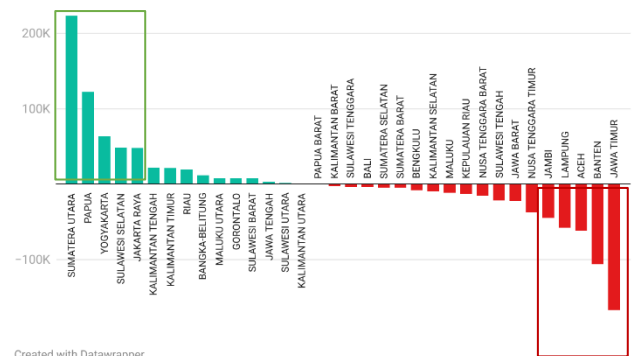
Created with Datawrapper

Map 24: Mengurus per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS 2020)

Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan dari persebaran secara geografis terlihat bahwa jumlah yang mengurus rumah tangga terkonsentrasi paling besar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan NTT dan sebagian kecil pulau Kalimantan dan Sulawesi. Sementara untuk pulau-pulau dengan konsentrasi penduduk relatif rendah dalam mengurus rumah tangga ada di pulau Papua, Maluku sebagian besar pulau Sulawesi (Lihat pada Map 19 bagian atas).

d. Perubahan Mengurus 2019-2020

Mengurus (Perubahan) - Agustus 2019-2020



Created with Datawrapper

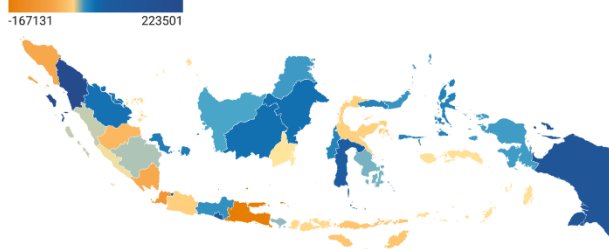
Graph 13: Mengurus Rumah Tangga (Perubahan) – per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sepanjang 2019-2020 terdapat perubahan signifikan terhadap jumlah orang yang mengurus rumah tangga. Ada beberapa

⁵⁷ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

wilayah yang naik secara signifikan ada juga yang turun secara signifikan. Provinsi-provinsi yang naik ada di Sumatera Utara sebesar 223.501, Papua 122.684, Yogyakarta 63.495 dan Sulawesi Selatan 48.747 dan Jakarta 47.806. Sementara kalau kita lihat dari wilayah yang mengalami pengurangan jumlah orang yang mengurus rumah tangga paling besar ada di Jawa timur sebesar 167.131, kemudian menyusul Banten 106017, Aceh 62294, Lampung 58189 dan Jambi 45167.

Mengurus Rumah Tangga (Perubahan) - Agustus 2019-2020



Created with Datawrapper

Map 25: Mengurus Rumah Tangga (Perubahan) – Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sementara kalau kita lihat berdasarkan pada data persebaran geografis terlihat pulau-pulau seperti misalnya Papua, Maluku, sebagian besar Kalimantan, sebagian kecil Sulawesi adalah wilayah dengan pertambahan jumlah orang yang mengurus rumah tangga. Sedangkan wilayah-wilayah yang mengalami penurunan terlihat secara signifikan terlihat di Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB dan sebagian pulau Sumatera.

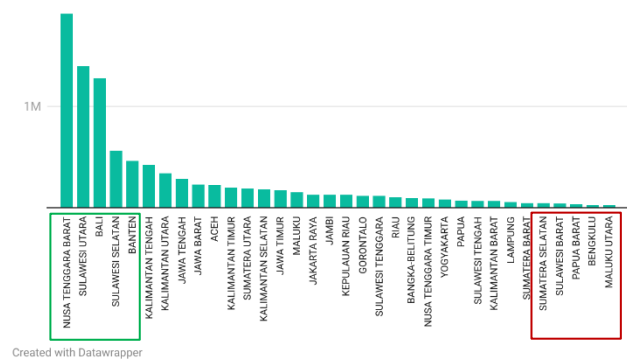
Key Points

- Jumlah perubahan yang mengurus rumah tangga pada tahun 2019-2020 sebanyak 10948.
- Wilayah yang mengalami peningkatan paling besar ada di Sumatera Utara, Papua, Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jakarta.
- Wilayah yang mengalami penurunan adalah Jawa Timur, Banten, Aceh, Lampung dan Jambi.

- Kenaikan jumlah orang yang mengurus rumah tangga terkonsentrasi di Papua, Kalimantan dan Maluku.
- Pulau yang mengalami penurunan secara signifikan ada di pulau Jawa, Sumatera, Bali dan NTT

e. Lainnya

Lainnya - Agustus 2020



Created with Datawrapper

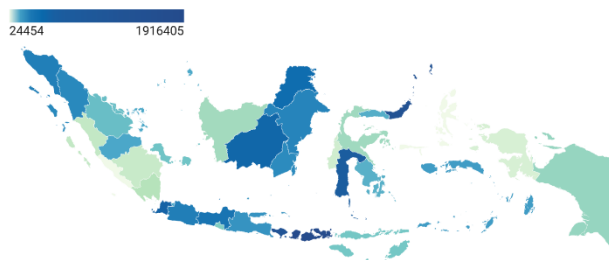
Graph 14: Kegiatan Lainnya – Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Kegiatan lainnya yang dimaksud pada bagian ini didefinisikan oleh BPS (2020) adalah orang yang sudah pensiun, orang yang memiliki catat jasmani baik itu buta, bisa ataupun yang lain, yang kemudian tidak memungkinkan mereka untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Kalau terlihat dari data BPS (2020) wilayah dengan pertambahan Kegiatan Lainnya termasuk Nusa Tenggara Barat, sebanyak 1.916.405. Jumlah ini relatif cukup besar. Kemudian disusul oleh Sulawesi Utara sebanyak 1.397.017, Bali 1.280.029 dan Sulawesi Selatan sebanyak 562.599 serta Banten 459.833. Sementara untuk wilayah terendah mencakup provinsi Maluku Utara sebanyak 24.454, kemudian Bengkulu 24.642 dan Papua Barat sebanyak 353.64.

Data yang terlihat dari Map 21, cukup menarik karena kalau kita lihat berdasarkan pemetaan dari segi geografis terlihat bahwa persebaran wilayah dengan tingkat tertinggi penduduk yang melakukan pekerjaan lainnya berada di pulau Jawa, Bali dan NTB

sebagian besar pulau Kalimantan, sebagian kecil pulau Sulawesi. Kemudian kalau kita berdasarkan kepulauan dengan kepadatan terkecil maka terlihat bahwa Papua, NTB dan sebagian besar pulau Sumatera.

Lainnya - Agustus 2020



Created with Datawrapper

Map 26: Kegiatan Lainnya – Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

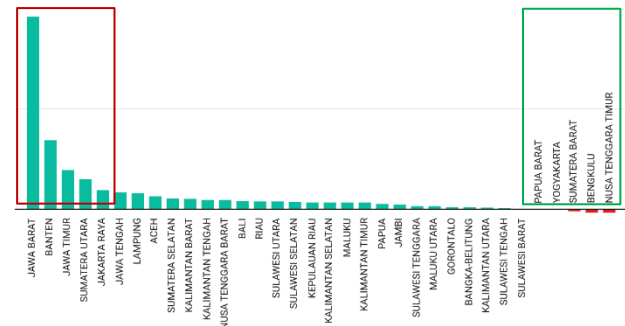
Ini patut menjadi perhatian apakah diwilayah-wilayah yang tinggi pekerjaan lainnya memiliki permasalahan seperti kesehatan atau memang diwilayah ini tingkat pensiun cukup tinggi.

Key Points

- Wilayah yang paling besar melakukan Kegiatan Lainnya adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Selatan dan Banten.
- Untuk wilayah yang paling rendah adalah Maluku Utara, Bengkulu, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Sumatera Selatan.
- Pulau dengan tingkat tertinggi penduduk yang melakukan pekerjaan lainnya berada di pulau Jawa, Bali dan NTB sebagian besar pulau Kalimantan, sebagian kecil pulau Sulawesi.
- Pulau yang paling rendah ada di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Sumatera.

f. Perubahan Lainnya 2019-2020

Lainnya (Perubahan) - Agustus 2019-2020



Created with Datawrapper

Graph 15: Perubahan Lainnya (2019-2020) (Data diolah dari BPS, 2020).

Berdasarkan dari data tersebut di atas terjadi perubahan secara signifikan antara Agustus 2019-2020. Provinsi yang mengalami kenaikan sangat signifikan adalah Jawa Barat sebanyak 383.498, kemudian disusul oleh Banten 137758. Terlihat bahwa Jawa Barat tiga kali lipat lebih besar pertambahannya dibandingkan dengan Banten. Setelah Banten, disusul oleh Jawa Timur, Sumatera Utara dan kemudian Jakarta. Sedangkan kalau kita lihat dari yang mengalami pengurangan ada di empat wilayah berbeda. Provinsi-provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur -6966, Bengkulu -6957, Sumatera Barat -3805, Yogyakarta -996, Papua Barat -661.

Perubahan Lainnya - Agustus 2019-2020



Created with Datawrapper

Map 27: Perubahan Lainnya – Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sementara berdasarkan data persebaran geografis terlihat bahwa konsentrasi peningkatan Lainnya, terdapat paling banyak

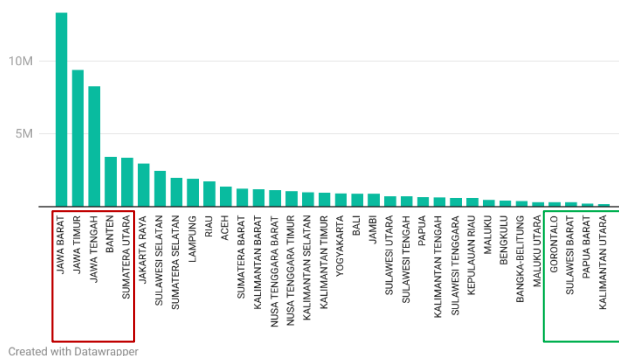
di pulau Jawa, kemudian Sumatera, Bali dan NTB serta sebagian besar Kalimantan, sebagian kecil Sulawesi. Sedangkan pulau yang perubahannya cenderung kecil ada di Pulau Papua, Maluku, dan sebagian besar pulau Sulawesi.

Key Points

- Pertambahan paling tinggi untuk komponen Lainnya terjadi di Jawa Barat, sebanyak 383.498
- Pengurangan paling besar ada di Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, Yogyakarta, dan Papua Barat.
- Dari segi geografis kepulauan, Jawa, Sumatera, Bali, NTB dan Kalimantan mengalami cenderung mengalami kenaikan.
- Papua, NTT, Maluku dan Sebagian besar Sulawesi cenderung peningkatannya tidak signifikan

g. Jumlah BAK

Bukan Angkatan Kerja - Agustus 2020

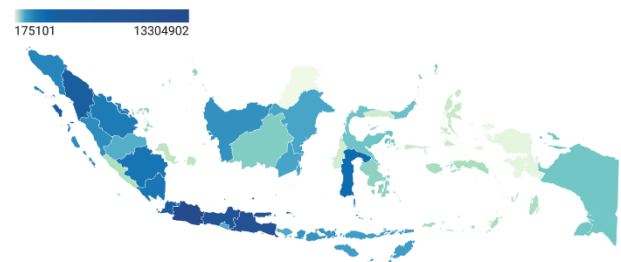


Graph 16: Bukan Angkatan Kerja per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Pertama yang harus kita pahami adalah definisi dari penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja. Menurut (BPS, 2020) "Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus

rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi."⁵⁸. Kalau kita lihat dari data pada Graph 16, maka terlihat provinsi yang paling besar jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah Jawa Barat sebanyak 13.304.902. Jumlah ini cukup besar jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang Cuma dengan 9.39 juta. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah 8,25 juta, dan Banten 3,42 juta, serta Jakarta 2,96 juta. Terlihat juga dari data bahwa 57% dari jumlah keseluruhan BAK berada di pulau Jawa. Ini berarti beban secara ekonomi terutama dalam distribusi pendapatan juga lebih berat di Jawa. Sementara untuk provinsi yang terendah adalah Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Gorontalo yang masing-masing berada di bawah 300 ribuan.

Bukan Angkatan Kerja - Agustus 2020



Created with Datawrapper

Map 28: Bukan Angkatan Kerja per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

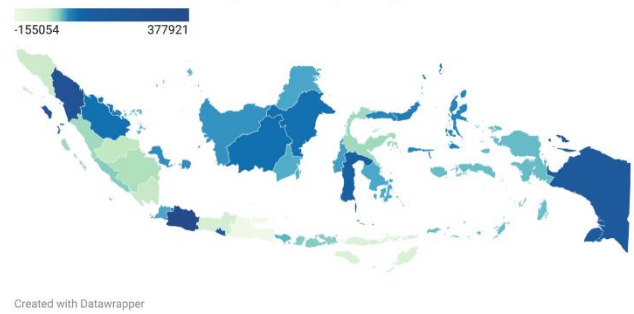
Sementara kalau kita lihat berdasarkan peta persebaran secara geografis terlihat bahwa pulau Jawa dan Sumatera yang paling banyak BAKnya. Meskipun demikian juga ada di beberapa pulau lain seperti di Sulawesi Selatan yang cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat wilayah dengan BAK terendah ada di Papua, Maluku, sebagian besar wilayah Sulawesi dan Kalimantan (Lihat lebih lanjut pada Map 23 di atas).

58 <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

Key Points

- Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah BAK paling tinggi
- BAK paling rendah ada di Kalimantan Utara
- 57% BAK berada di Jawa
- Pulau yang memiliki BAK yang tinggi adalah Jawa, dan Sumatera
- Pulau dengan BAK rendah ada di Indonesia timur termasuk Papua, Maluku dan Sulawesi.

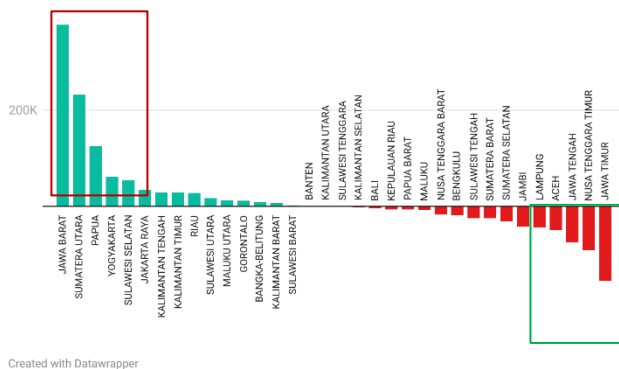
Perubahan Bukan Angkatan Kerja - Agustus 2019-2020



Map 29: Perubahan Jumlah Bukan Angkatan Kerja per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

h. Perubahan Jumlah BAK 2019-2020

Perubahan Bukan Angkatan Kerja - Agustus 2019-2020



Graph 17: Perubahan Jumlah Bukan Angkatan Kerja per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Jawa Barat mengalami perubahan paling signifikan dengan pertambahan jumlah BAK dari tahun 2019-2020 sebesar 377.921 orang. Disusul oleh Sumatera Utara 232.561 dan Papua 124.761, Yogyakarta 61.957 dan Sulawesi Selatan 53.974. Sementara untuk wilayah dengan pengurangan BAK paling signifikan adalah Jawa Timur sebesar -155054, disusul kemudian oleh NTT -90971 dan Jawa Tengah -75309, serta Aceh, Lampung dan Jambi yang masing-masing berada di rentang 40 ribuan.

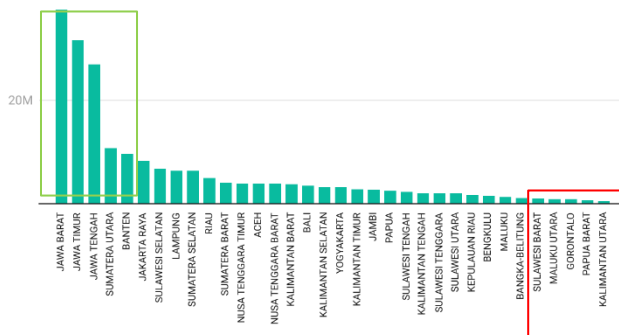
Sementara kalau kita lihat dari persebaran geografis terlihat bahwa pulau yang mengalami kenaikan BAK ada di pulau Papua, Kalimantan dan sebagian pulau Sulawesi. Sementara untuk pulau yang mengalami pengurangan BAK ada di sebagian besar NTT, NTB dan sebagian besar pulau Jawa dan Sumatera.

Key Points

- Pertambahan jumlah BAK paling besar ada di Jawa Barat
- Pengurangan jumlah BAK paling besar ada di Jawa Timur
- Pulau penambahan BAK ada di Kalimantan, Papua, dan sebagian besar pulau Sulawesi
- Pulau dengan pengurangan BAK ada di Jawa, NTT, NTB dan sebagian besar pulau Sumatera

i. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas - 2020



Created with Datawrapper

Graph 18: Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

BPS (2020)⁵⁹ mengategorikan orang yang berusia di atas 15 tahun sebagai orang penduduk usia kerja. Sementara penduduk yang masuk angkatan kerja adalah penduduk yang berusia di atas 15 tahun atau lebih yang memiliki pekerjaan, atau orang yang memiliki pekerjaan namun sementara lagi tidak bekerja dan menganggur (BPS, 2020). Berdasarkan dari penjelasan tersebut kalau kita lihat dari data BPS (2020) di atas terlihat bahwa penduduk di usia 15 tahun ke atas di tahun 2020 paling besar ada di Jawa Barat yaitu 37.5 juta orang, kemudian disusul oleh Jawa Timur sebanyak 31.6 juta orang, Jawa Tengah 27 juta, Sumatera Utara 10.7 juta dan Banten 9,7 juta. Sementara untuk provinsi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas paling sedikit ada di Kalimantan Utara sebesar 522.832, Papua Barat 708.669 dan Gorontalo 893.745.

Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas - Agustus 2020



Created with Datawrapper

Map 30: Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Kalau kita lihat persebaran geografis secara geografis terlihat bahwa pulau Jawa merupakan pulau terpadat dengan jumlah penduduk di atas 15 tahun sebanyak 114 juta dari 203 juta penduduk usia di atas 15 tahun ke atas. Ini berarti bahwa 56% penduduk usia di atas 15 tahun ke atas terkonsentrasi dipulau Jawa. Kemudian disusul oleh Kalimantan dengan jumlah penduduk di atas 15 tahun ke atas sebanyak 37 juta orang. Setelah itu kemudian di sebagian kecil pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan sebanyak 6,7 juta orang. Sedangkan kalau kita lihat pulau dengan jumlah penduduk di atas 15 tahun paling sedikit ada di Indonesia Timur termasuk Papua, Maluku dan Sulawesi.

Key Points

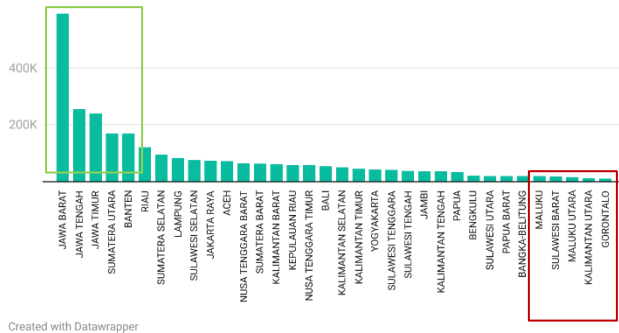
- Penduduk di atas 15 tahun ke atas ada di provinsi Jawa Barat sebanyak 37.5 juta orang.
- Provinsi dengan jumlah paling sedikit ada di Kalimantan Utara sebanyak 522 ribu
- Jumlah penduduk di atas 15 tahun ke atas paling banyak ada di Jawa setara dengan 56% atau 114 juta secara keseluruhan
- Pulau paling padat jumlah penduduk di atas 15 tahun ke atas ada di Jawa dan Sumatera

⁵⁹ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

- Sementara pulau paling sedikit ada di Papua, Maluku dan Sulawesi

j. Perubahan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (2019-2020)

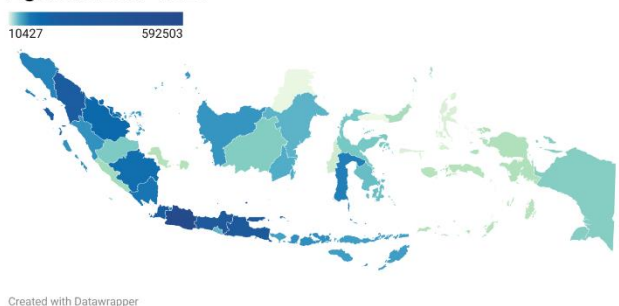
Perubahan Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas - Agustus 2019-2020



Graph 19: Perubahan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa provinsi dengan pertambahan jumlah penduduk di atas 15 tahun yang potensial menjadi tenaga kerja adalah Jawa Barat dengan total pertambahan selama kurung waktu 2019-2020 sebanyak 592.503, kemudian disusul oleh Jawa Tengah 254.775 dan Jawa Timur 241.316. Sedangkan untuk wilayah dengan pertambahan usia di atas 15 tahun paling sedikit ada di Gorontalo sebanya 10.427, kemudian disusul oleh Kalimantan Utara 11.885 dan Maluku Utara 15.115.

Perubahan Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas - Agustus 2019-2020



Map 31: Perubahan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas per Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

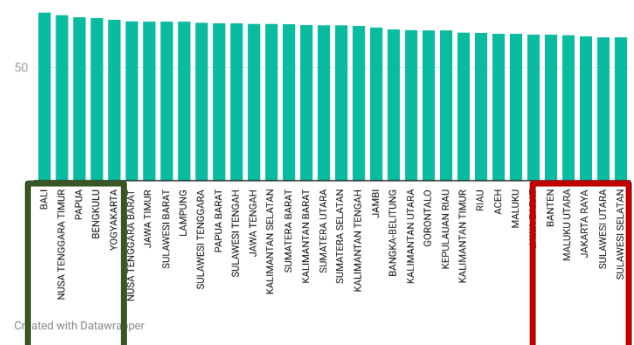
Sementara kalau kita lihat berdasarkan persebaran geografis terlihat bahwa pulau seperti Jawa dan Sumatera merupakan pulau yang mengalami pertambahan paling signifikan atas jumlah penduduk usia di atas 15 tahun ke atas dari tahun 2019-2020. Sementara kalau wilayah dengan pertambahan paling sedikit ada di Indonesia bagian timur termasuk Papua, Maluku dan Sulawesi.

Key Points

- Provinsi dengan jumlah pertambahan usia di atas 15 tahun paling banyak adalah Jawa Barat 592.503
- Provinsi dengan pertambahan paling sedikit adalah Gorontalo
- Pulau paling banyak pertambahan usia di atas 15 tahun keta adalah Jawa dan Sumatera
- Pulau paling sedikit ada di Papua, Maluku dan Sulawesi

k. Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) 2020

Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) - Agustus 2020



Graph 20: Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) per Agustus 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia kerja (TPAK) adalah persentase dari jumlah penduduk usia kerja masuk pada kategori angkatan kerja. Ini sebabkan ada beberapa faktor yang

menyebabkan usia di atas 15 tahun tidak bisa dikategorikan sebagai angkatan kerja seperti misalnya, ada cacat dan pensiun, mengurus rumah tangga dan sekolah.

Berdasarkan dari data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah TPAK paling besar ada di Bali, sebanyak 74%. Ini berarti dari 100% usia di atas 15 tahun di Bali, 74%nya menjadi produktif karena terkategori sebagai angkatan kerja. Bali juga di atas rata-rata persentase nasional yaitu 67.76%. Meskipun sebenarnya secara persentase nasional dari angka 67,76% tersebut cukup rendah. Ini berarti 32% dari usia di atas 15 tahun di Indonesia tidak termasuk angkatan kerja. Sementara kalau kita lihat dari Bali, hanya 26% yang tidak masuk menjadi angkatan kerja. Setelah Bali kemudian menyusul NTT sebesar 73%, Papua 72%, Bengkulu dan Yogyakarta masing-masing 71%. Sementara untuk provinsi yang paling rendah persentase usia di atas 15 tahun yang menjadi angkatan kerja adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Jakarta yang masing-masing 63%. Ini berarti provinsi-provinsi ini berada 4-5% di bawah rata-rata nasional. Setelah itu kemudian disusul oleh Maluku Utara, Banten dan Jawa Barat yang masing-masing berada di sekitar 64%. Ini menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian untuk mencari penyebab kenapa provinsi-provinsi tersebut usia anak di atas 15 tahun memiliki potensi besar untuk tidak masuk menjadi usia produktif.

Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) - Agustus 2020



Map 32: Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) per Agustus 2020

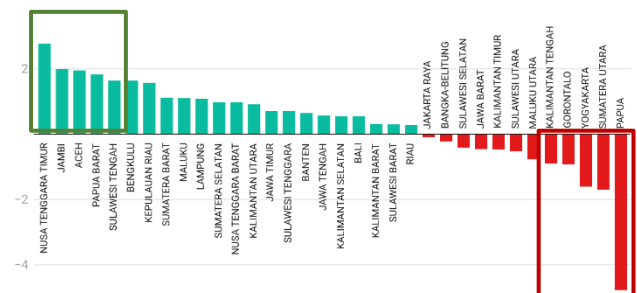
Sementara kalau kita melihat berdasarkan persebaran geografis maka pulau seperti Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua dan sebagian Sulawesi adalah pulau dengan angka TPAK yang cukup tinggi. Sementara untuk pulau dengan TPAK rendah termasuk Maluku, Kalimantan dan sebagian Sumatera.

Key Points

- Provinsi Bali dengan TPAK paling tinggi
- Provinsi Sulawesi Selatan dengan TPAK paling rendah
- TPAK nasional sebesar 67,76%
- Pulau dengan TPAK terpadat ada di Papua, Jawa, Bal, NTT dan NTB
- Pulau dengan TPAK rendah ada di Maluku, Sulawesi, serta sebagian Kalimantan dan Sumatera

I. Perubahan Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) (2019-2020)

Perubahan Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) - Agustus 2019-2020



Created with Datawrapper

Graph 21: Perubahan Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) – Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sementara kalau kita lihat berdasarkan pada perubahan TPAK antara tahun 2019-2020, ada beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami pertambahan jumlah TPAK dan ada juga beberapa wilayah yang mengalami pengurangan TPAK. Provinsi dengan

pertambahan TPAK paling tinggi ada di NTT sebesar 2,76%. Kemudian disusul oleh Jambi dan Aceh yang masing-masing di 1.9%, serta Papua Barat di 1.83%. Sedangkan provinsi dengan pengurangan paling besar ada di Papua sebesar -4.76%, kemudian Sumatera Utara -1,6% dan Yogyakarta -1.59%. Jadi kalau kita berdasarkan pada perubahan rata-rata nasional TPAK ada di kisaran 0.56% antara tahun 2019-2020. Wilayah yang dari segi angka yang memiliki kesamaan dengan perubahan persentase nasional adalah Kalimantan Selatan, Bali dan Jawa Tengah.

Perubahan Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) - Agustus 2019-2020



Map 33: Perubahan Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) – Agustus 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sementara kalau kita lihat berdasarkan persebaran geografis maka terlihat perubahan TPAK paling tinggi (pertambahan) ada di pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua Barat, Maluku dan sebagian besar pulau Sumatera. Sementara Kalimantan, Papua, Maluku Utara dan sebagian Sulawesi adalah pulau yang mengalami pengurangan TPAK.

Key Points

- Rata-rata perubahan TPAK 2019-2020 adalah 0.56%
- Provinsi dengan pertambahan paling besar adalah NTT dan Jambi
- Provinsi dengan pengurangan TPAK terbesar adalah Papua -4,7%

- Pulau dengan perubahan paling besar tersebar secara acak di NTB, NTT, Papua dan Sumatera
- Pulau dengan pengurangan terlihat di Kalimantan, Jawa, Maluku Utara, sebagian Sulawesi dan Papua.

7. Takeaways

Key Points	
• Jumlah yang bekerja top 5 paling sedikit ada di Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Namun yang paling rendah adalah Papua Barat. Ini berarti wilayah dengan jumlah pekerja paling sedikit terletak di luar Jawa, tepatnya di Wilayah Indonesia Timur dan sebagian kecil di wilayah Indonesia Bagian Barat.	↓ • Papua Barat • Kalimantan Utara • Maluku Utara • Gorontalo • Sulawesi
• Jumlah penduduk yang bekerja paling tinggi ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa tengah, Sumatera Utara dan Banten. Ini menunjukkan bahwa wilayah Jawa memiliki kapasitas serapan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.	↑ • Papua Barat • Kalimantan Utara • Maluku Utara • Gorontalo • Sulawesi
• Jumlah pengangguran paling tinggi ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Misalnya Jawa Barat jauh lebih tinggi 7,234,678 dari angka rata-rata nasional.	↑ • Jawa Barat • Jawa Timur • Jawa Tengah
• Sementara Jumlah Pengangguran paling rendah adalah seluruh Indonesia adalah Bali, Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Data ini jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 9.767.754 jauh lebih rendah.	↓ • Bali • Aceh • Kalimantan Utara

PART III

KEMISKINAN

C. Kemiskinan

World Bank melihat kemiskinan sebagai hilangnya kesejahteraan⁶⁰. Sementara menurut TNP2K memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk bisa memenuhi standar hidup tertentu⁶¹. Secara umum, terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk menentukan garis kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, relatif dan multidimensi. World Bank mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi hidup di bawah US\$1.90 (setara dengan Rp26596.67/kurs 8 Februari 2020) per orang per hari⁶².

Negara-negara berkembang cenderung menggunakan pendekatan kemiskinan *absolute*. Pada pendekatan ini, angka kemiskinan akan turun ketika terjadi peningkatan pendapatan naik pada tingkat yang sama. Sementara untuk kemiskinan relatif. Sementara untuk negara-negara maju biasanya menggunakan pendekatan kemiskinan relatif. Negara-negara maju biasanya menggunakan nilai konstan terhadap pendapatan rata-rata suatu wilayah. Sehingga kemiskinan ditentukan berdasarkan kesepakatan untuk masyarakat dengan melihat masyarakat dengan pendapatan di bawah rata-rata. Sementara untuk konsep kemiskinan multidimensi menjadi alternatif yang digunakan untuk mengkritik pendekatan moneter.

Pendekatan moneter dianggap tidak menyeluruh. Dimensi tersebut termasuk keterbatasan akses pada kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang

kemudian dijabarkan dalam sepuluh indikator. Masyarakat yang tidak dapat mengakses 30 persen dari indikator tersebut kemudian dimasukkan dalam kelompok masyarakat tertinggal⁶³. Garis kemiskinan di Indonesia merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dan non makanan⁶⁴.

Untuk garis kemiskinan makanan dihitung berdasarkan 2100 kalori per kapita per hari. Sementara untuk paket kebutuhan dasar makanan dimasukkan pada makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi termasuk padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Garis kemiskinan non-makanan dilihat dari kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Ada 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 di pedesaan.

1. Faktor-Faktor Penyebab Tingkat Kemiskinan per 2020

Terdapat beberapa faktor-faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan Indonesia terkhusus untuk tahun 2020.

Pertama adalah pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, kesehatan, sosial dan pendapatan penduduk yang berimplikasi pada penambahan orang miskin baru. Pandemi Covid-19 menghantam seluruh lapisan masyarakat dan terdapat pada masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa 7 dari 10 responden dari kalangan masyarakat menengah ke bawah mengalami penurunan pendapatan. Sementara untuk masyarakat menengah ke bawah menunjukkan 3 dari 10

60 Houghton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on poverty+ inequality*. World Bank Publications.

61 <http://www.tnp2k.go.id/download/79169WP480304FINAL.pdf>

62 <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/08/ending-extreme->

poverty#:~:text=The%20World%20Bank%20defines%20%E2%80%9Cextreme,extreme%20poverty%20can%20be%20achieved.

63 <http://www.tnp2k.go.id/download/79169WP480304FINAL.pdf>

64 <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

responden mengalami penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19.

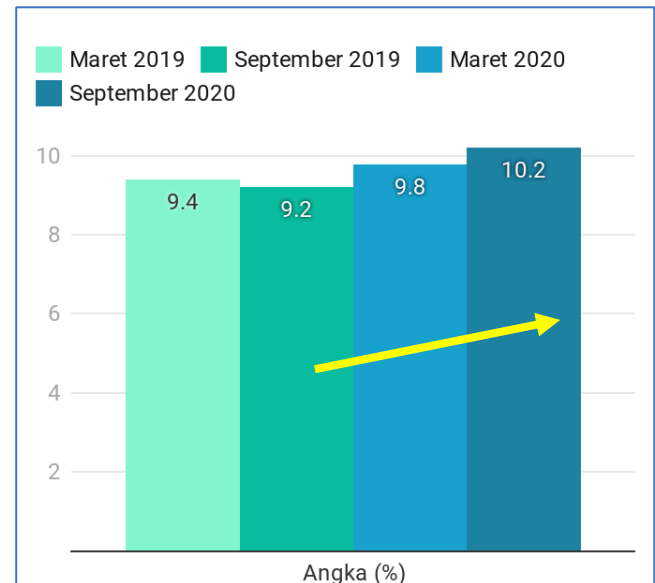
Kedua, pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke III 2020 mengalami kontraksi 3,49% dan komponen utama dari pertumbuhan ekonomi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 56% berkontraksi 4.05%. Ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup besar. Ini juga mengindikasikan adanya pelemahan daya beli dari sektor rumah tangga.

Ketiga, dari sisi inflasi memang menurun tajam karena pandemi Covid-19 menghantam dari dua sisi yaitu *demand* dan *supply*. Tercatat tingkat **inflasi** tahun (Januari–Januari) **2021** sebesar 0,26 persen dan tingkat **inflasi** tahun ke tahun (Januari **2021** terhadap Januari 2020) sebesar 1,55 persen⁶⁵. Keempat adalah perubahan harga eceran beberapa barang komoditas pokok. Pada periode Maret 2020–September 2020 secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan antara lain seperti daging sapi, susu kental manis, minyak goreng, tepung terigu dan ikan kembung. Selain itu juga terdapat beberapa komoditas pokok yang mengalami penurunan harga termasuk beras, daging dan telur ayam ras, gula pasir, dan cabai rawit.

2. Perkembangan Kemiskinan

a. Perkembangan Kemiskinan Maret 2019 – September 2020

Perkembangan Kemiskinan Maret 2019–September 2020



Graph 22: Perkembangan Kemiskinan (persen) per Maret 2019-2020 dan September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa terjadi kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1,84% pada Agustus 2020 jika dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya. Dari peningkatan jumlah pengangguran yang juga merupakan imbas dari pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan banyaknya orang yang kehilangan jumlah pekerjaan. Namun juga mengalami pengurangan jam kerja yang berimplikasi pada jumlah pendapatan masyarakat. Data menunjukkan terdapat 24,03 juta penduduk yang harus mengalami pengurangan jam kerja (*shorter hours*).

Secara keseluruhan terdapat 29,12 juta orang yang terdampak penghasilannya karena Covid-19. Ini sudah barang tentu

⁶⁵<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/01/1760/inflasi-terjadi-pada-januari-2021-sebesar-0-26-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-mamuju-sebesar-1-43-persen->

[.html#:~:text=Tingkat%20inflasi%20tahun%20kalender%20\(Januari,\)%20sebesar%201%2C55%20persen.](#)

berkontribusi terhadap kenaikan angka kemiskinan yang dari posisi 24,79 juta orang pada bulan September 2020 naik menjadi 27,55 juta orang pada bulan September 2020. Ini berarti terjadi kenaikan angka kemiskinan sebesar 2,76 juta orang. Dengan demikian 10,19% dari total penduduk di Indonesia masuk dalam kategori miskin. *Outlook* ini sebenarnya jauh lebih baik karena pemerintah sudah merancang program perlindungan sosial untuk mencegah kenaikan angka kemiskinan secara tajam. Hasil kajian dari World Bank (2020) menunjukkan bahwa tanpa program bantuan sosial yang tepat maka di prediksi akan ada penambahan 5.5 juta sampai 8 juta orang miskin baru di Indonesia⁶⁶.

Key Points

- Terjadi kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1,84% pada Agustus 2020 jika dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya
- Secara keseluruhan terdapat 29,12 juta orang yang terdampak penghasilannya karena Covid-19
- Terjadi kenaikan angka kemiskinan yang dari posisi 24,79 juta orang pada bulan September 2020 naik menjadi 27,55 juta orang pada bulan September 2020
- Terjadi kenaikan angka kemiskinan sebesar 2,76 juta orang. Dengan demikian 10,19% dari total penduduk di Indonesia masuk dalam kategori miskin

b. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (September 2020)

Data pada Tabel 12 menunjukkan persebaran angka penduduk miskin pada September 2020. Dari data tersebut menunjukkan posisi **Pertama** angka

kemiskinan tertinggi ada di Jawa Timur menempati posisi utama dengan jumlah penduduk miskin paling besar yaitu 4,586 ribu orang. Persentase penduduk miskin di pedesaan lebih besar jika dibandingkan dengan perkotaan yang hanya sebesar 1.820 jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan di mana 52% jauh lebih besar yaitu 2.766 orang.

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa), September 2020

	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah
1	Jawa Barat 3,005	Jawa Timur 2,766	Jawa Timur 4,586
2	Jawa Tengah 1,890	Jawa Tengah 2,229	Jawa Barat 4,189
3	Jawa Timur 1,820	Jawa Barat 1,184	Jawa Tengah 4,120
4	Sumatera Utara 756	Nusa Tenggara Timur 1,055	Sumatera Utara 1,357
5	Banten 540	Papua 868	Nusa Tenggara Timur 1,174
6	DKI Jakarta 497	Lampung 832	Sumatera Selatan 1,120
7	Sumatera Selatan 404	Sumatera Selatan 715	Lampung 1,091
8	Nusa Tenggara Barat 390	Aceh 649	Papua 912
9	DI Yogyakarta 353	Sulawesi Selatan 605	Banten 858
10	Lampung 259	Sumatera Utara 600	Aceh 834
11	Indonesia 12,039	Indonesia 15,511	Indonesia 27,550

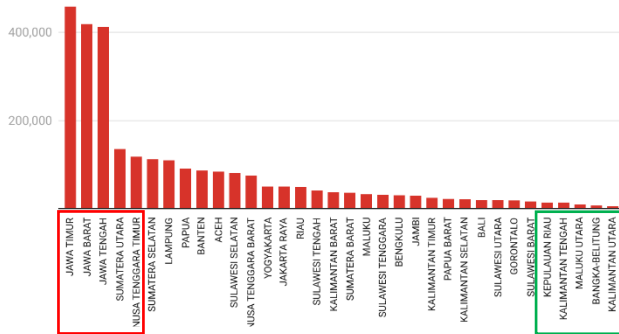
Created with Datawrapper

Table 14: Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa) (Data diolah dari BPS 2020)⁶⁷

⁶⁶<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34738/Ex-ante-Poverty-and-Distributional-Impacts-of-COVID-19-in-Indonesia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁶⁷ <https://www.bps.go.id/indikator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>

**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa)-
September 2020**



Graph 23: Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa) – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

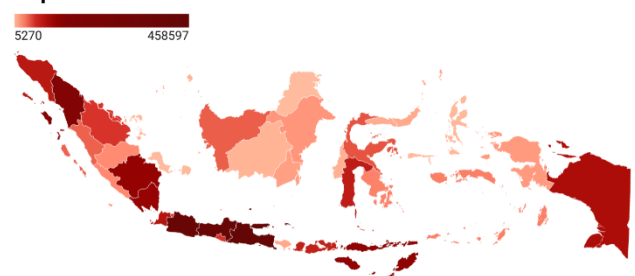
Angka kemiskinan terbesar **Kedua** adalah Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin 4189 ribu orang. Ini tidak jauh berbeda dengan angka kemiskinan di Jawa Timur dengan selisih 397 ribu orang saja. Sementara perbandingan angka kemiskinan perkotaan sebesar 3.005 ribu orang, sedangkan di pedesaan cuma 1.184 ribu di Jawa Barat. Ini berarti angka kemiskinan tiga kali lipat di perkotaan dibandingkan dengan kemiskinan di pedesaan.

Angka kemiskinan **Ketiga** terbesar ada di Jawa Tengah yaitu sebanyak 4120 ribu orang. Persebaran angka kemiskinan di Jawa Tengah memiliki kemiripan dengan Jawa Timur di mana angka kemiskinan jauh lebih besar di wilayah pedesaan dengan besaran 2,229 ribu dibandingkan dengan perkotaan sebesar 1,890 ribu orang.

Posisi **Keempat** adalah Sumatera Utara dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1,357 ribu orang dengan persebaran kemiskinan di paling besar ada di perkotaan sebesar 756 ribu orang sedangkan di pedesaan 600 ribu orang. Dari angka ini kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan 26% antara kemiskinan perkotaan dan pedesaan di Sumatera Utara.

Posisi **Kelima** adalah Nusa Tenggara Timur dengan jumlah masyarakat miskin sebesar 1,174 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di NTT lebih terkonsentrasi di wilayah pedesaan yaitu 1,055 ribu orang sedangkan di perkotaan terdapat 118.88 ribu orang. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi angka kemiskinan paling besar berada di wilayah pedesaan. Ini bisa menjadi rujukan pendekatan yang berbeda terutama dalam langkah-langkah pemberdayaan perekonomian pedesaan yang lebih difokuskan untuk menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah tersebut. Namun demikian juga ini bisa mengindikasikan bahwa perkembangan perekonomian perkotaan juga rendah karena biasanya perkembangan perekonomian perkotaan akan memicu perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan yang pada akhirnya akan menyebabkan jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah.

**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa)-
September 2020**



Map 34: Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa) – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).

Kalau berdasarkan dari data persebaran kemiskinan maka terlihat jelas secara demografi penduduk miskin paling besar berada di wilayah Jawa. Sementara untuk sifatnya menengah tersebar di wilayah Indonesia bagian Indonesia Barat dan beberapa bagian di Indonesia Timur. Sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah terutama di kepulauan Kalimantan dan Sulawesi (terkecuali Sulawesi Selatan) jumlah penduduk miskin relatif rendah.

Key Points

- Jumlah penduduk miskin paling banyak pada September 2020 berada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
- Kemiskinan perkotaan paling besar berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten
- Kemiskinan pedesaan paling besar berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Selama pandemi Covid-19 pemerintah pusat dan daerah sudah menyediakan dana khusus sekaligus merancang program bantuan sosial untuk membantu masyarakat dimasa pandemi terutama untuk masyarakat tidak mampu. Program tersebut termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pagu sebesar Rp695,2 triliun. Program PEN ditujukan untuk enam program utama termasuk program Kesehatan, Perlindungan Sosial, Sektoral K/L Pemda, Dukungan UMKM, Pembiayaan Korporasi dan Insentif Usaha. Dari keseluruhan anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp460 triliun atau 66,1% dari pagu anggaran. Dari keenam program PEN tersebut, Perlindungan Sosial mendapat proporsi paling besar Rp230,66 triliun kemudian disusul oleh Insentif Usaha Rp120,61 triliun dan Dukungan UMKM mendapatkan Rp115,83triliun. Sementara untuk program PEN 2021 pagu anggaran sebesar Rp372,3 triliun yang dibagi untuk enam program utama termasuk Kesehatan sebesar Rp25,40 triliun, Perlindungan Sosial Rp110,2 triliun, Sektoral K/L & Pemda Rp136,7 triliun, UMKM 48,8triliun, Pembiayaan Korporasi Rp14,9 triliun dan Insentif Usaha Rp20,40 triliun. Selain program tersebut di atas pemerintah juga meluncurkan program kartu Prakerja untuk membekali calon pekerja dengan

keterampilan agar memiliki kemampuan untuk memasuki dunia kerja. Program-program ini dianggap mampu menekan kenaikan angka kemiskinan yang diperkirakan akan sangat tajam apabila tidak ada program bantuan sosial dalam skala besar untuk memitigasi akibat dari pandemi Covid-19.

Key Points:

- Jumlah Penduduk Miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, naik 1,13 juta orang terhadap bulan Maret 2020 dan naik 2,76 juta orang terhadap September 2019.
- Persentase Penduduk Miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, naik 0,41% poin terhadap Maret 2020 dan naik 0,97 persen poin terhadap September 2019

Pandemi Covid-19 yang berimbas pada pembatasan mobilitas penduduk memberikan dampak yang beragam pada tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2020 naik 1,32% jika dibandingkan dengan September 2019. Sedangkan untuk angka kemiskinan pedesaan pada September 2020 naik 0,60% jika dibandingkan dengan September 2019. Meskipun kalau dilihat secara keseluruhan tingkat kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar per September 2020 yakni 13,20% dibandingkan dengan tingkat kemiskinan perkotaan yang hanya 7,88% per September 2020. Ini berarti bahwa secara umum, persentase masalah kemiskinan tanpa adanya pandemi Covid-19 terkonsentrasi pada wilayah pedesaan. Sementara selama masa pandemi, imbas kemiskinan berimbas paling besar pada wilayah perkotaan. Ini diakibatkan oleh perputaran ekonomi diwilayah perkotaan sangat ditopang oleh

sektor perdagangan, infokom dan pengolahan dan jasa⁶⁸.

Key Points:

Perubahan Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (September 2019 – September 2020)

- Perkotaan naik sebesar 1,32% poin
- Pedesaan naik sebesar 0,60% poin

3. Garis Kemiskinan

a. Garis Kemiskinan Menurut Provinsi

Dari Maret ke September 2020 terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 0,94% yaitu dari Rp.454.652 per kapita per bulan Maret naik ke Rp458.947 per kapita per bulan pada September 2020⁶⁹. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp4,295. Dari komposisi tersebut 73,87% untuk komoditas makanan. Dengan demikian komoditas pangan seperti beras tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Adapun komoditas yang memberikan kontribusi pada garis kemiskinan terutama berasal dari beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk & dan kopi instan (*sached*), kue basah, tempe, dan tahu. Sementara untuk komoditi bukan makanan berasal didominasi oleh perumahan, bensin, listrik, disusul oleh pendidikan dan perlengkapan mandi. Sementara untuk garis kemiskinan per Rumah Tangga yang bisa diperoleh dengan mengalikan garis kemiskinan per kapita dengan rata-rata anggota rumah tangga. Sehingga garis kemiskinan per Rumah Tangga secara nasional tercatat sebesar Rp2,2 juta per bulan, sementara untuk DKI sebesar Rp3,9 juta dan Sulawesi Selatan yang memiliki banyak kabupaten

sebesar Rp1,77 juta per rumah tangga per bulan. Dari data BPS menunjukkan hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami kenaikan kemiskinan dari 9,22% September 2019 ke 10,19% di September 2020.

Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan), September 2020

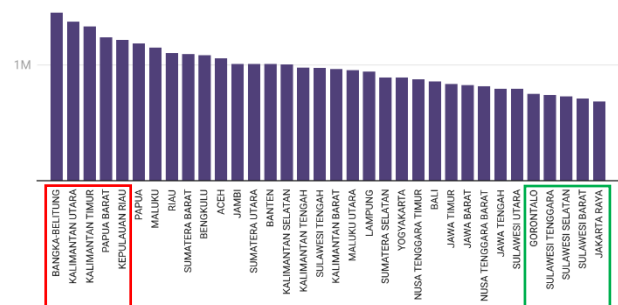
	Perkotaan		Pedesaan		Nasional		Pertambahan 2019-2020	
1	KALIMANTAN UTARA	723,478	KEP BANGKA BELITUNG	736,850	KEP BANGKA BELITUNG	1,460,328	KALIMANTAN TENGAH	69,227
2	KEP BANGKA BELITUNG	716,460	KALIMANTAN TIMUR	656,069	KALIMANTAN UTARA	1,372,529	BANTEN	65,460
3	DKI JAKARTA	683,339	KALIMANTAN UTARA	649,761	KALIMANTAN TIMUR	1,333,100	MALUKU	62,097
4	KALIMANTAN TIMUR	675,399	PAPUA BARAT	602,290	PAPUA BARAT	1,277,689	KALIMANTAN TIMUR	60,067
5	PAPUA BARAT	635,539	KEP RIAU	597,899	KEP RIAU	1,233,438	KALIMANTAN SELATAN	50,354
6	PAPUA	622,346	MALUKU	566,497	PAPUA	1,188,843	KALIMANTAN UTARA	50,242
7	KEP RIAU	619,461	PAPUA	562,412	MALUKU	1,181,873	PAPUA BARAT	47,913
8	MALUKU	584,061	SUMATERA BARAT	529,673	RIAU	1,113,734	LAMPUNG	47,672
9	BENGKULU	576,921	RIAU	528,735	SUMATERA BARAT	1,105,656	SULAWESI TENGGARA	47,662
10	RIAU	572,856	ACEH	514,663	BENGKULU	1,087,519	NUSA TENGGARA TIMUR	47,112
11	INDONESIA	475,477	INDONESIA	437,902	INDONESIA	913,379	INDONESIA	36,484

Created with Datawrapper

Table 15: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan), September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁷⁰

b. Garis Kemiskinan (Perkotaan+ Pedesaan) Nasional – September 2020

**Garis Kemiskinan Perkotaan+Pedesaan Nasional
(Rupiah/kapita/bulan) - September 2020**



Created with Datawrapper

Graph 24: Garis Kemiskinan Perkotaan+Pedesaan Nasional – September 2020

Berdasarkan dari data besaran Garis Kemiskinan Nasional terlihat bahwa Kep. Bangka Belitung menduduki paling tinggi

68 <https://lokadata.id/artikel/sektor-usaha-yang-menghidupkan-kota-kota>

69<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTMwMTg3MmE0YTByYjY2ZjJhZmNmYmRl&xzmm=aHR0CmH6L9y3d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmtpY2F0aW9uLzlwMjEvMDIvMjUvNTMwMTg3MmE0YTByYjY2ZjJhZmNmYmRlL2xhcG9yYW4tYnVsYW5hbi1kYXRhLXNvcjIhbC1la29ub21pLW>

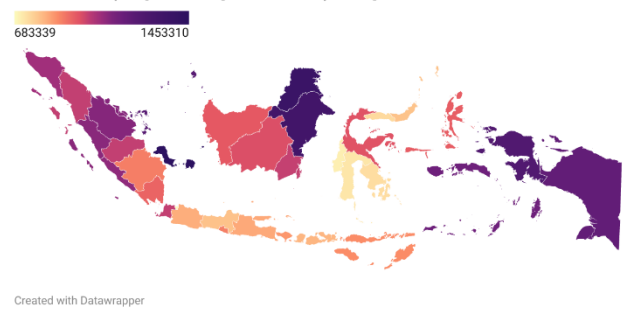
ZlYnJ1YXJpLTlwMjEuaHRtbA%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMS0wMy0wNCAwOT01NDoxNw%3D%3D

70 <https://www.bps.go.id/indicator/23/195/1/garis-kemiskinan-menurut-provinsi.html>

besaran garis kemiskinannya yaitu Rp1,460,328 atau 60% lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Kemudian disusul oleh Kalimantan Utara Rp1,372,529 atau 50% lebih tinggi dari angka nasional. Setelah itu disusul oleh Kalimantan Timur sebesar Rp1,333,100 atau 46% lebih tinggi dari angka nasional. Di urutan setelah itu kemudian disusul oleh Papua Barat Rp1,277,689 atau 40% lebih tinggi dari besaran nasional. Sementara untuk kep. Riau ada di besaran Rp1,233,438 atau 35% lebih tinggi dari angka nasional.

Sementara kalau kita lihat berdasarkan dari total garis kemiskinan pedesaan dan perkotaan dari jumlah yang paling rendah ada di Jakarta yakni sebesar Rp683.339. Angka ini perlu dicermati karena tidak ada angka kemiskinan pedesaan di Jakarta dan hanya ada data angka kemiskinan perkotaan. Oleh karena itu Sulawesi Barat lebih tepat untuk dikategorikan sebagai wilayah dengan angka kemiskinan yang paling rendah dari gabungan angka kemiskinan pedesaan dan perkotaan di tahun 2020 yakni sebesar Rp709.236. Kemudian menyusul Sulawesi Selatan Rp726.254, Sulawesi Tenggara Rp743.962 dan Gorontalo Rp749.651. Terlihat bahwa data garis kemiskinan dan perkotaan di Sulawesi memiliki kontur kesamaan.

Garis Kemiskinan Menurut Provinsi Perkotaan+Pedesaan Nasional (Rupiah/kapita/bulan)- September 2020



Map 35: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Keseluruhan - per September 2020

Sementara kalau kita lihat dari persebaran garis kemiskinan dari gambaran geografis terlihat bahwa garis kemiskinan menurut provinsi berdasarkan data semester II September 2020 menunjukkan bahwa persebaran paling besar ada di luar pulau Papua. Terlihat di Indonesia Timur terutama di wilayah Papua, Maluku, Kalimantan dan Sumatera terdapat garis kemiskinan yang lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Jawa dan Pulau Sulawesi(Peta Garis Kemiskinan Provinsi pada bagian bawah, Data diolah dari BPS,2020)⁷¹.

Key Points

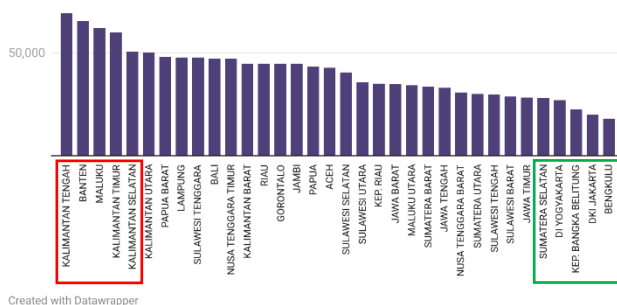
- Garis kemiskinan paling tinggi ada di Bangka Belitung yang 60% lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.
- Sementara untuk garis kemiskinan paling rendah ada di Sulawesi Barat
- Konsentrasi garis kemiskinan tertinggi terletak di Pulau Papua, Maluku dan sebagian Kalimantan
- Konsentrasi garis kemiskinan yang paling rendah ada di Pulau Sulawesi.

⁷¹ <https://www.bps.go.id/indicator/23/195/1/garis-kemiskinan-menurut-provinsi.html>

a. Pertambahan Garis Kemiskinan Nasional

Berdasarkan pada data tersebut di bawah, terlihat bahwa pertambahan garis kemiskinan secara keseluruhan dari tahun 2019-2020 rata-rata sebesar Rp41627. Sementara untuk pertambahan paling tinggi terjadi di Kalimantan Tengah yakni sebesar Rp69.227. Kemudian menyusul Banten sebesar Rp65460, Maluku Rp62097, dan Kalimantan Timur Rp60067 (Lihat lebih lanjut pada Graph 25). Sementara kalau kita berdasarkan pertambahan garis kemiskinan paling rendah terjadi di Bengkulu yang hanya Rp18.002. Pertambahan garis kemiskinan di Bengkulu jauh lebih rendah Rp51225 jika dibandingkan dengan Kalimantan Tengah. Setelah Bangka Belitung kemudian menyusul Jakarta. Namun demikian, Jakarta tidak cukup untuk di kategorikan karena tidak ada data kemiskinan pedesaan. Oleh karena itu setelah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki pertambahan terendah dari tahun 2019-2020 yakni sebesar Rp22420. Setelah itu baru kemudian menyusul DI Yogyakarta dan Sumatera Selatan yang masing-masing berada pada angka Rp28000-an.

Garis Kemiskinan Menurut Provinsi Perkotaan+Pedesaan (Rupiah/kapita/bulan) Pertambahan/Perubahan - September 2019-2020

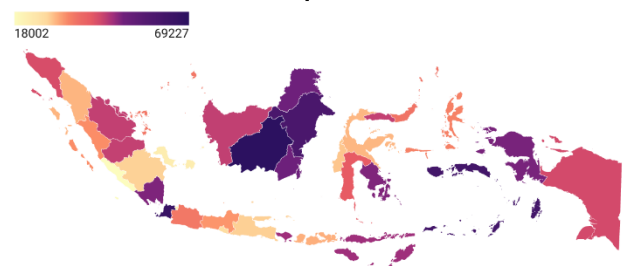


Graph 25: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Pertambahan/Perubahan per September 2019-2020

Sementara kalau kita lihat berdasarkan pada data persebaran geografis maka terlihat

Berdasarkan dari pertambahan garis kemiskinan secara nasional paling besar adalah Kalimantan Tengah sebesar Rp69,227 atau 90% lebih tinggi dari pertambahan secara nasional. Kemudian disusul oleh Banten sebesar Rp65,460 atau 80% lebih besar dari angka rata-rata nasional. Setelah Banten kemudian disusul oleh Maluku sebesar Rp62,097 atau 70% lebih besar jika dibandingkan dengan besaran nasional. Kemudian Kalimantan Timur dengan besaran Rp,60,067 yang secara persentase sama dengan Maluku yaitu 70%. Setelah Kalimantan Timur disusul oleh Kalimantan Selatan Rp50,354 atau 38% lebih besar dari besaran rata-rata nasional.

Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan), Pertambahan/Perubahan-September 2019-2020



Created with Datawrapper

Map 36: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Pertambahan/Perubahan per September 2019-2020

Sementara kalau kita lihat dari persebaran geografis terlihat bahwa pulau Kalimantan memiliki pertambahan paling banyak kemudian menyusul, Papua, maluku dan NTB. Sementara Jawa, Sulawesi dan Sumatera cenderung rendah jika dibandingkan dengan pulau lainnya (Lihat lebih lanjut pada Map 31 diatas).

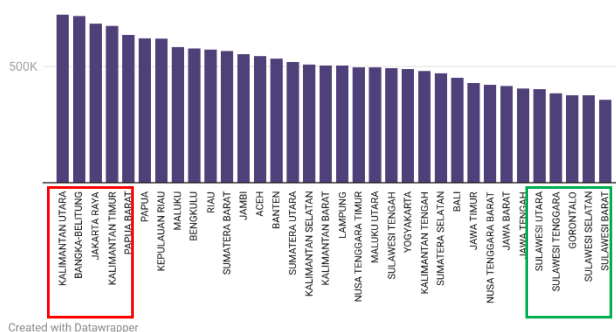
Key Points

- Pertambahan garis kemiskinan paling tinggi ada di Kalimantan Tengah dan yang terendah ada di Bengkulu
- Rata-rata pertambahan garis kemiskinan secara nasional Rp41627
- Secara geografis konsentrasi pertambahan garis kemiskinan paling besar ada di Pulau Kalimantan dan terendah ada di Jawa dan Sulawesi

b. Garis Kemiskinan Perkotaan

Dari Tabel 14 menunjukkan bahwa garis kemiskinan menurut provinsi dari segi garis kemiskinan perkotaan paling besar terkonsentrasi di daerah Kalimantan Utara sebesar Rp724,478 pada semester dua (September 2020). Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional garis kemiskinan perkotaan di Kalimantan Utara 52% lebih tinggi. Kemudian disusul oleh Kep Bangka Belitung sebesar Rp716,460 atau 50% lebih tinggi dari garis kemiskinan perkotaan secara nasional.

Garis Kemiskinan Menurut Provinsi - Perkotaan (Rupiah/kapita/bulan)- September 2020

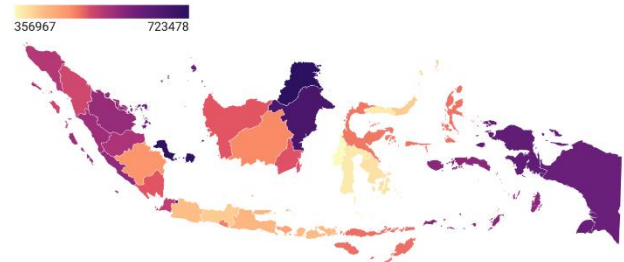


Graph 26: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi – Perkotaan (Rupiah/kapita/bulan) per September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Setelah itu kemudian DKI Jakarta dengan besaran Rp683,339 atau 44% lebih tinggi jika

dibandingkan dengan angka nasional. Baru kemudian disusul oleh Kalimantan Timur sebesar Rp675,399 atau 42% lebih tinggi dari angka nasional. Setelah Kalimantan Timur kemudian menyusul Papua Barat sebesar Rp635,539 atau 34% lebih tinggi dari besaran nasional.

Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan), Perkotaan-September 2020



Created with Datawrapper

Map 37: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi – Perkotaan (Rupiah/kapita/bulan) per September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sementara kalau kita lihat berdasarkan map persebaran garis kemiskinan di perkotaan di Indonesia terlihat jelas bahwa, garis kemiskinan perkotaan malah terlihat berada di luar pulau Jawa. Kantong-kantong wilayah dengan garis kemiskinan paling besar ada di wilayah Papua, bagian atas Kalimantan dan sebagian besar tersebar di wilayah Sumatra. Ini berarti penanganan garis kemiskinan perkotaan bisa di pusatkan di wilayah-wilayah yang rentan seperti di Papua dan Kalimantan Utara, dan beberapa bagian di pulau Sumatra.

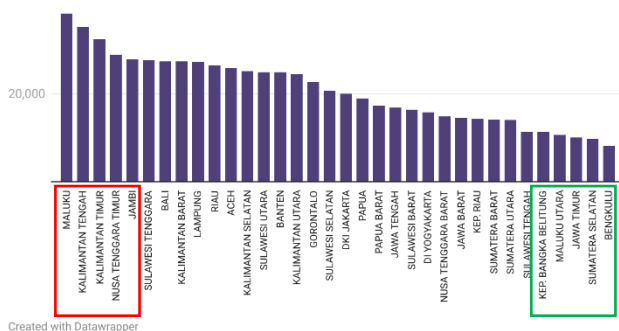
Key Points

- Garis Kemiskinan Perkotaan tertinggi ada di provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp723.478
- Garis Kemiskinan Perkotaan terendah ada di provinsi Sulawesi Barat Rp356967
- Rata-rata garis kemiskinan perkotaan nasional adalah Rp504387,5

- Garis kemiskinan terkonsentrasi paling besar di Papua, Maluku dan sebagian Kalimantan
- Pulau yang paling rendah angka garis kemiskinan ada di Sulawesi

c. Perubahan Garis Kemiskinan Perkotaan

Garis Kemiskinan Perkotaan (Perubahan) - September 2019-2020



Created with Datawrapper

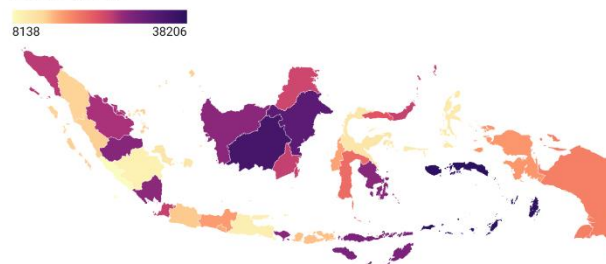
Graph 27: Garis Kemiskinan Perkotaan Perubahan (Rupiah/kapita/bulan) – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan data BPS (2020) terlihat bahwa provinsi dengan perubahan garis kemiskinan perkotaan paling tinggi per September 2019-2020 ada di provinsi Maluku dengan pertambahan sebesar Rp38206 (Liat lebih lanjut pada *Graph 25*). Kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah sebesar Rp35.199, dan Kalimantan Timur Rp32.352. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan garis kemiskinan secara nasional yaitu sebesar Rp20338.5. Jika angka tertinggi di Maluku dibandingkan dengan rata-rata nasional maka gap perbedaannya sebesar Rp17867,5. Sementara kalau kita lihat pertambahan garis kemiskinan paling rendah ada di Bengkulu sebesar Rp8138. Angka ini Rp12200.5 lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Setelah itu kemudian disusul oleh Sumatera Selatan sebesar Rp9678, Jawa Timur 10023 dan Maluku Utara Rp10639.

Sementara kalau kita lihat persebaran secara geografi terlihat bahwa pulau yang memiliki

peningkatan garis kemiskinan perkotaan terlihat di Pulau Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara Timur, sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi. Sementara untuk pulau yang memiliki peningkatan garis kemiskinan perkotaan yang cukup rendah ada di pulau Maluku Utara, Jawa, Papua dan sebagian Sulawesi dan Sumatera (Lihat lebih lanjut pada Map 34).

Garis Kemiskinan Perkotaan (Perubahan) - September 2019-2020



Created with Datawrapper

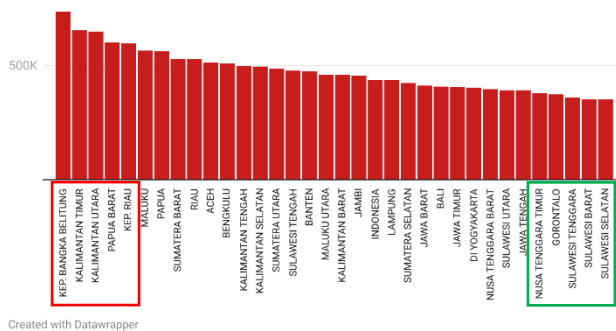
Map 38: Garis Kemiskinan Perkotaan Perubahan (Rupiah/kapita/bulan) – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Key Points

- Provinsi dengan peningkatan Garis Kemiskinan Perkotaan paling tinggi adalah Maluku sebesar Rp38206
- Provinsi dengan peningkatan Garis Kemiskinan Perkotaan terendah adalah Bengkulu Rp8138
- Rata-rata peningkatan Garis Kemiskinan Perkotaan secara nasional adalah Rp20338.5
- Konsentrasi peningkatan garis kemiskinan perkotaan terbesar ada di Kalimantan dan Maluku dan terendah ada di Maluku Utara, sebagian Sumatera dan Jawa.

d. Garis Kemiskinan Pedesaan

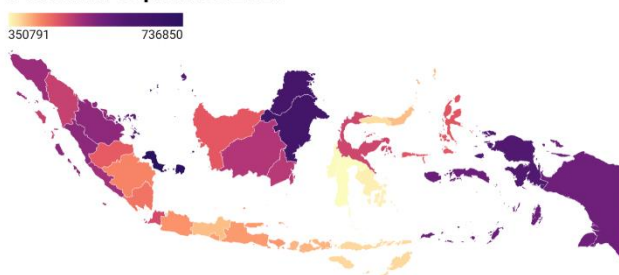
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi - Pedesaan (September 2020)



Graph 28: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi Pedesaan (Rupiah/kapita/bulan)- September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sementara untuk Garis Kemiskinan Pedesaan menurut provinsi paling tinggi berada di Bangka Belitung sebesar Rp736,850 per semester dua September 2020 atau 68% lebih tinggi dari besaran Garis Kemiskinan menurut pedesaan secara nasional. Adapun rata-rata garis kemiskinan secara nasional adalah Rp459580. Kemudian setelah itu menyusul Kalimantan Timur Rp656,069 atau 50% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Setelah itu, menyusul Kalimantan Utara sebesar Rp649,761 atau 48% tinggi dari besaran nasional. Setelah Kalimantan Utara disusul oleh Papua Barat Rp602,290 atau 37,5% lebih tinggi dari angka nasional dan disusul oleh Kepulauan Riau sebesar Rp597,899 atau 36.5 persen lebih tinggi dari besaran nasional garis kemiskinan di pedesaan.

Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan), Pedesaan-September 2020



Created with Datawrapper

Map 39: Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) Pedesaan- September 2020

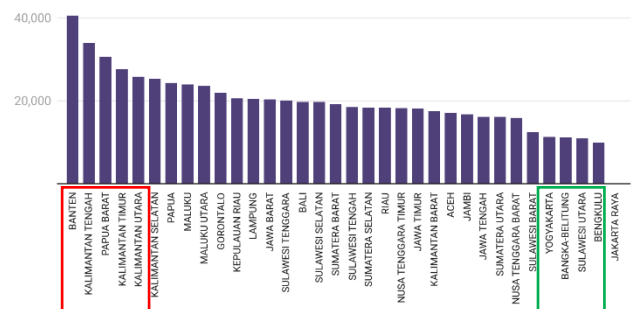
Sedangkan kalau kita lihat persebaran garis kemiskinan pedesaan di semester dua 2020 menunjukkan bahwa garis kemiskinan paling tinggi ada di wilayah Indonesia timur seperti wilayah Papua dan Maluku. Kemudian di bagian Timur Kalimantan dan Utara, serta sebagian wilayah di Sumatera. Sementara untuk garis kemiskinan paling rendah terlihat di pulau Bali, NTB, Jawa dan sebagian pulau Sulawesi.

Key Points

- Garis Kemiskinan Pedesaan tertinggi ada di provinsi Bangka Belitung Rp736850
- Garis Kemiskinan Pedesaan Terendah ada di Provinsi Sulawesi Selatan Rp350791
- Rata-rata besaran Garis Kemiskinan Pedesaan Rp459580
- Pulau yang dengan konsentrasi Garis Kemiskinan Pedesaan Tertinggi ada di Kalimantan, Maluku, Kalimantan dan sebagian Sumatera.
- Sementara untuk yang terendah ada di NTT, NTB, Sulawesi, Jawa dan Jawa

e. Garis Kemiskinan Pedesaan (Perubahan) – September 2019-2020

Garis Kemiskinan Pedesaan (Perubahan)- September 2019-2020

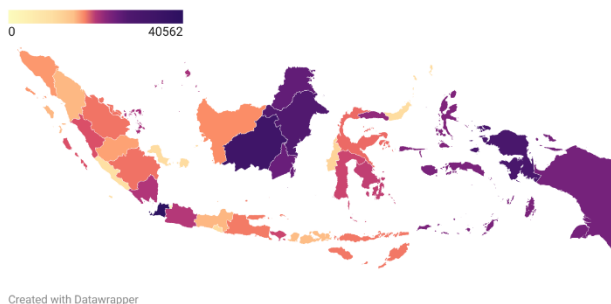


Created with Datawrapper

Graph 29: Garis Kemiskinan Pedesaan Perubahan (Rupiah/kapita/bulan) – September 2019-2020

Berdasarkan data dari BPS (2020) menunjukkan bahwa ada beberapa wilayah yang mengalami peningkatan garis kemiskinan pedesaan secara signifikan antara tahun 2019-2020. Provinsi pertama yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Banten Rp40.562. Angka ini jika dibandingkan dengan rata-rata nasional dua kali lebih tinggi, di mana rata-rata penambahan garis kemiskinan pedesaan secara keseluruhan hanya Rp18338.5. Kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah 34.028, dan Papua Barat Rp30.653 serta Kalimantan Timur Rp27715 dan Kalimantan Utara Rp25846. Sementara untuk provinsi dengan penambahan angka garis kemiskinan pedesaan paling sedikit adalah Bengkulu yang hanya 9864. Angka ini 53,7% lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Setelah itu kemudian di susul oleh Sulawesi Utara dengan besaran 10935. Kemudian disusul oleh Bangka-Belitung dan Yogyakarta yang masing-masing di bawah 12 ribuan.

Garis Kemiskinan Pedesaan (Perubahan) - September 2019-2020



Map 40: Garis Kemiskinan Pedesaan Perubahan (Rupiah/kapita/bulan) – September 2019-2020

Sementara kalau kita lihat berdasarkan persebaran geografis perubahan Garis Kemiskinan Pedesaan per September 2019-2020, terlihat bahwa konsentrasi penambahan garis kemiskinan di Indonesia

terpusat di luar pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi yakni Kalimantan, Maluku dan Papua. Berdasarkan data tersebut, harus ada pendekatan pembangunan yang berasaskan dasar kewilayahan untuk mengurangi garis kemiskinan di wilayah ini.

Key Points

- Pertambahan garis kemiskinan paling besar ada di Banten dan paling rendah ada di Bengkulu.
- Perubahan garis kemiskinan paling besar secara geografis ada di Papua, Maluku dan Kalimantan
- Perubahan garis kemiskinan paling rendah ada di Pulau Jawa dan Sumatera

4. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan tidak hanya melihat jumlah persentase penduduk miskin. Namun juga, sangat penting untuk melihat dimensi lain termasuk adalah tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin kepada garis kemiskinan. Semakin jauh jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin maka akan semakin besar tantangan untuk mengangkat penduduk dari kemiskinan. BPS (2020)⁷² mendefinisikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Untuk indeks kedalaman kemiskinan sendiri naik dari 1,61 pada Maret 2020 menjadi 1,75 pada September 2020.

⁷² [https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#:~:text=Indeks%20Kedalaman%20Kemiskinan%20\(Poverty%20Gap,pengeluaran%20penduduk%20dari%20garis%20kemiskinan.](https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#:~:text=Indeks%20Kedalaman%20Kemiskinan%20(Poverty%20Gap,pengeluaran%20penduduk%20dari%20garis%20kemiskinan.)

Key Points

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (BPS, 2020)

Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi (Persen), 2020

0.25 9.74

	Perkotaan		Pedesaan		Keseluruhan		Penambahan 2019-2020	
1	NUSA TENGGARA BARAT	3	PAPUA BARAT	10	PAPUA	7	PAPUA	1
2	BENGKULU	2	PAPUA	9	PAPUA BARAT	6	NUSA TENGGARA BARAT	1
3	SUMATERA SELATAN	2	MALUKU	6	NUSA TENGGARA TIMUR	4	DI YOGYAKARTA	1
4	SULAWESI BARAT	2	NUSA TENGGARA TIMUR	5	MALUKU	4	SULAWESI BARAT	1
5	DI YOGYAKARTA	2	GORONTALO	5	GORONTALO	3	BENGKULU	1
6	SULAWESI TENGAH	2	ACEH	3	ACEH	3	PAPUA BARAT	0
7	JAMBI	2	SULAWESI TENGAH	3	SULAWESI TENGAH	3	JAWA TENGAH	0
8	SULAWESI TENGGARA	2	JAWA TIMUR	3	NUSA TENGGARA BARAT	3	JAWA TIMUR	0
9	ACEH	2	NUSA TENGGARA BARAT	3	BENGKULU	3	SULAWESI UTARA	0
10	JAWA TENGAH	2	SULAWESI TENGGARA	3	SUMATERA SELATAN	2	BANTEN	0
11	INDONESIA	1	INDONESIA	2	INDONESIA	2	INDONESIA	0

Created with Datawrapper

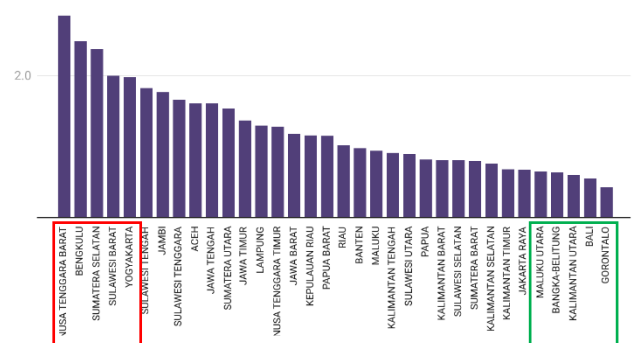
Table 16: Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi (Persen) (Data diolah dari BPS, 2020)⁷³

a. Kedalaman Kemiskinan Perkotaan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) menurut definisi BPS (2020)⁷⁴ adalah “ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan”. Berdasarkan dari data BPS (2020) Kedalaman Kemiskinan Perkotaan menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan tertinggi ada di Nusa Tenggara Barat yaitu 2.85%. Angka ini 1,59% lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 1,26%. Kemudian disusul oleh Bengkulu

yang berada di angka 2,49%. Setelah itu disusul oleh Sumatera Selatan 2,38% dan Sulawesi Barat sebesar 2%. Jadi ada empat provinsi di Indonesia yang menempati indeks kedalaman kemiskinan di atas dua persen. Sementara kalau kita lihat berdasarkan provinsi yang paling rendah adalah Gorontalo yang sebesar 0,43%. Angka ini 0.83% jauh lebih rendah dari angka nasional. Setelah itu kemudian menyusul Bali yang hanya sebesar 0,55% dan Kalimantan Utara 0.6%.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020



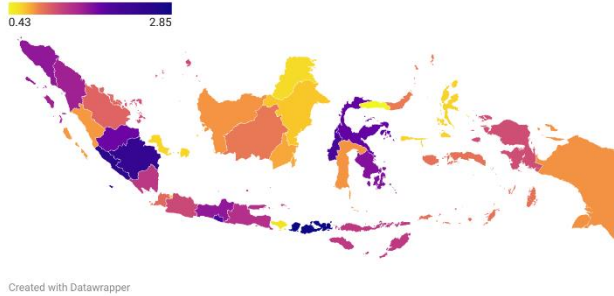
Graph 30: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan dari data BPS (2020) di bawah, terlihat persebaran geografis dari Kedalaman Kemiskinan paling besar secara geografis terkonsentrasi di wilayah Nusa Tenggara Barat, Sumatera, Jawa, NTT dan Sulawesi. Sementara pulau yang mengalami indeks kedalaman kemiskinan yang rendah ada di Kalimantan, Bali Maluku Utara dan Papua.

⁷³ <https://www.bps.go.id/indicator/23/503/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-provinsi.html>

⁷⁴ [https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#:~:text=Indeks%20Kedalaman%20Kemiskinan%20\(Poverty%20Gap,pengeluaran%20penduduk%20dari%20garis%20kemiskinan.](https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#:~:text=Indeks%20Kedalaman%20Kemiskinan%20(Poverty%20Gap,pengeluaran%20penduduk%20dari%20garis%20kemiskinan.)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020



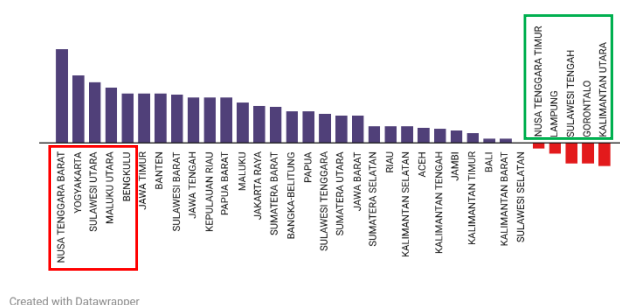
Map 41: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020).

Key Points

- Rata-rata kedalaman kemiskinan nasional adalah 2.85%
- Provinsi dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan paling tinggi ada di Nusa Tenggara dan terendah ada di Gorontalo.
- Pulau dengan konsentrasi kedalaman kemiskinan paling parah ada NTB, Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Jawa.
- Pulau dengan konsentrasi kedalaman kemiskinan paling rendah ada di Bali, Maluku Utara, Kalimantan dan Papua.

b. Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Perkotaan

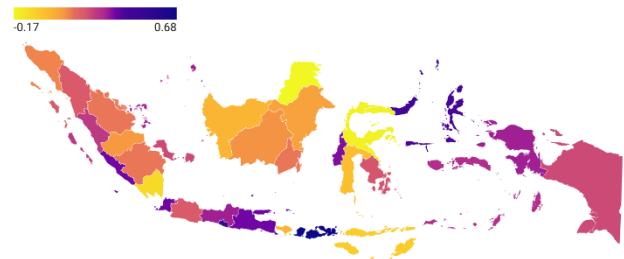
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan - Perkotaan (September 2019-2020)



Graph 31: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan/Pertambahan - Perkotaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan dari data dari BPS (2020) sebagaimana terlihat pada Graph 31 di atas terlihat bahwa, rata-rata pertambahan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan adalah 0.24%. Sementara kalau kita lihat dari provinsi dengan Indeks Keparahan Kemiskinan paling tinggi adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 0.68% atau 0,44 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional. Setelah itu kemudian disusul oleh Yogyakarta sebesar 0.49% dan Sulawesi Utara dan Maluku Utara masing-masing 0.44% dan 0.4%. Baru kemudian Bengkulu, Jawa Timur, dan Banten yang sama-sama berada di angka 0,36%. Sementara itu ada diwilayah yang justru malah mengalami perbaikan seperti misalnya Kalimantan Utara yang jauh lebih baik 0.17%, kemudian Gorontalo dan Sulawesi Tengah masing-masing 0.15%, Lampung 0.08% dan Nusa Tenggara Timur 0.04%. Namun juga terdapat wilayah yang sama sekali tidak mengalami perubahan seperti Sulawesi Selatan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan/Pertambahan - Pedesaan – September 2019-2020



Map 42: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan/Pertambahan - Pedesaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sementara kalau kita lihat dari persebaran geografis maka terlihat bahwa wilayah seperti Papua, Maluku, NTB dan sebagian besar wilayah Jawa dan sebagian wilayah Sumatera merupakan wilayah dengan jumlah pertambahan kemiskinan pedesaan paling besar sejak 2019-2020. Sedangkan wilayah yang cukup rendah konsentrasi pertambahan jumlah kedalaman kemiskinan pedesaan dari

kurung waktu yang sama adalah NTB, Sulawesi dan Kalimantan dan sebagian besar Sumatera.

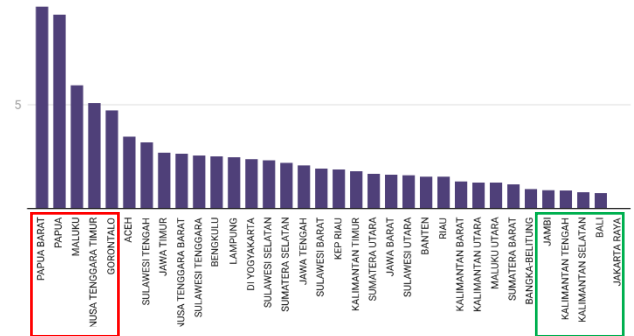
Key Points

- Rata-rata pertambahan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan adalah 0.24%
- Pertambahan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan paling besar adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 0.68% dan terendah adalah Kalimantan Utara yang justru mengalami perbaikan.
- Persebaran pertambahan angka persentase kedalaman kemiskinan pedesaan ada di Papua, Maluku dan sebagian besar wilayah Jawa dan paling rendah terlihat di Pulau NTB, Sulawesi dan Kalimantan.

c. Kedalaman Kemiskinan Pedesaan

Berdasarkan dari data dari BPS (2020) di bawah menunjukkan bahwa rata-rata kedalaman kemiskinan pedesaan secara nasional adalah 2,39%. Sementara kalau kita lihat berdasarkan data provinsi terlihat bahwa Nusa Tenggara menduduki posisi paling tinggi persentase Kedalaman Kemiskinan yakni sebesar 9,74%. Angka ini lebih tinggi 7,35% jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kemudian di susul oleh Papua yang juga berada di atas 9% tepatnya di angka 9.34%. Baru kemudian disusul oleh Maluku dan Nusa Tenggara Timur yang masing-masing 5,95% dan 5.09%. Sementara kalau kita lihat dari Kedalaman Kemiskinan dengan persentase terendah ada di Bali 0.75%, kemudian disusul oleh Kalimantan Selatan sebesar 0.78%. Kemudian Kalimantan Tengah dan Jambi masing-masing 0.86% dan 0.89%.

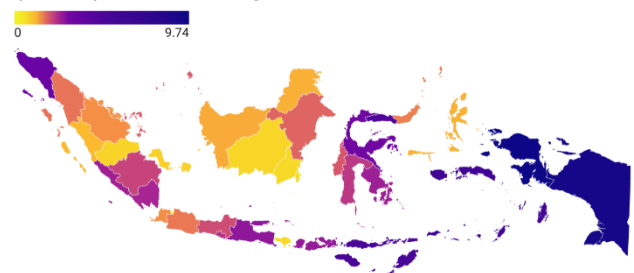
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan-September 2020



Graph 32: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sementara kalau kita lihat dari persebaran geografis terlihat bahwa Kedalaman Kemiskinan Pedesaan terkonsentrasi di wilayah Papua, NTB, NTT, Maluku dan Sulawesi. Sementara pulau dengan kedalaman kemiskinan yang rendah ada di pulau Kalimantan, dan Sumatera, dan Bali. Hal yang perlu dicermati bahwa Maluku Utara dan Maluku meskipun secara geografis memiliki kesamaan namun dengan kondisi yang sangat berbeda, di mana kedalaman kemiskinan pedesaan di Maluku Utara hanya 1.26%. Sedangkan Maluku sendiri cukup tinggi yaitu 5.95% (Untuk lebih lanjut lihat pada Map 38 di bawah).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan- September 2020



Map 43: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan -September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

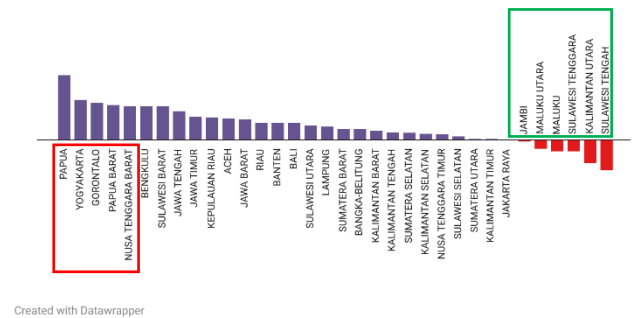
Key Points

- Rata-rata kedalaman kemiskinan pedesaan secara nasional adalah 2,39%.
- Kedalaman Kemiskinan paling tinggi ada di Papua Barat dan terendah ada di Bali
- Secara geografis kedalaman kemiskinan terkonsentrasi di Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku dan NTB, NTT dan Sulawesi
- Sementara wilayah Indonesia Barat cenderung rendah

d. Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Pedesaan

Berdasarkan dari data BPS (2020) pada Graph 34 menunjukkan bahwa Papua mengalami peningkatan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan paling parah yaitu sebesar 1,08%. Ini cukup jauh dari pertambahan nasional yang cuma 0.28%. Ini berarti bahwa Papua 0,8% diatas rata-rata nasional. Setelah itu kemudian menyusul Yogyakarta sebesar 0,67%, Gorontalo 0.62%, Papua Barat 0.58% dan Nusa Tenggara Barat 0.57% begitu pun dengan Bengkulu dan Sulawesi Barat yang memiliki persentase yang sama. Namun demikian ada enam wilayah yang mengalami perubahan ke arah positif misalnya saja Sulawesi Tengah yang tingkat kedalaman kemiskinan pedesaannya membaik 0.51%, kemudian disusul oleh Kalimantan Utara yang juga membaik sebesar 0.39 persen. Selain itu juga, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Jambi juga mengalami perbaikan (Lihat lebih lanjut pada Graph 34 dibawah)

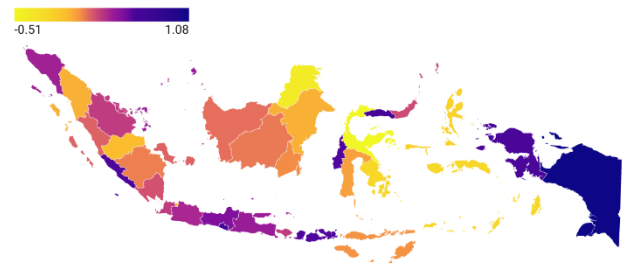
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan - Pedesaan – September 2019-2020



Created with Datawrapper

Graph 33: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan - Pedesaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan - Pedesaan – September 2019-2020



Created with Datawrapper

Map 44: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perubahan - Pedesaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

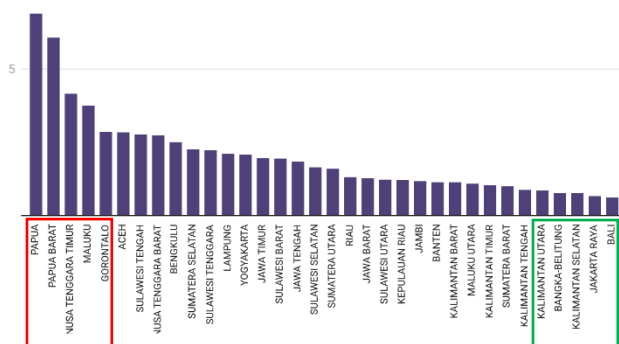
Sementara kalau kita lihat berdasarkan pada data persebaran geografis maka terlihat konsentrasi peningkatan Kedalaman Kemiskinan dari tahun 2019-2020 terlihat ada di Pulau Papua, Jawa, NTT dan sebagian besar pulau Sumatera. Sementara yang mengalami perbaikan ada di pulau Maluku dan Maluku Utara serta sebagian besar pulau Sulawesi dan Kalimantan.

Key Points

- Pertambahan kedalaman kemiskinan pedesaan per September 2019-2020 nasional adalah 0.28%
- Papua mengalami pertambahan yang sangat signifikan yaitu 1.08%
- Ada enam wilayah yang mengalami pengurangan yang berarti sangat positif yaitu, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Jambi

e. Kedalaman Kemiskinan Secara Keseluruhan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan+Pedesaan-September 2020



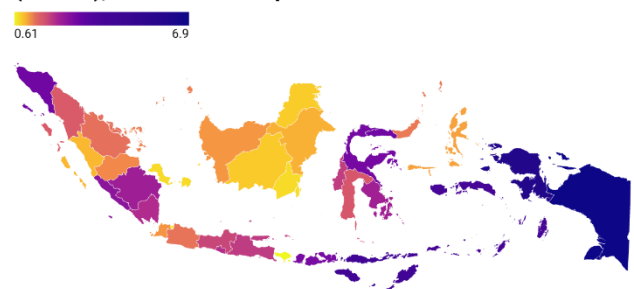
Graph 34: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan+Pedesaan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan pada data BPS (2020) menunjukkan bahwa Kedalaman Kemiskinan menurut provinsi yang merupakan penggabungan dari data kedalaman kemiskinan perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa rata-rata perubahan kedalaman kemiskinan menurut provinsi adalah 1,62% di tahun 2020. Sedangkan untuk pertambahan secara nasional 1.75% di tahun 2020. Kalau dilihat berdasarkan dari data provinsi terlihat bahwa Kedalaman Kemiskinan paling tinggi ada di Papua sebesar 6.9%. Ini sangat jauh dari angka nasional yang hanya 1,75%.

Ini berarti ada gap 5.15%. Sementara kalau dilihat rata-rata Kedalaman Kemiskinan nasional pada tahun 2020 adalah 1,62%.

Setelah Papua kemudian menyusul Papua Barat sebesar 6.07%, Nusa Tenggara Timur 4.16%, dan Maluku 3,76%. Sementara provinsi yang paling rendah Kedalaman Kemiskinannya adalah Bali sebesar 0.61%. Masih ada enam provinsi lain yang berada di bawah 1% yaitu Jakarta, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan tengah, dan Sumatera Barat (Lihat lebih lanjut pada graph 34).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Keseluruhan-September 2020



Map 45: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Keseluruhan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

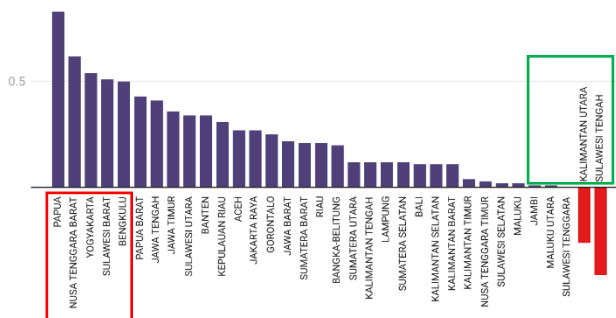
Sementara kalau kita lihat dari persebaran geografis terlihat bahwa konsentrasi dari Kedalaman Kemiskinan terjadi di pulau Papua, Maluku, NTB dan sebagian Sulawesi dan Sumatera. Sementara untuk wilayah dengan persentase rendah Kedalaman Kemiskinan ada di Bali dan Kalimantan.

Key Points

- Rata-rata perubahan kedalaman kemiskinan menurut provinsi adalah 1,62%
- Pertambahan secara nasional 6,9%
- Provinsi dengan Kedalaman Kemiskinan tertinggi adalah Papua dan terendah adalah Bali
- Konsentrasi Kedalaman Kemiskinan paling besar ada di Papua, Maluku dan NTB.
- Sementara yang terkecil ada di Bali dan Kalimantan.

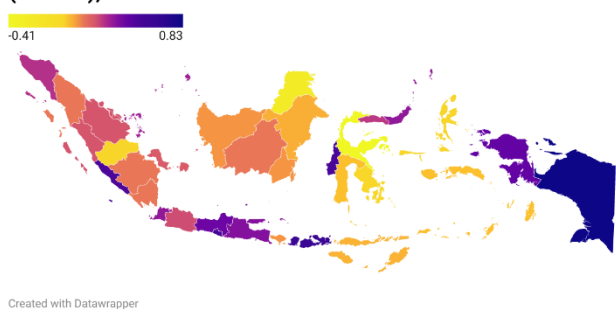
f. Pertambahan Kedalaman Kemiskinan (2019-2020)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pertambahan- September 2019-2020



Graph 35: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pertambahan – September 2019- 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pertambahan-2019-2020



Map 46: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen), Pertambahan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan dari data tersebut di atas terlihat bahwa rata-rata pertambahan Kedalaman Kemiskinan dari 2019-2020 sebesar 0.20%. Sementara untuk provinsi dengan pertambahan Kedalaman Kemiskinan per September 2019-2020 adalah Papua sebesar 0.83%. Ini 0,63% jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kemudian setelah itu disusul oleh Nusa Tenggara Barat sebesar 0,62%, dan Yogyakarta 0.54% serta Sulawesi Barat 0.51% dan Bengkulu 0.5%. Meskipun demikian terdapat dua provinsi

yang mengalami perbaikan cukup positif yakni Sulawesi Tengah sebesar 0.41% dan Kalimantan Utara 0.26%. Sementara untuk Sulawesi Tenggara sama sekali tidak ada perubahan per September 2019-2020 (Lihat lebih lanjut pada Graph 35 di atas).

Sementara kalau kita lihat berdasarkan pada persebaran geografis terlihat bahwa pertambahan Kedalaman Kemiskinan terkonsentrasi di Papua, Jawa dan sebagian wilayah Sumatera. Sementara kalau kita lihat berdasarkan dari persebaran wilayah terlihat bahwa wilayah dengan Kedalaman Kemiskinan terendah ada di wilayah seperti Kalimantan, sebagian wilayah Sulawesi, NTB dan Maluku.

Key Points

- Rata-rata pertambahan kedalaman kemiskinan dari 2019-2020 adalah 0.20%
- Pertambahan Kedalaman Kemiskinan paling tinggi ada di Papua sebesar 0.83%, dan yang paling rendah ada di Sulawesi Tengah yang justru mengalami perbaikan sebesar 0.41%
- Konsentrasi pertambahan Kedalaman Kemiskinan paling tinggi menurut provinsi ada di Papua, Jawa dan sebagian wilayah Sumatera dan yang terendah ada di Sulawesi dan Kalimantan

5. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Menurut definisi BPS (2020)⁷⁵ Tingkat Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) “memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin”. Jadi Indeks Keparahan

⁷⁵ [https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#:~:text=Indeks%20Kedalaman%20Kemiskinan%20\(Poverty%20Gap,pengeluaran%20penduduk%20dari%20garis%20kemiskinan.](https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#:~:text=Indeks%20Kedalaman%20Kemiskinan%20(Poverty%20Gap,pengeluaran%20penduduk%20dari%20garis%20kemiskinan.)

Kemiskinan menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin dengan membandingkan apakah pengeluaran penduduk miskin ekstrem dengan penduduk miskin lainnya. Dengan demikian semakin tinggi indeks Keparahan kemiskinan maka akan semakin berat usaha untuk mengentaskan kemiskinan karena antara orang miskin sendiri terjadi ketimpangan pada pengeluaran. Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik dari 0,38 menjadi 0,47 pada periode yang sama. Sementara kalau dibandingkan dengan indeks Keparahan kemiskinan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan.

Key Points

- Tingkat Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) “memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin”.

Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi (Persen) Keseluruhan-September 2020

	Pedesaan+ Perkotaan	%	Pedesaan	%	Perkotaan	%
1	Papua Barat	2	Papua Barat	4	Sumatera Selatan	1
2	Papua	2	Papua	3	Nusa Tenggara Barat	1
3	Nusa Tenggara Timur	1	Maluku	2	Sulawesi Tenggara	1
4	Maluku	1	Nusa Tenggara Timur	2	Sulawesi Barat	1
5	Sulawesi Tengah	1	Gorontalo	1	Bengkulu	1
6	Aceh	1	Sulawesi Tengah	1	DI Yogyakarta	0
7	Gorontalo	1	Aceh	1	Jambi	0
8	Nusa Tenggara Barat	1	Nusa Tenggara Barat	1	Sulawesi Tengah	0
9	Sulawesi Tenggara	1	Jawa Timur	1	Kep Riau	0
10	Bengkulu	1	Lampung	1	Sumatera Utara	0
11	INDONESIA	0	INDONESIA	1	INDONESIA	0

Created with Datawrapper

Table 17: Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi (Persen) Keseluruhan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Indeks Keparahan Kemiskinan

	Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20
Pedesaan	0.55	0.53	0.55	0.68
perkotaan dan Pedesaan	0.37	0.36	0.38	0.47
Perkotaan	0.24	0.23	0.25	0.31

Created with Datawrapper

Figure 7: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁷⁶

Kalau kita lihat berdasarkan dari indeks Keparahan kemiskinan berdasarkan pada Figure 7 di atas, maka terlihat bahwa indeks Keparahan Kemiskinan per September 2020 lebih tinggi di pedesaan yakni 0.68%, dibandingkan dengan perkotaan yang hanya 0.31%. Sementara gabungan di antara keduanya yakni perkotaan dan pedesaan adalah 0.47%.

⁷⁶ <https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-provinsi.html>

Secara singkat kita bisa melihat bahwa terjadi peningkatan Keparahan Kemiskinan Pedesaan yang sangat signifikan per September 2019 ke September 2020 yang semula dari angka 0.53% naik ke angka 0.68% per September 2020. Dengan demikian terjadi kenaikan 0,15 persen. Ini jauh berbeda kalau kita lihat data pedesaan dari Maret 2019-2020 tidak terjadi perubahan sama sekali. Sementara kalau kita lihat dari indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan terjadi kenaikan 0,08% untuk rentang waktu September 2019-2020. Kenaikan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Keparahan Kemiskinan Perkotaan per Maret 2019-2020 sebesar 0.01%.

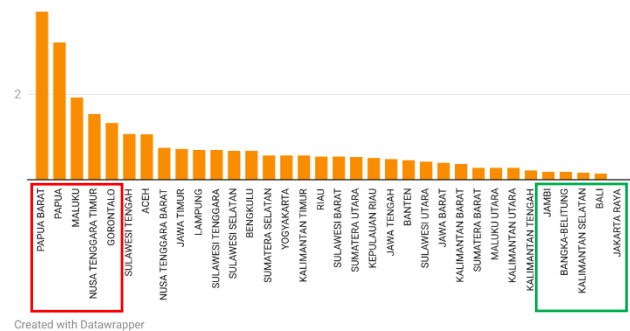
Sementara kalau kita lihat gabungan antara perkotaan dan pedesaan per September 2019-2020 terlihat kenaikan sebesar 0,11% dari angka 0.36% naik ke 0,47%. Kenaikan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode Maret 2019-2020 yang Cuma naik sekitar 0.01%. Dengan demikian data tersebut di atas menggambarkan bahwa Keparahan Kemiskinan di Pedesaan jauh lebih tinggi sehingga membutuhkan pendekatan yang jauh lebih tepat. Ini juga bisa mengindikasikan bahwa terjadi permasalahan ekonomi yang sangat signifikan di pedesaan jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Key Points

- Indeks Keparahan Kemiskinan per September 2020 paling tinggi terjadi di Pedesaan
- Peningkatan Keparahan Kemiskinan paling tinggi per September 2019-2020 di wilayah pedesaan dengan peningkatan sebesar 0.15%
- Indeks Keparahan Kemiskinan lebih tinggi di pedesaan jika dibandingkan dengan Keparahan Kemiskinan di Perkotaan

a. Indeks Keparahan Kemiskinan Pedesaan

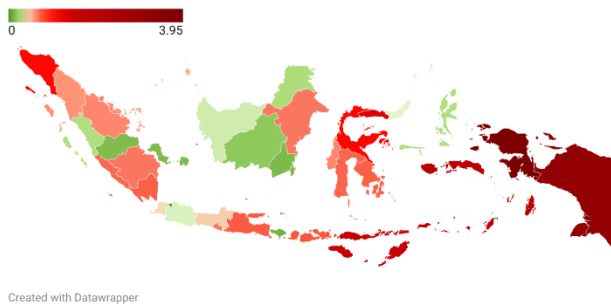
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan-September 2020



Graph 36: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan- September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan dari data Keparahan Kemiskinan Pedesaan per September 2020 terlihat bahwa Papua Barat mengalami kenaikan paling tinggi yakni 3,95%. Angka ini lebih tinggi 3,27% jika dibandingkan dengan angka nasional sebesar 0,68%. Bahkan angka juga lebih tinggi dari angka rata-rata Keparahan Kemiskinan Pedesaan yakni 0.54% per September 2020. Ini menunjukkan kemiskinan di Papua Barat sangat parah. Ini kemungkinan dipengaruhi oleh akses harga barang dan jasa yang disebabkan oleh permasalahan logistik menyebabkan fluktuasi harga barang dan jasa di wilayah tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Setelah itu kemudian menyusul Papua 3.22%, Maluku 1,93%, Nusa Tenggara Timur 1.55%, Gorontalo 1.33%, Sulawesi Tengah 1.07% dan Aceh 1,06%. Sementara untuk wilayah dengan tingkat Keparahan Kemiskinan terendah ada di Bali yakni sebesar 0.14%. Angka ini lebih rendah 0,4% jika dibandingkan dengan persentase nasional. Kemudian setelah Bali disusul oleh Kalimantan Selatan 0.17%, Bangka Belitung dan Jambi masing-masing 0.18%.

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan-September 2020



Map 47: Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan- September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

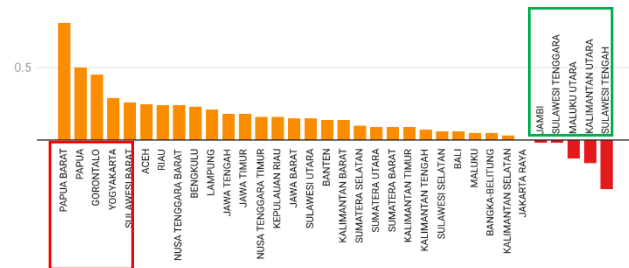
Sementara kalau kita lihat berdasarkan persebaran data geografis maka terlihat bahwa Kearifan Kemiskinan Pedesaan terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur terutama di wilayah Papua, Maluku, NTB, Sulawesi dan sebagian besar wilayah Sumatera. Sementara untuk wilayah dengan Kearifan Kemiskinan paling rendah ada di wilayah Bali, Maluku Utara dan sebagian besar wilayah Kalimantan dan sebagian kecil wilayah Sumatera.

Key Points

- Kearifan Kemiskinan Pedesaan Indonesia per September 2020 adalah 0,68%
- Angka rata-rata Kearifan Kemiskinan Pedesaan yakni 0.54% per September 2020
- Kearifan Kemiskinan Pedesaan tertinggi di Papua Barat dan terendah di Bali
- Kearifan Kemiskinan terkonsentrasi paling tinggi di wilayah timur Indonesia dan paling rendah di wilayah Kalimantan

b. Perubahan Kearifan Kemiskinan Pedesaan (2019-2020)

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan/Perubahan-September 2019-2020



Graph 37: Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan/Perubahan – September 2-20192020 (Data diolah dari BPS, 2020)

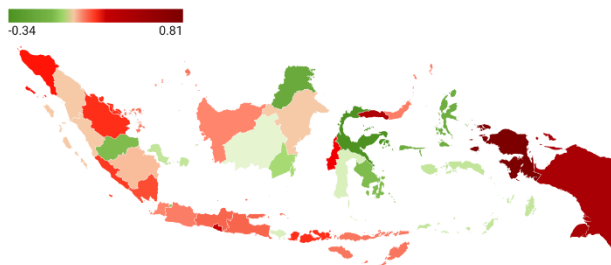
Berdasarkan dari data BPS (2020) di atas terlihat bahwa pertambahan Kearifan Kemiskinan Pedesaan paling tinggi ada di Papua Barat sebesar 0.81%. Ini lebih tinggi dari rata-rata peningkatan Kearifan Kemiskinan secara nasional sebesar 0.14%. Kemudian setelah itu disusul oleh 0.50%, dan Gorontalo 0.45%.

Terhitung terdapat 16 provinsi yang Kearifan Kemiskinannya berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian terdapat juga lima provinsi yang justru mengalami perbaikan seperti misalnya Sulawesi Tengah yang naik 0.34%, lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019. Ini juga berarti Sulawesi Tengah 0.20% lebih rendah dari rata-rata nasional. Kemudian Kalimantan Utara sebesar 0.16%, Maluku Utara 0.13%, Sulawesi Tenggara 0.02% (lebih lanjut lihat pada *Graph 37*).

Sementara kalau kita lihat berdasarkan pada map persebaran geografis terlihat bahwa Kearifan kemiskinan pedesaan terkonsentrasi paling besar di Papua, kemudian di Jawa, NTB, NTT dan sebagian besar wilayah Sumatera. Sementara untuk wilayah dengan Kearifan Kemiskinan Pedesaan paling rendah ada di Maluku dan

Maluku Timur, sebagian besar wilayah Sulawesi dan Kalimantan (Lihat lebih lanjut pada Map 43 dibawah).

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan/Perubahan-September 2019-2020



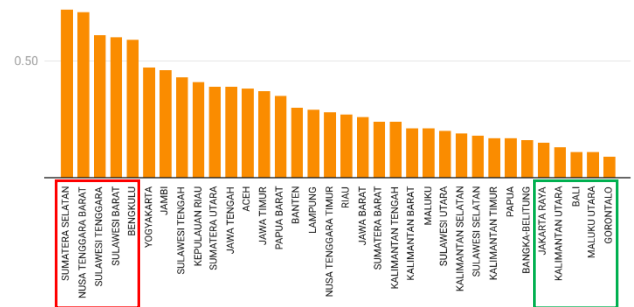
Map 48: Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Pedesaan/Perubahan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Key Points

- Pertambahan Kearifan Kemiskinan Pedesaan paling tinggi ada di Papua Barat sebesar 0.81% dan terendah ada di Sulawesi Tengah 0.34%
- Rata-rata peningkatan Kearifan Kemiskinan secara nasional sebesar 0,14%.
- Konsentrasi pertambahan Kearifan Kemiskinan paling besar ada di Papua, NTB, NTT, Jawa dan sebagian besar Sumatera.
- Sementara pertambahan paling rendah dan bahkan cenderung positif ada di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi dan sebagian besar Kalimantan.
- Terdapat lima provinsi yang mengalami perbaikan di antara 2019-2020 termasuk Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Jambi.

c. Indeks Kearifan Kemiskinan Perkotaan

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020

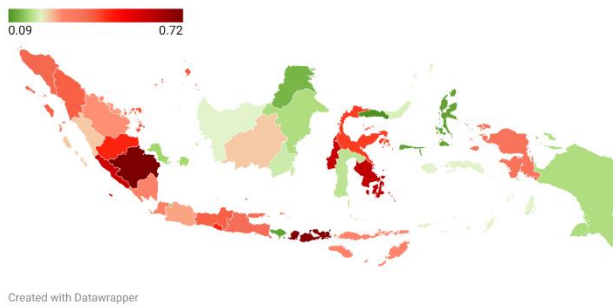


Graph 38: Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan dari data (BPS, 2020) di atas terlihat bahwa Sumatera Selatan menduduki posisi paling atas untuk Kearifan Kemiskinan Perkotaan sebesar 0,72%. Angka ini lebih tinggi dari Kearifan Kemiskinan nasional yakni 0,31%. Dengan demikian Kearifan Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Selatan lebih tinggi 0,41% dibandingkan dengan angka nasional. Sementara kalau kita lihat dari rata-rata Kearifan Kemiskinan nasional sebesar 0,27%. Angka ini lebih tinggi 0,45% jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Setelah Sumatera Selatan, kemudian menyusul Nusa Tenggara Barat yang besarnya mirip yakni 0,71%.

Masih ada tiga provinsi lainnya yang kondisi Kearifan Kemiskinan Perkotaannya di atas 0,5% termasuk Sulawesi Tenggara 0,61%, Sulawesi Barat 0,60% dan Bengkulu 0,59%. Sementara kalau kita lihat dari provinsi dengan tingkat Kearifan Kemiskinan Perkotaan terendah adalah Gorontalo yakni 0.09%. Angka ini cukup rendah 0,18% dari rata-rata Kearifan Kemiskinan Perkotaan secara nasional. Setelah itu Maluku Utara dan Bali juga cukup rendah dengan besarnya masing-masing 0,11%. Kemudian menyusul Kalimantan Utara 0.13% dan Jakarta 0.15%.

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020



Map 49: Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan-September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

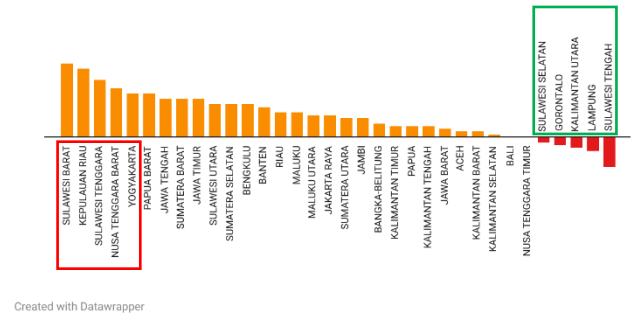
Sementara kalau kita lihat berdasarkan pada data persebaran geografis pada Map 44 di atas, maka terlihat bahwa Kearifan Kemiskinan Perkotaan terkonsentrasi paling besar di Sumatera, Jawa, NTB, NTT dan sebagian besar di pulau Sulawesi. Sementara untuk wilayah dengan tingkat Kearifan Kemiskinan terendah ada di pulau Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan sebagian wilayah Sulawesi.

Key Points

- Angka Kearifan Kemiskinan Perkotaan nasional sebesar 0,31%.
- Rata-rata Kearifan Kemiskinan Perkotaan nasional adalah 0,27%
- Provinsi dengan tingkat Kearifan Kemiskinan Perkotaan tertinggi adalah Sumatera Selatan sebesar 0,72% dan terendah adalah 0.09%
- Konsentrasi Kearifan Kemiskinan Perkotaan tertinggi berada di pulau Sumatera, Jawa, NTB dan NTT dan terendah ada di Maluku dan Kalimantan dan sebagian wilayah Sulawesi

d. Perubahan Kearifan Kemiskinan Perkotaan (2019-2020)

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan/Perubahan- September 2019-2020



Graph 39: Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan/Perubahan-September (Data diolah dari BPS, 2020)

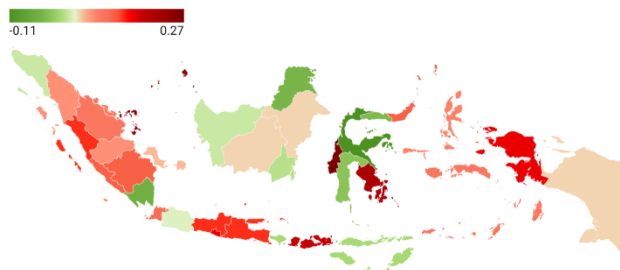
Berdasarkan dari data BPS (2020) di atas terlihat bahwa perubahan Kearifan Kemiskinan Perkotaan paling besar terjadi di Sulawesi Barat dengan persentase sebesar 0,27%. Sementara untuk rata-rata perubahan Kearifan Kemiskinan Perkotaan secara nasional adalah 0.075%. Ini berarti Kearifan Kemiskinan di Sulawesi Barat cukup tinggi dari rata-rata nasional per September 2019-2020. Setelah itu kemudian menyusul Kepulauan Riau dengan besaran 0.25%, Sulawesi Tenggara 0,21%, Nusa Tenggara Barat 0,18%.

Ada juga wilayah yang justru mengalami perbaikan dari segi Kearifan Kemiskinan yakni Sulawesi Tengah sebesar 0.11%, Lampung 0.05%, Kalimantan Utara 0.04%, Gorontalo 0.03% dan Sulawesi Selatan 0.02%. Sementara untuk Nusa Tenggara Timur dan Bali sama sekali tidak mengalami perubahan. Dengan demikian ada lima provinsi yang mengalami perbaikan, dua provinsi yang tidak ada perubahan serta 27 provinsi yang mengalami peningkatan.

Sementara kalau kita lihat dari peta persebaran geografis terlihat bahwa perubahan Kearifan Kemiskinan Perkotaan terkonsentrasi di pulau Sumatera,

Jawa, Papua, Maluku dan NTB. Sedangkan pulau yang relatif memiliki perubahan Keparahan Kemiskinan yang rendah yakni Bali, NTT, Kalimantan dan sebagian besar wilayah Sulawesi.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan/Perubahan -September 2019-2020



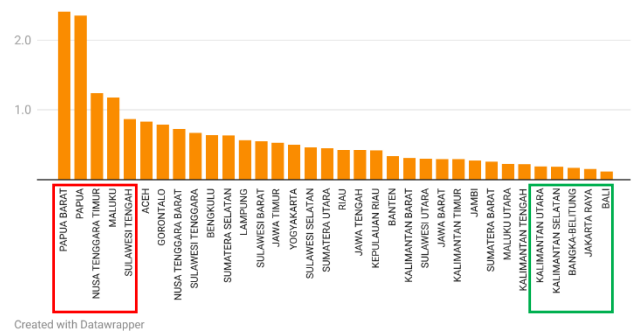
Map 50: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan/Perubahan- September

Key Points

- Rata-rata perubahan Keparahan Kemiskinan Perkotaan secara nasional adalah 0.075%.
- Perubahan Keparahan Kemiskinan Perkotaan paling besar terjadi di Sulawesi Barat dengan persentase sebesar 0,27%
- Ada 5 provinsi yang mengalami perbaikan positif termasuk Sulawesi Tengah, Lampung, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan
- Ada dua provinsi yang sama sekali tidak mengalami perubahan yakni Nusa Tenggara Timur dan Bali
- 27 provinsi mengalami kenaikan
- Konsentrasi pertambahan secara besar Keparahan Kemiskinan ada di pulau Sumatera, Jawa, Papua, Maluku, NTB
- Pertambahan Keparahan Kemiskinan paling kecil terjadi di pulau Kalimantan, Bali, NTT, dan sebagian besar pulau Sulawesi.

e. Indeks Keparahan Perkotaan+Pedesaan (2020)

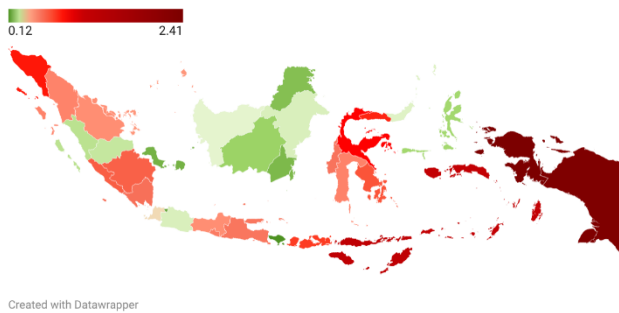
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan+Pedesaan-September 2020



Graph 40: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), Perkotaan+Pedesaan - September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Data dari BPS (2020) menunjukkan bahwa rata-rata Keparahan Kemiskinan gabungan antara perkotaan dan pedesaan adalah 0.44%. Untuk provinsi dengan angka paling tinggi adalah Papua Barat sebesar 2.41%. Ini berarti Papua Barat lebih tinggi 1,97% dibandingkan dengan rata-rata nasional. Setelah itu kemudian disusul oleh Papua 2,35%, Nusa Tenggara Timur 1,24%, Maluku 1.18%, dan Sulawesi Tengah 0,87%. Sementara itu wilayah dengan Keparahan Kemiskinan Gabungan paling rendah adalah Bali yang hanya 0,12%, kemudian disusul Jakarta 0.15%, Bangka Belitung 0.17% dan Kalimantan Selatan 0.18% dan Kalimantan Utara 0.19% (Untuk lebih lanjut lihat pada Graph 40 di atas)

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Pesen), Perkotaan+Pedesaan - September 2020



Map 51: Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Pesen), Perkotaan+Pedesaan -September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

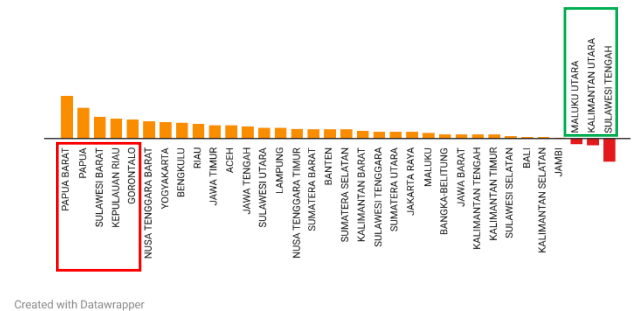
Sementara kalau kita lihat berdasarkan pada data persebaran geografis terlihat konsentrasi Kearifan Kemiskinan Gabungan paling tinggi di Papua, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara pulau yang mengalami Kearifan Kemiskinan gabungan terendah ada di Bali, Kalimantan dan Maluku Utara (Untuk lebih lanjut lihat pada Map 46).

Key Points

- Rata-rata Kearifan Kemiskinan gabungan antara perkotaan dan pedesaan adalah 0.44%
- Provinsi dengan Kearifan Kemiskinan gabungan paling tinggi adalah Papua Barat sebesar 2.41%, dan terendah Bali 0,12%
- Konsentrasi Kearifan Kemiskinan terlihat terkonsentrasi sangat besar di Indonesia Timur kecuali Maluku Utara, dan terendah di Bali dan Kalimantan

f. Perubahan Indeks Kearifan Kemiskinan Gabungan (2019-2020)

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Pesen), Perubahan Perkotaan+Pedesaan-September 2019-2020

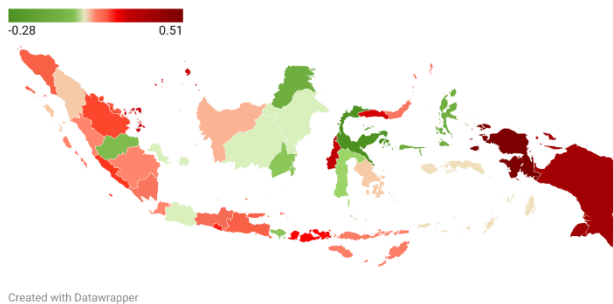


Graph 41: Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Pesen), Perubahan Perkotaan+Pedesaan per September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)⁷⁷

Berdasarkan dari data BPS (2020) di Graph 41 terlihat bahwa rata-rata perubahan Indeks Kearifan Kemiskinan Gabungan sebesar 0.11%. Sementara kalau kita lihat pada Graph 41, menunjukkan Papua Barat menempati urutan paling tinggi untuk provinsi dengan perubahan Kearifan Kemiskinan Gabungan paling tinggi per September 2019-2020 adalah Papua Barat sebesar 0.51%. Ini berarti 0.41% lebih tinggi dari rata-rata pertambahan nasional. Setelah itu kemudian disusul oleh Papua sebesar 0.37%, Sulawesi Barat 0.26%, Kepulauan Riau 0.24%, Gorontalo 0.23%, Nusa Tenggara Barat 0.21% dan Yogyakarta 0.20%. Ini berarti ada tujuh provinsi yang pertambahannya diatas 0.20%. Namun demikian, ada tiga provinsi yang justru mengalami perbaikan seperti misalnya Sulawesi Tengah yang membaik 0.28%, Kalimantan Utara 0.08% dan Maluku Utara 0.07%. Dengan demikian ada 31 provinsi yang mengalami yang masih mengalami penambahan Kearifan Kemiskinan secara keseluruhan per September 2019-2020.

⁷⁷ <https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-provinsi.html>

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Pesen), Perubahan/Keseluruhan-September 2019-2020



Map 52: Graph 42: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Pesen), Perubahan Perkotaan+Pedesaan per September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sementara kalau kita lihat dari persebaran geografis sebagaimana terlihat pada Map 47 di atas, terlihat konsentrasi dari Perubahan Keparahan Kemiskinan paling besar terjadi di Papua, NTB, NTT dan Sumatera dan sebagian besar Jawa. Sementara pulau yang mengalami perubahan yang cukup rendah ada di pulau Bali, sebagian besar pulau Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Key Points

- Rata-rata perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Gabungan sebesar 0.11%.
- Perubahan Keparahan Kemiskinan tertinggi ada di Papua Barat sebesar 0.51%
- Ada tiga provinsi yang mengalami perbaikan dan bergerak ke arah positif yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara.
- Konsentrasi Keparahan Kemiskinan terbesar ada di Papua NTB, NTT dan sebagian besar di pulau Sumatera dan terkecil ada di Maluku, Bali, sebagian kecil besar wilayah Kalimantan dan Sulawesi

6. Gini Rasio

BPS (2021)⁷⁸ menggunakan Gini Rasio untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk dan distribusi pengeluaran. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Lebih lanjut BPS (2021) menjabarkan bahwa Koefisien Gini berkisar dari 0 sampai 1. Semakin menuju angka 0 berarti pemerataan sempurna, sementara kalau mendekati 1 ketimpangan yang sempurna.

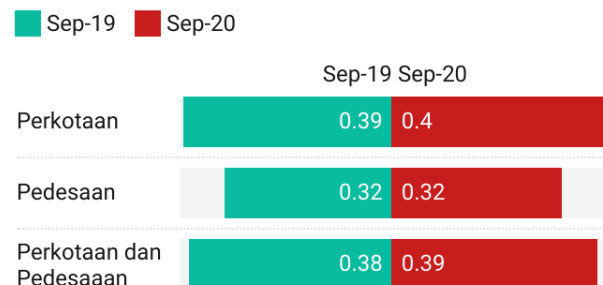


Figure 8: Gini Rasio (September 2019-2020) (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan dari data BPS (2020) di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio ketimpangan sebesar 0.1 di perkotaan per September 2020 sebesar 0.40 jika dibandingkan dengan September 2019. Sementara untuk wilayah pedesaan tidak terjadi perubahan rasio ketimpangan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, penduduk perkotaan mengalami tingkat dampak yang lebih besar secara temporer dari pandemi Covid-19. Jadi gabungan antara Gini Rasio Perkotaan dan Pedesaan hanya mengalami ketimpangan sebesar 0.1.

⁷⁸https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/98/sdgs_10/6

Untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas pada bagian berikutnya.

Gini Ratio Menurut Provinsi September 2020

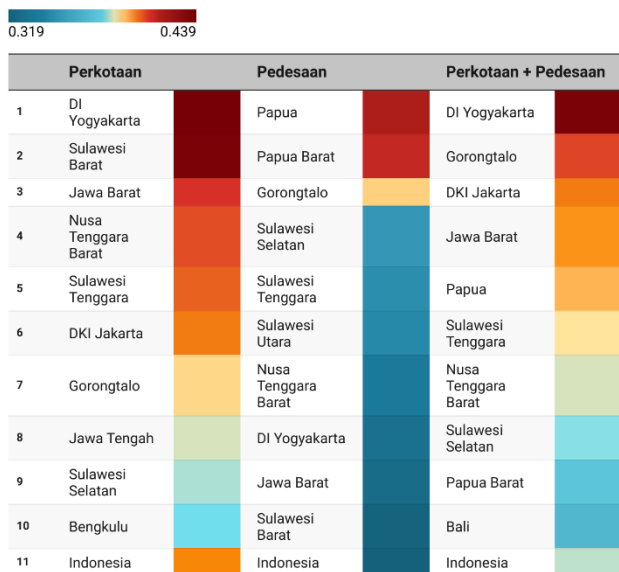
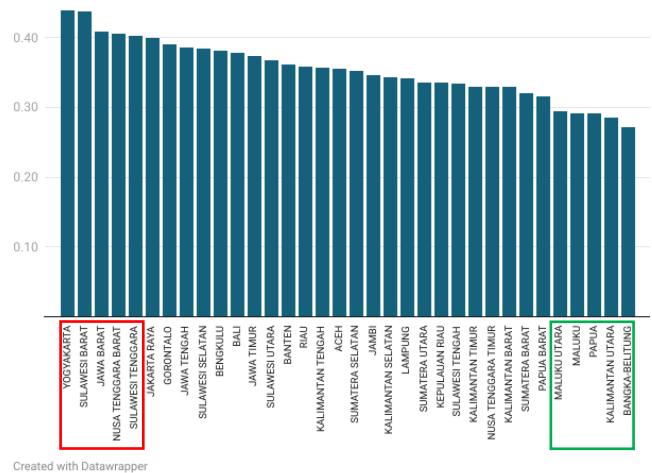


Table 18: Gini Rasio Menurut Provinsi per September 2020

Penurunan Tertinggi Gini Rasio di Maluku Utara	 0.020
Peningkatan Tertinggi Gini Rasio di Kalimantan Selatan	 0.017

a. Gini Rasio Perkotaan (September 2020)

Gini Rasio Perkotaan-September 2020



Graph 43: Gini Rasio Perkotaan -September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Pada Graph 43 diatas menunjukkan Gini Rasio Perkotaan untuk data per September 2020. Data BPS (2020)⁷⁹ menunjukkan bahwa Gini Rasio Perkotaan di Indonesia adalah 0,385. Data yang serupa juga menunjukkan bahwa provinsi Yogyakarta menduduki posisi Gini Rasio Perkotaan di Indonesia sebesar 0,439. Ini berarti terdapat selisih 0.051 antara Gini Rasio di Yogyakarta dan Indonesia. Ini juga menunjukkan Gini Rasio Perkotaan di Yogyakarta lebih tinggi dari Indonesia. Terdapat enam provinsi yang Gini Rasionya berada di atas 0.40 termasuk Sulawesi Barat sebesar 0.437, Jawa Barat 0.409, Nusa Tenggara Barat 0.405, Sulawesi Tenggara 0.403 dan Jakarta. Selain itu terdapat 23 provinsi yang Gini Koefisiennya berada di rentang 0.3 dan lima provinsi ada di rentang 0.2. Tercatat provinsi dengan Gini Koefisien Perkotaan terendah adalah Bangka Belitung dengan besaran 0.271, kemudian disusul oleh Kalimantan Utara 0.285, Papua 0.29, Maluku 0.292, dan Maluku Utara 0.294.

Sementara kalau kita lihat dari data persebaran geografis sebagaimana terlihat

79 <https://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116>

pada Map 48 terlihat bahwa daerah dengan Gini Rasio tertinggi tersebar paling besar dan tinggi di wilayah Jawa, Bali, NTB, sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi. Sementara wilayah dengan Gini Koefisien yang rendah ada di pulau Papua, Maluku dan Maluku Utara, NTT dan Kalimantan.

Gini Rasio Perkotaan - September 2020



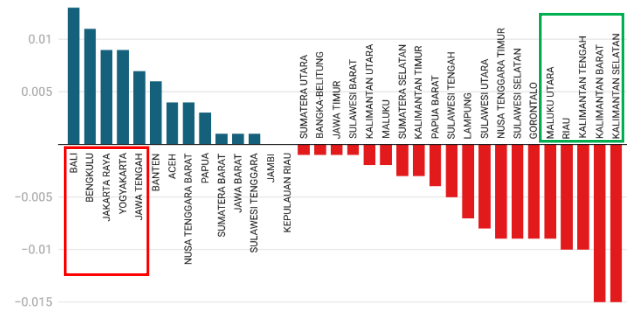
Map 53: Gini Rasio Perkotaan -September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Key Points

- Gini Rasio Perkotaan di Indonesia adalah 0,385
- Provinsi Yogyakarta menduduki posisi Gini Rasio Perkotaan di Indonesia sebesar 0,439 dan provinsi terendah adalah Bangka-Belitung sebesar 0.271
- Dari data persebaran geografis terlihat bahwa Gini Koefisien tertinggi ada di Jawa, NTB, Bali dan sebagian Sulawesi dan terendah di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTB dan Kalimantan

b. Perubahan Gini Rasio Perkotaan (September 2019-2020)

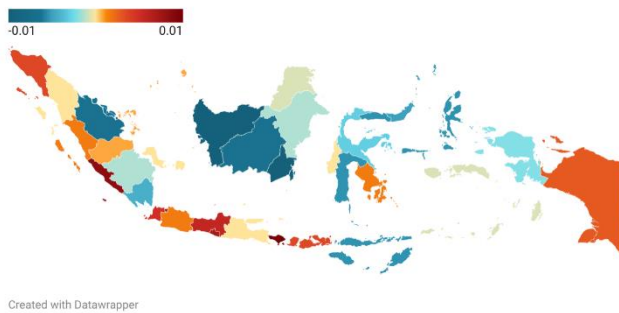
Gini Rasio Perubahan Perkotaan - September 2019-2020



Graph 44: Gini Rasio Perubahan Perkotaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan pada data BPS (2020) di atas terlihat beberapa provinsi yang mengalami perubahan signifikan baik itu bertambah maupun berkurang selama dari tahun 2019-2020. Tercatat terdapat 12 provinsi yang mengalami pertambahan ketimpangan perkotaan dalam satu tahun, dua provinsi yang tidak mengalami perubahan dan 20 provinsi yang mengalami pengurangan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data perbandingan 2019-2020 Indonesia cukup mengalami progres yang baik dalam memperbaiki kondisi ketimpangan perkotaan. Provinsi yang mengalami pertambahan ketimpangan tertinggi adalah Bali dengan pertambahan sebesar 0.013, kemudian disusul oleh Bengkulu 0.011, Jakarta dan Yogyakarta masing-masing 0.009, serta Jawa Tengah 0.007. Sementara provinsi yang sama sekali tidak mengalami perubahan adalah Jambi dan Kepulauan Riau. Untuk Provinsi 20 provinsi yang mengalami perbaikan yang tertinggi adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat yang mengalami pengurangan ketimpangan sebesar 0.15, kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah dan Riau yang masing-masing 0.01.

Gini Rasio Perubahan Perkotaan-September 2019-2020)



Map 54: Gini Rasio Perubahan Perkotaan – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

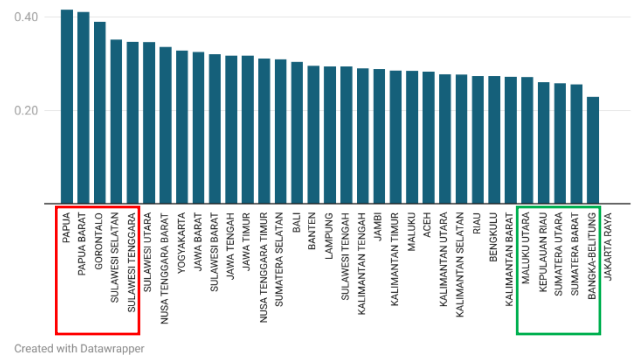
Sementara kalau kita lihat dari peta persebaran geografis terlihat bahwa pertambahan ketimpangan terkonsentrasi di wilayah Bali, NTB, pulau Jawa, Sumatera dan Papua. Sementara wilayah yang justru mengalami perbaikan terkonsentrasi di Kalimantan, NTB, Sulawesi, Maluku Utara dan Papua Barat, serta sebagian kecil di Sumatera.

Key Points

- 12 provinsi yang mengalami pertambahan ketimpangan perkotaan dalam satu tahun
- 20 provinsi yang mengalami pengurangan rasio ketimpangan
- 2 provinsi yang tidak mengalami perubahan
- Provinsi dengan peningkatan Gini Rasio tertinggi adalah Bali dan yang mengalami perbaikan sangat signifikan adalah Kalimantan Selatan
- Konsentrasi ketimpangan paling besar ada di Bali, NTB, Jawa, Papua dan sebagian besar di Sumatera dan terendah ada di Kalimantan, NTT, Maluku Utara, Papua dan sebagian besar Sulawesi

c. Gini Rasio Pedesaan (September 2020)

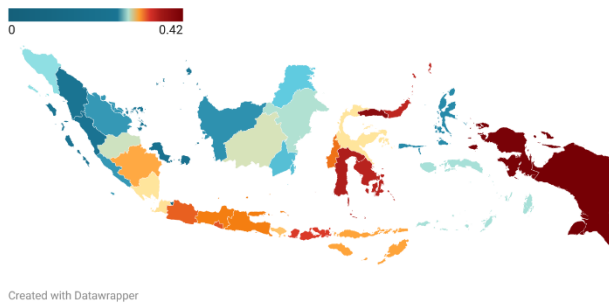
Gini Rasio Pedesaan-September 2020



Graph 45: Gini Rasio Pedesaan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan pada data BPS (2020) di atas terlihat bahwa Gini Rasio Pedesaan di Indonesia adalah 0.319. Ini tentunya lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Rasio Perkotaan. Gini Rasio tertinggi ada di Papua sebesar 0.416. Dengan demikian terdapat perbedaan sebesar 0,097 atau Gini Rasio Pedesaan di Papua lebih besar 0.097 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Pedesaan secara nasional. Setelah itu kemudian menyusul Papua Barat sebesar 0.412. Dengan demikian terdapat dua provinsi yang rasio ketimpangan pedesaannya diatas 0.40an. Sementara untuk provinsi dengan rasio ketimpangan pedesaan yang rendah ada di Bangka Belitung sebesar 0.229. Ini berarti rasio ketimpangan pedesaan di Bangka Belitung lebih rendah 0,09 jika dibandingkan dengan Gini Rasio Pedesaan secara keseluruhan. Setelah Bangka Blitung kemudian menyusul Sumatera Barat sebesar 0.256, Sumatera Utara 0.258 dan Kepulauan Riau 0.26 (Lihat lebih lanjut pada Graph 43).

Gini Rasio Pedesaan-September 2020



Map 55: Gini Rasio Pedesaan – September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

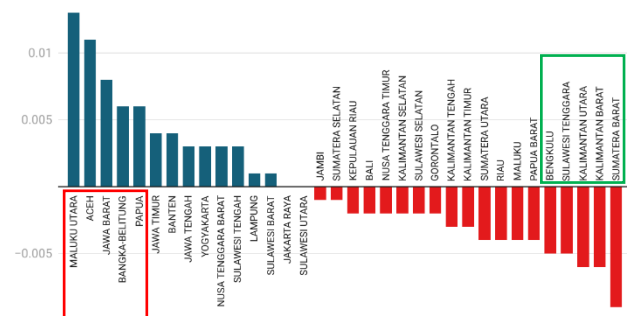
Sementara kalau kita lihat dari Map 50 diatas yang menunjukkan persebaran data secara geografis terlihat bahwa Gini Rasio Pedesaan terkonsentrasi paling tinggi di Papua, Sulawesi, NTB, Jawa, NTB. Sedangkan wilayah dengan Gini Rasio Pedesaan yang rendah terlihat di Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, dan sebagian besar wilayah Sumatera.

Key Points

- Gini Rasio Pedesaan di Indonesia adalah 0.319
- Gini Rasio tertinggi ada di Papua sebesar 0.416 dan terendah Bangka Belitung 0.229
- Ada dua provinsi yang Gini Rasionya di atas 0.4
- Konsentrasi Rasio Ketimpangan Pedesaan terlihat sangat besar di Papua, Sulawesi, Jawa, NTB, Bali dan NTT dan terendah ada di Kalimantan Maluku secara keseluruhan dan sebagian wilayah Sumatera

d. Perubahan Gini Rasio Pedesaan (September 2019-2020)

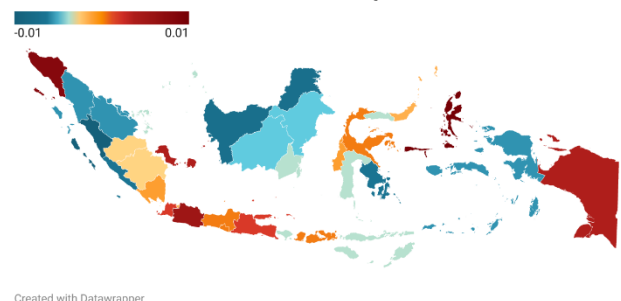
Gini Rasio Pedesaan Perubahan-September 2019-2020



Graph 46: Gini Rasio Pedesaan Perubahan - September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Indonesia mengalami perubahan Gini Rasio Pedesaan yang cukup baik per September 2019-2020. Terlihat bahwa rata-rata perubahan rasio ketimpangan bergerak ke arah positif. Terlihat 19 provinsi yang mengalami pergerakan ke arah positif (mengalami perbaikan). Dua provinsi yang sama sekali tidak mengalami perubahan dan 13 provinsi yang mengalami peningkatan ketimpangan per September 2019-2020. Provinsi dengan perubahan rasio ketimpangan paling tinggi adalah Maluku Utara sebesar 0.013, kemudian menyusul Aceh 0.011, Jawa Barat 0.08, Bangka Belitung dan Papua masing-masing 0.006, Jawa Timur dan Banten masing-masing 0.004.

Gini Rasio Perubahan Pedesaan-September 2019-2020



Map 56: Gini Rasio Pedesaan Perubahan -September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

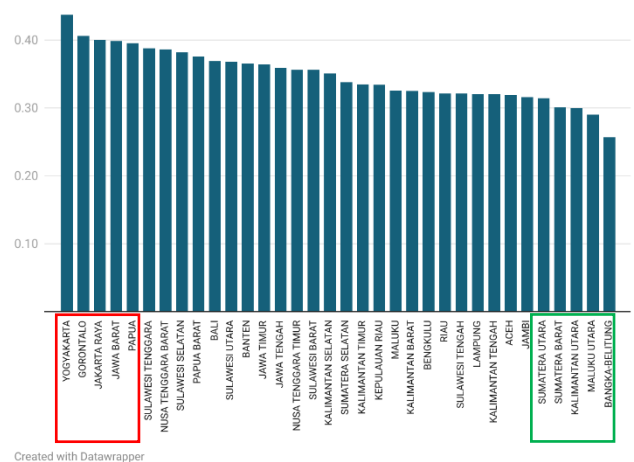
Sementara kalau kita lihat data BPS (2020) yang menunjukkan perubahan Gini Rasio Pedesaan per September 2019-2020. Maka terlihat bahwa konsentrasi pertambahan Gini Rasio Pedesaan paling besar ada di pulau Jawa, Papua, NTB, Maluku Utara dan sebagian kecil wilayah Sumatera. Sementara wilayah dengan ketimpangan rendah terlihat ada di Kalimantan, sebagian wilayah Sulawesi dan Sumatera, NTT dan Papua Barat.

Key Points

- Rata-rata perubahan rasio ketimpangan bergerak ke arah positif
- 19 provinsi yang mengalami perbaikan. Dua provinsi yang sama sekali tidak mengalami perubahan dan 13 provinsi yang mengalami peningkatan ketimpangan
- Pertambahan ketimpangan tertinggi ada di Maluku Utara dan perbaikan paling signifikan terjadi di Sumatera Barat
- Konsentrasi Rasio Ketimpangan paling tinggi terjadi di Jawa, Papua dan Maluku. Terendah di Kalimantan, Papua Barat dan sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi.

c. Gini Rasio (Pedesaan+Perkotaan) September 2020

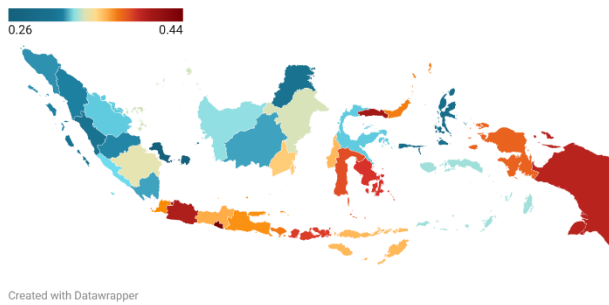
Gini Rasio (Pedesaan+Perkotaan)-September 2020



Graph 47: Gini Rasio (Pedesaan+Perkotaan) per September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan data BPS (2020) Rasio Ketimpangan gabungan antara pedesaan dan perkotaan secara nasional adalah 0.385. Terlihat bahwa angka ini naik 0.005 jika dibandingkan dengan September 2019. Provinsi dengan rasio ketimpangan tertinggi adalah Yogyakarta sebesar 0.437. Ini berarti secara nasional Rasio Ketimpangan di Yogyakarta lebih tinggi 0,052 dibandingkan dengan Gini Rasio nasional. Setelah itu kemudian disusul oleh Gorontalo sebesar 0.406 dan Jakarta 0.40. Dengan demikian terdapat tiga provinsi yang rasio ketimpangannya di atas 0.40. Sementara untuk Gini Rasio terendah ada di Bangka Belitung sebesar 0.257, atau 0.18 poin lebih rendah dari Gini Rasio nasional. Setelah itu kemudian menyusul Maluku Utara sebesar 0.29. Dengan demikian terdapat dua provinsi yang Gini Rasionya direntang 0.20-an. Sementara 28 provinsi yang lain berada di rentang 0.30-an (Untuk lebih lanjut lihat pada Graph 47).

Gini Rasio Perkotaan+Pedesaan - September 2020



Map 57: Gini Rasio (Pedesaan+Perkotaan) per September 2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

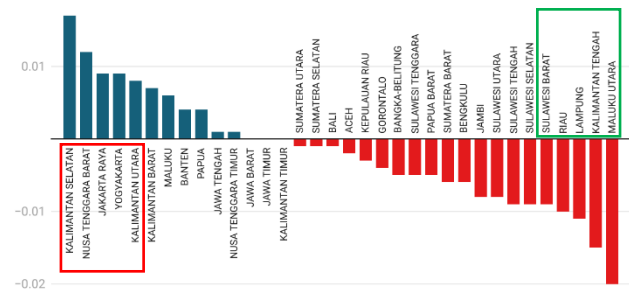
Sementara kalau kita lihat dari Gini Rasio berdasarkan persebaran data geografis terlihat bahwa konsentrasi ketimpangan paling besar terjadi di Papua, Jawa, Bali, NTB dan Sulawesi. Sementara pulau seperti Kalimantan, Sumatera, Maluku secara keseluruhan lumayan rendah (Untuk lebih lanjut lihat pada Map 52).

Key Points

- Rasio Ketimpangan gabungan antara pedesaan dan perkotaan secara nasional adalah 0.385
- Provinsi dengan rasio ketimpangan tertinggi adalah Yogyakarta sebesar 0.437 dan terendah adalah Bangka Belitung
- Konsentrasi ketimpangan paling besar ada di Papua, Jawa, Bali, NTB, NTT dan sebagian besar Sulawesi. Sementara yang terendah ada di Kalimantan, Maluku dan Sumatera.

d. Perubahan Gini Rasio (Pedesaan+Perkotaan) 2019-2020

Gini Rasio Perubahan (Pedesaan+Perkotaan)- September 2019-2020



Graph 48: Gini Rasio Perubahan (Pedesaan+Perkotaan) – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Berdasarkan pada data BPS (2020) di atas terlihat bahwa terjadi perubahan signifikan terhadap Gini Rasio secara keseluruhan dari tahun 2019-2020. Terlihat dari *Graph 48* di atas ada provinsi yang mengalami peningkatan atau rasio ketimpangannya meningkat. Namun demikian ada juga provinsi yang mengalami penurunan atau membaik dalam kurung waktu yang sama. Rata-rata perubahan rasio ketimpangan adalah -0.0015 secara keseluruhan. Ini berarti bahwa rasio ketimpangan dari tahun 2019-2020 sebenarnya membaik. Provinsi yang mengalami penambahan rasio ketimpangan tertinggi secara keseluruhan adalah Kalimantan Selatan sebesar 0.017, kemudian disusul oleh Nusa Tenggara Barat sebesar 0.012, Jakarta dan Yogyakarta masing-masing 0.009 serta Kalimantan Utara 0.008 dan Kalimantan Barat 0.007. Ada sebelas provinsi yang mengalami peningkatan rasio ketimpangan. Sementara itu ada tiga provinsi yang tidak mengalami perubahan termasuk Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Sementara itu ada 20 provinsi yang mengalami perbaikan atau pengurangan rasio ketimpangan dari tahun 2019-2020. Provinsi yang mengalami perbaikan sangat signifikan adalah Maluku

Utara sebesar 0.02 kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah sebesar 0.015, Lampung 0.011, Riau 0.01, serta Sulawesi Barat, Selatan dan Tengah masing-masing 0.009.

Gini Rasio Perubahan-September 2019-2020



Created with Datawrapper

Map 58: Gini Rasio Perubahan (Pedesaan+Perkotaan) – September 2019-2020 (Data diolah dari BPS, 2020)

Sedangkan kalau kita dari data persebaran geografis pada Map 53 di atas, terlihat bahwa wilayah dengan pertambahan rasio ketimpangan terkonsentrasi pulau Jawa, NTB, NTT, Maluku, Papua Barat dan Kalimantan. Sementara wilayah dengan perbaikan rasio gini ada di pulau Sulawesi, sebagian pulau Sumatera, Maluku Utara dan Papua Barat.

Key Points

- Rata-rata perubahan rasio ketimpangan adalah -0.0015 secara keseluruhan
- Provinsi dengan peningkatan rasio ketimpangan tertinggi adalah Kalimantan Utara sebesar 0.017
- Provinsi yang mengalami perbaikan secara signifikan adalah Maluku Utara sebesar 0.02
- Konsentrasi kenaikan rasio gini terlihat ada di pulau Jawa, NTB, NTT, Maluku, Papua Barat dan Kalimantan.
- Wilayah yang mengalami perbaikan terkonsentrasi di pulau Sulawesi,

sebagian pulau Sumatera, Maluku Utara dan Papua Barat

- Ada 11 provinsi yang mengalami kenaikan rasio ketimpangan, 3 provinsi tidak mengalami perubahan dan 20 provinsi mengalami perbaikan.

e. Takeaways

Key Points

- Jumlah Penduduk Miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, naik 1,13 juta orang terhadap bulan Maret 2020 dan naik 2,76 juta orang terhadap September 2019.
- Persentase Penduduk Miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, naik 0,41% poin terhadap Maret 2020 dan naik 0,97 persen poin terhadap September 2019
- Garis kemiskinan paling tinggi ada di Bangka Belitung yang 60% lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Sementara untuk garis kemiskinan paling rendah ada di Sulawesi Barat. Konsentrasi garis kemiskinan tertinggi terletak di Pulau Papua, Maluku dan sebagian Kalimantan
- Konsentrasi garis kemiskinan yang paling rendah ada di Pulau Sulawesi.
- Pertambahan garis kemiskinan paling tinggi ada di Kalimantan Tengah dan yang terendah ada di Bengkulu
- Rata-rata pertambahan garis kemiskinan secara nasional Rp41627
- Secara geografis konsentrasi pertambahan garis kemiskinan paling besar ada di Pulau Kalimantan dan terendah ada di Jawa dan Sulawesi
- Garis Kemiskinan Perkotaan tertinggi ada di provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp723.478
- Garis Kemiskinan Perkotaan terendah ada di provinsi Sulawesi Barat Rp356967
- Rata-rata garis kemiskinan perkotaan nasional adalah Rp504387,5

- Garis kemiskinan terkonsentrasi paling besar di Papua, Maluku dan sebagian Kalimantan
- Pulau yang paling rendah angka garis kemiskinan ada di Sulawesi
- Provinsi dengan peningkatan Garis Kemiskinan Perkotaan paling tinggi adalah Maluku sebesar Rp38206. Provinsi dengan peningkatan Garis Kemiskinan Perkotaan terendah adalah Bengkulu Rp8138.
- Rata-rata peningkatan Garis Kemiskinan Perkotaan secara nasional adalah Rp20338.5
- Konsentrasi peningkatan garis kemiskinan perkotaan terbesar ada di Kalimantan dan Maluku dan terendah ada di Maluku Utara, sebagian Sumatera dan Jawa.
- Garis Kemiskinan Pedesaan tertinggi ada di provinsi Bangka Belitung Rp736850
- Garis Kemiskinan Pedesaan Terendah ada di Provinsi Sulawesi Selatan Rp350791
- Rata-rata besaran Garis Kemiskinan Pedesaan Rp459580. Pulau yang dengan konsentrasi Garis Kemiskinan Pedesaan Tertinggi ada di Kalimantan, Maluku, Kalimantan dan sebagian Sumatera.
- Sementara untuk yang terendah ada di NTT, NTB, Sulawesi, Jawa dan Jawa
- Rata-rata kedalaman kemiskinan nasional adalah 2.85%
- Provinsi dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan paling tinggi ada di Nusa Tenggara dan terendah ada di Gorontalo.
- Pulau dengan konsentrasi kedalaman kemiskinan paling parah ada NTB, Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Jawa.
 - Pulau dengan konsentrasi kedalaman kemiskinan paling rendah ada di Bali, Maluku Utara, Kalimantan dan Papua.
 - Rata-rata pertambahan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan adalah 0.24%
 - Pertambahan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan paling besar adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 0.68% dan

terendah adalah Kalimantan Utara yang justru mengalami perbaikan.

- Persebaran pertambahan angka persentase kedalaman kemiskinan pedesaan ada di Papua, Maluku dan sebagian besar wilayah Jawa dan paling rendah terlihat di Pulau NTB, Sulawesi dan Kalimantan.
- Rata-rata kedalaman kemiskinan pedesaan secara nasional adalah 2,39%. Kedalaman Kemiskinan paling tinggi ada di Papua Barat dan terendah ada di Bali. Secara geografis kedalaman kemiskinan terkonsentrasi di Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku dan NTB, NTT dan Sulawesi
- Sementara wilayah Indonesia Barat cenderung rendah
- Rata-rata perubahan kedalaman kemiskinan menurut provinsi adalah 1,62%
- Pertambahan secara nasional 6,9%.
- Provinsi dengan Kedalaman Kemiskinan tertinggi adalah Papua dan terendah adalah Bali. Konsentrasi Kedalaman Kemiskinan paling besar ada di Papua, Maluku dan NTB. Sementara yang terkecil ada di Bali dan Kalimantan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan per September 2020 paling tinggi terjadi di Pedesaan. Peningkatan Keparahan Kemiskinan paling tinggi per September 2019-2020 di wilayah pedesaan dengan peningkatan sebesar 0.15%
- Indeks Keparahan Kemiskinan lebih tinggi di pedesaan jika dibandingkan dengan Keparahan Kemiskinan di Perkotaan
- Keparahan Kemiskinan Pedesaan Indonesia per September 2020 adalah 0,68%. Angka rata-rata Keparahan Kemiskinan Pedesaan yakni 0.54% per September 2020. Keparahan Kemiskinan Pedesaan tertinggi di Papua Barat dan terendah di Bali
- Keparahan Kemiskinan terkonsentrasi paling tinggi di wilayah timur Indonesia

dan paling rendah di wilayah Kalimantan

- Angka Keparahan Kemiskinan Perkotaan nasional sebesar 0,31%.
- Provinsi dengan tingkat Keparahan Kemiskinan Perkotaan tertinggi adalah Sumatera Selatan sebesar 0,72% dan terendah adalah 0.09%
- Konsentrasi Keparahan Kemiskinan Perkotaan tertinggi berada di pulau Sumatera, Jawa, NTB dan NTT dan terendah ada di Maluku dan Kalimantan dan sebagian wilayah Sulawesi
- Rata-rata Keparahan Kemiskinan gabungan antara perkotaan dan pedesaan adalah 0.44%. Provinsi dengan Keparahan Kemiskinan gabungan paling tinggi adalah Papua Barat sebesar 2.41%, dan terendah Bali 0,12%
- Konsentrasi Keparahan Kemiskinan terlihat terkonsentrasi sangat besar di Indonesia Timur kecuali Maluku Utara, dan terendah di Bali dan Kalimantan
- Gini Rasio Perkotaan di Indonesia adalah 0,385. Provinsi Yogyakarta menduduki posisi Gini Rasio Perkotaan di Indonesia sebesar 0,439 dan provinsi terendah adalah Bangka-Belitung sebesar 0.271
- Dari data persebaran geografis terlihat bahwa Gini Koefisien tertinggi ada di Jawa, NTB, Bali dan sebagian Sulawesi dan terendah di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTB dan Kalimantan
- Gini Rasio Pedesaan di Indonesia adalah 0.319. Gini Rasio tertinggi ada di Papua sebesar 0.416 dan terendah Bangka Belitung 0.229. Ada dua provinsi yang Gini Rasionya di atas 0.4
- Konsentrasi Rasio Ketimpangan Pedesaan terlihat sangat besar di Papua, Sulawesi, Jawa, NTB, Bali dan NTT dan terendah ada di Kalimantan Maluku secara keseluruhan dan sebagian wilayah Sumatera
- Rasio Ketimpangan gabungan antara pedesaan dan perkotaan secara nasional adalah 0.385

- Provinsi dengan rasio ketimpangan tertinggi adalah Yogyakarta sebesar 0.437 dan terendah adalah Bangka Belitung
- Konsentrasi ketimpangan paling besar ada di Papua, Jawa, Bali, NTB, NTT dan sebagian besar Sulawesi. Sementara yang terendah ada di Kalimantan, Maluku dan Sumatera.

Tentang Penulis

dijadikan rujukan untuk masyarakat dan para pengambil kebijakan.

Asmiati Abdul Malik, Ph.D adalah seorang pakar dan analis di bidang Ilmu Ekonomi Politik Internasional. Ia sekarang bekerja sebagai peneliti senior di ASIAN SCENARIOS dan juga sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial di Program Studi Ilmu Politik di Universitas Bakrie. Ia mengajar beberapa mata kuliah termasuk Pengantar Ekonomi Politik, Negara, Pasar dan Masyarakat, Bisnis dan Politik, dan Ekonomi Politik Global

Asmiati memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kepakarannya di bidang Ilmu Ekonomi Politik. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2007, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di University of Birmingham di bidang Ilmu International Studies Economic Management dimana ia memperoleh gelas Master or Arts di tahun 2009. Pada tahun 2019, Asmiati menuntaskan program Doktor di University of Birmingham, dengan konsentrasi bidang di Ilmu *Political Economy*.

Asmiati juga merupakan penulis dari buku *Dinamika Kontemporer Politik Ekonomi Indonesia*. Karya tulis Asmiati banyak muncul di media internasional termasuk Nikkei Asia, The Diplomat, Huttington Post, Brink of Asia, Channel News Asia, National Geographic. Ia juga kerap muncul di media Internasional sebagai narasumber termasuk di The Washington Diplomat, surat kabar yang khusus untuk diplomat di dunia, Passblue media yang khusus membahas tentang program-program United Nations, dilema institusi dan organisasi di Perserikatan Bangsa-bangsa dan ABC Australia. Asmiati tertarik pada penelitian yang berkaitan mengenai Regional Ekonomi Politik dan Internasional Ekonomi Politik.

Sebagai akademisi Asmiati memiliki tujuan dan harapan ingin berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan pembangunan Indonesia melalui kontribusi ide-ide yang bisa



Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.2/RW.5, Karet,
Kecamatan Setiabudi, Kuningan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
<https://ubakriepress.bakrie.ac.id/>
email: ubakriepress@bakrie.ac.id

ISBN 978-602-7989-53-5

